



INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA 2023

Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2023

©2023 Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
Kementerian Pemuda dan Olahraga

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
(Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kemenpora RI)

H. Khaeril Adha, S.Pd., M.Si
(Asisten Deputi Kemitraan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
Kemenpora RI)

Ketua Tim Pelaksana:

Dr. H. Mustadin Taggala, S.Psi., M.Si

Anggota:

Aghna Swastika Fitri, S.Kom.
Ridwan Abdiwibowo,
Riana Octaria Fasha, S.Pd., M.Pd.,
Niken Pristania

Diterbitkan Oleh:

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora RI

Didukung Oleh:

Tim Badan Pusat Statistik



PT. INDONESIA EMAS GROUP

Tim Indonesia Emas Group

KATA PENGANTAR

Situasi pembangunan kepemudaan bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Pemuda dan segala pergulatannya akan selalu berhadapan dengan tantangan yang terjadi di masa mereka bertumbuh. Ketika berada di masa perjuangan dengan pergolakan sosial politik Nasional, pemuda tampil memainkan peran perjuangan dan pergerakan. Lahirlah gagasan Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda hingga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Setelah lebih 78 tahun Indonesia merdeka, kini pemuda berada di tengah arus global yang dipicu perkembangan teknologi informasi. Cara hidup dan menjawab kebutuhan tak lagi sama. Konektivitas antar pemuda menjadi berbeda. Cara mengakses pendidikan dan pembelajaran juga berbeda, termasuk cara menghabiskan waktu luang dan keterlibatan dengan masyarakat juga ikut bertransformasi.

Pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) telah menghilangkan banyak pekerjaan repetitif, alhasil akan menimbulkan masalah baru pada akses lapangan kerja pemuda. Menyiapkan pemuda dalam persaingan di era AI, bermakna menyiapkan pemuda untuk bersiap memasuki lapangan pekerjaan baru yang lahir dari inovasi dan kolaborasi memanfaatkan AI.

Di saat yang sama perkembangan demografi menempatkan dunia menjadi milik kaum muda. Bukan hanya dalam arti kiasan

tetapi dalam data sebenarnya. Dalam catatan *World Youth Report* (2020), saat ini penduduk bumi berusia 15-24 tahun diperkirakan 1,21 milyar jiwa. Angka ini menyumbang 15,5 persen dari populasi global. Diperkirakan kelompok pemuda akan menjadi 1,29 milyar atau setara 15,1% dari populasi pada tahun 2030.

Di Indonesia, jumlah penduduk pemuda bahkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keseluruhan penduduk. BPS mencatat jumlah pemuda di Indonesia (kelompok penduduk berusia 16-30 tahun) mencapai 65,82 juta jiwa atau setara 24% dari seluruh penduduk Indonesia.

Pemuda Untuk Hari Ini dan Masa Depan

Kondisi tersebut di atas menempatkan pembangunan pemuda menjadi strategis. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV tahun 2020-2024 menempatkan agenda peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu dari 7 agenda pembangunan. Hal ini didasari dari konstruksi berfikir jika manusia merupakan modal utama pembangunan Nasional yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Komitmen peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter salah satunya ditempuh dengan upaya peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Dalam setiap sejarah perubahan Bangsa Indonesia, pemuda selalu berada dalam barisan pelaku perubahan. Di satu sisi, pemuda merupakan kelompok penduduk spesifik yang membutuhkan pendekatan khusus agar pelayanan pemuda bisa maksimal.

Pemahaman kesejarahan peran pemuda dalam perjalanan Bangsa Indonesia membuat pemuda harus dilibatkan dalam gerak pembangunan Bangsa Indonesia hari ini dan di masa depan. Untuk menjamin kesiapan pemuda menjadi penerus Bangsa, maka dibuatlah tolok ukur yang mencerminkan pembangunan pemuda yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi yang menjadi domain dari Indeks Pembangunan Pemuda.

Peningkatan kualitas pemuda diarahkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi. Selain itu juga dilakukan peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan.

Faktor kesehatan pemuda baik fisik maupun mental juga menjadi perhatian yaitu melalui upaya pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Pembangunan pemuda mendapatkan tantangan yang cukup kuat dalam tiga tahun terakhir akibat Pandemi Covid-19. Sejumlah kegiatan kepemudaan harus adaptif dengan berbagai keterbatasan yang dilakukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Seiring dengan semakin banyaknya pelanggaran aktivitas, indikator dan domain dalam IPP semakin membaik pula dan bahkan telah melampaui capaian sebelum pandemi Covid-19.

Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan merupakan kerja bersama dari seluruh penyelenggara kepemudaan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Presiden Republik Indonesia telah mengamanatkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggara Pelayanan Kepemudaan. Bentuk koordinasi tersebut diwujudkan melalui program sinergis antar sektor, kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda, dan kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya.

Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan tidak hanya berada di pusat, tetapi di juga di daerah. Untuk melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengacu pada Rancangan Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan.

Indeks Pembangunan Pemuda yang datanya tersaji di buku ini, menjadi gambaran kondisi pemuda di berbagai provinsi di Indonesia. Gambaran ini digunakan untuk menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan pembangunan kepemudaan. Dibutuhkan analisis mendalam untuk melihat akar masalah dari setiap indikator yang mengalami penurunan. Tentu saja, RAD Pelayanan Kepemudaan membutuhkan *political will* atau komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan kepemudaan sebagai mainstream pembangunan di daerah masing-masing.

RAD Kepemudaan membutuhkan proses yang partisipatif, tujuan dan indikator yang jelas, sumber pendanaan, serta

penanggung jawab setiap indikator. Bagian yang tak kalah pentingnya yaitu perlunya monitoring dan evaluasi yang akuntabel serta strategi komunikasi yang tepat dan efektif.

Perbaikan pembangunan pemuda di setiap provinsi menjadi landasan yang penting semakin membaiknya capaian IPP secara Nasional. Tentu saja setiap daerah memiliki karakteristik permasalahannya masing-masing, sehingga kondisi pemuda yang tercermin dari IPP bisa menjadi pintu masuk memperbaiki pembangunan pemuda berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.

Prof. Dr. H.M Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Penanggung Jawab Buku Indeks

Pembangunan Pemuda 2023

SAMBUTAN

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Republik Indonesia

SAMBUTAN

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

SAMBUTAN

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

SAMBUTAN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Sambutan Menko PMK.....	viii
Sambutan Menpora.....	x
Sambutan Mendagri.....	xii
Sambutan Menteri Bappenas	xiv
Daftar Isi.....	xvii
BAB 1	
Pendahuluan	1
BAB 2	
Dinamika Capaian Pembangunan Pemuda Indonesia Periode 2015-2022	11
BAB 3	
Profil Indeks Pembangunan Pemuda 34 Provinsi.....	43
BAB 4	
Menerjemahkan IPP Menjadi Kebijakan.....	137
BAB 5	
Penutup.....	157
Daftar Pustaka	167



BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini menampilkan deskripsi mengenai peran pemuda dalam meningkatkan pembangunan Bangsa. Juga dipaparkan urgensi IPP sebagai tolok ukur pembangunan pemuda.

I.1 Pemuda dan Tantangan Masa Depan

Lompatan teknologi dan pandemi Covid-19 menjadi dua fenomena yang menimbulkan disrupsi atau perubahan masif yang menyebabkan tatanan sosial ikut berubah. Disrupsi ini menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang kian berubah. Salah satunya dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang kelak akan menjadi pemimpin Bangsa.

United Nation juga mengakui pentingnya kiprah pemuda terhadap kemajuan sebuah bangsa. Melalui *World Programme of Action for Youth* (2010), PBB mengungkapkan jika imajinasi, cita-cita dan energi kaum muda sangat penting untuk kelangsungan pembangunan masyarakat di mana mereka tinggal. Untuk itu PBB merumuskan 10 tindakan prioritas yang kemudian disempurnakan menjadi 15 tindakan prioritas pemuda yang terdiri dari pendidikan, pekerjaan, kelaparan dan kemiskinan, kesehatan, lingkungan, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, kegiatan waktu luang, anak perempuan dan perempuan muda, serta partisipasi penuh dan efektif pemuda dalam kehidupan dan pengambilan keputusan, globalisasi, teknologi informasi dan telekomunikasi, HIV/AIDS, konflik bersenjata, serta isu antargenerasi.

Bangsa Indonesia menempatkan pemuda sebagai harapan terhadap gerak dan laju Indonesia. Investasi terhadap peningkatan kualitas pemuda merupakan hal penting yang dilakukan sebagai bagian untuk mempersiapkan masa depan gemilang. Bonus demografi di mana kelompok usia produktif lebih besar tidak boleh disia-siakan menjelang puncaknya pada tahun 2025 hingga 2030.

Pemuda memiliki potensi yang luar biasa sebagai kekuatan positif dalam pembangunan ketika mereka diberi pengetahuan dan kesempatan yang tepat untuk berkembang. Sebagai individu, pemuda membutuhkan kedua aspek tersebut dan juga layanan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Membangun pemuda tidak hanya membangun individu pemuda, karena itulah dikembangkan pula lapisan lainnya yaitu lingkungan yang menjadi sumber penghidupan mereka yaitu lapisan penghidupan dan kesejahteraan. Pemuda juga perlu dilibatkan dalam berbagai bidang kehidupan terutama pada aspek partisipasi

dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender.

Keterlibatan pemuda sebagai subjek pembangunan menjadi bagian penting untuk memaksimalkan peran pemuda sebagai agen kunci perubahan sosial, pembangunan ekonomi dan juga inovasi teknologi. Sejarah menunjukkan peran pemuda sebagai subjek dalam pelbagai perubahan sosial di Indonesia. Pemuda juga tak sedikit yang telah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi. Catatan pemuda sebagai pelaku inovasi teknologi juga menghiasi perjalanan Bangsa Indonesia.

Pemuda perlu terus didorong, diupayakan dan difasilitasi untuk memaksimalkan potensinya sebagai generasi produktif, kreatif dan inovatif. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan pemenuhan kebutuhan pembangunan pemuda. Untuk itulah diperlukan pemetaan dan pengkajian untuk memantau capaian pembangunan pemuda.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) setidaknya memiliki empat fungsi utama. *Pertama*, memberikan informasi mengenai indikasi secara keseluruhan – lintas wilayah dan lintas sektor – tentang kemajuan pembangunan pemuda. Dari indikasi tersebut memberikan gambaran arah kebijakan pembangunan pemuda lintas wilayah dan lintas sektor. Pada gilirannya diharapkan berbagai aspek kehidupan dan kesejahteraan pemuda dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan kebijakan dan program pemuda yang berbasis data. *Kedua*, menjadi pengarah dan insentif bagi domain atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus para pemangku kepentingan—pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, serta kelompok pemuda sendiri. *Ketiga*, sebagai instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan pemuda yang dapat dibandingkan

antarwaktu dan antar wilayah serta menunjukkan dampak yang telah disepakati bersama di antara para pemangku kepentingan.

Laporan IPP ini telah menjadi instrumen resmi terkait indikator peningkatan kualitas pemuda pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Adapun Laporan IPP 2023 merupakan bagian dari laporan IPP tahunan yang menyajikan dan menganalisis capaian pembangunan pemuda dalam kerangka indeks pembangunan pemuda. Laporan IPP 2023 menjadi bagian dari penyediaan data dan informasi yang riil dan mencerminkan dinamika kinerja pembangunan pemuda

1.2 Demografi dan Sebaran Pemuda di Indonesia

Statistik Pemuda Indonesia 2022 BPS mengacu pada hasil Susenas tahun 2022, memperkirakan penduduk Indonesia berusia 16-30 tahun sebesar 65,82 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan 24 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Persentase jumlah penduduk pemuda dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. BPS hasil Susenas Maret tahun 2020 (23,86%), tahun 2021 (23,90%) dan tahun 2022 (24,0 persen).

Berdasarkan jenis kelamin, pemuda laki-laki berjumlah 33,67 juta jiwa (51,16%) dan pemuda perempuan sejumlah 32,15 juta jiwa (48,84%). Berdasarkan tempat tinggal, persentase pemuda yang tinggal di wilayah perkotaan lebih besar dibandingkan pemuda yang tinggal di pedesaan yaitu 57,40% berbanding 42,60%. Adapun distribusi pemuda berdasarkan pulau, lebih dari setengah pemuda (54,79%) tinggal di pulau Jawa. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemuda terbesar yaitu 12,43 juta jiwa, Jawa Timur 8,95 juta jiwa, dan Jawa Tengah 7,97 juta jiwa.

Sekitar 64,56% pemuda berstatus belum kawin, sementara yang berstatus kawin sebesar 34,33%, dan sisanya berstatus cerai hidup/mati (sekitar 1,11%). Sekitar 8,8% pemuda merupakan kepala rumah tangga, dan sementara itu sekitar 74,7% pemuda tinggal bersama keluarga.

Gorontalo memiliki persentase pemuda terbesar berbanding jumlah penduduk usia lain yaitu (26,83%) disusul Provinsi Papua Barat (26,60%) dan Sulawesi Barat (26,48%). Adapun provinsi dengan presentase pemuda terendah ada di Provinsi Bali (22,69%), Jawa Timur (22,21%) dan DI. Yogyakarta (21,85%). Hal ini mengindikasikan, pemuda bisa menjadi tumpuan dalam melakukan pemerataan pembangunan di bagian timur Indonesia, karena presentasi penduduk pemuda terbesar justru berada di bagian timur Indonesia.

1.3 Pengukuran Capaian Pembangunan Pemuda Indonesia

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Ketiga hal tersebut terdiri dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Kelima domain tersebut adalah (i) domain pendidikan, (ii) domain kesehatan dan kesejahteraan, (iii) domain lapangan dan kesempatan kerja, (iv) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (v) domain gender dan diskriminasi.



Gambar 1.
Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia

Secara umum tiga lapisan pembangunan pemuda yang dibagi ke dalam lima domain dan 15 indikator penyusunnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembangunan Individu

Lapisan ini merupakan kebutuhan yang bisa meningkatkan kapasitas individu dalam menjalani kehidupan. Dua hal yang termasuk dalam lapisan ini adalah domain pendidikan serta domain kesehatan dan kesejahteraan.

Domain Pendidikan memiliki 3 (tiga) indikator yakni rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi. Adapun

domain Kesehatan dan Kesejahteraan mencakup 4 (empat) indikator yakni angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Sesuai dengan metadata, sumber data dari dua domain ini berasal dari Survei Sosial-ekonomi Nasional atau Susenas.

b. Pembangunan Penghidupan dan Kesejahteraan

Penghidupan dan kesejahteraan pemuda tercermin dari meningkatnya akses mereka terhadap lapangan dan kesempatan kerja. Lapisan ini berkaitan erat dengan peranan pemuda dalam melakukan penetrasi di pasar tenaga kerja. Lapisan ini berisi satu domain yaitu domain Lapangan dan Kesempatan Kerja. Terdapat dua indikator untuk melihat domain ini yaitu persentase pemuda wirausaha kerah putih dan tingkat pengangguran terbuka pemuda. Dua indikator tersebut berasal dari data Survei Tenaga Kerja Nasional atau Sakernas.

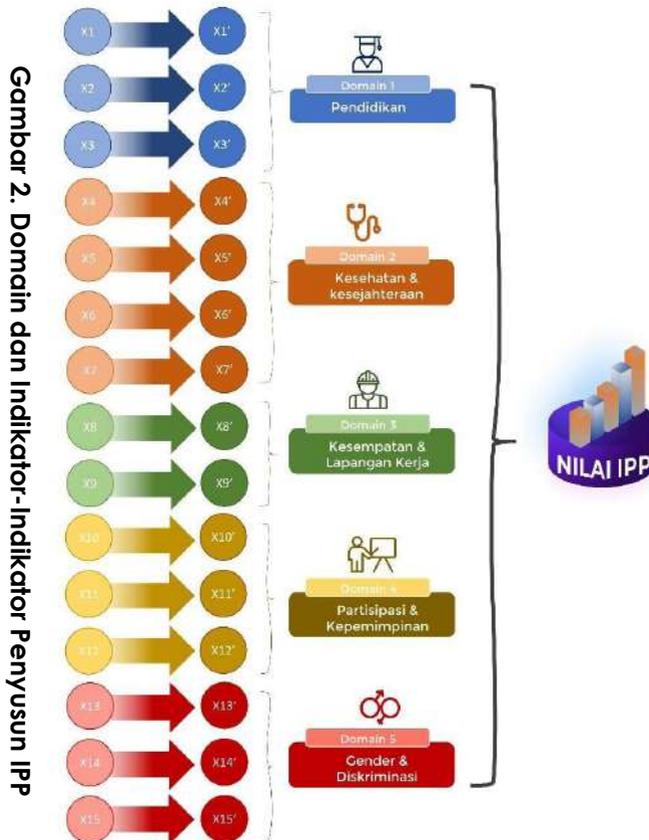
c. Partisipasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Sebagai lapisan terluar dari kerangka kerja IPP, lapisan ini melihat tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang kehidupan. Terdapat dua domain yang pada lapisan ini yaitu domain partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi.

Partisipasi dan kepemimpinan memiliki tiga indikator yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi, dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat. Tiga indikator tersebut berasal dari data Susenas Modul

Sosial Budaya Pendidikan (MSBP).

Lapisan ini juga mencantumkan aspek gender dan diskriminasi untuk memastikan terwujudnya kesetaraan pembangunan. Domain gender dan diskriminasi memiliki tiga indikator yakni angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas. Data indikator ini berasal dari data Susenas. Juga terdapat indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal yang datanya berasal dari data Sakernas.



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

1.4 Sistematika Laporan

Laporan IPP 2023 ini terdiri dari lima bab. Bab I memberikan gambaran peran pemuda dan tantangan capaian pembangunan pemuda. Bab 2 membahas dinamika capaian pemuda secara nasional sepanjang tahun 2015 hingga 2022. Juga potret pembangunan pemuda dikaitkan dengan tantangan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Bab 3 akan menyediakan deskripsi capaian pembangunan pemuda untuk 34 provinsi. Bab 4 berisi teori tentang pentingnya menerjemahkan IPP menjadi sebuah kebijakan. Dan Bab 5 adalah penutup yang berisikan simpulan dan arah ke depan.



BAB 2

DINAMIKA CAPAIAN PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA PERIODE 2015-2022

Bab ini membahas dinamika capaian pemuda secara nasional sepanjang tahun 2015 hingga 2022. Juga potret pembangunan pemuda dikaitkan dengan tantangan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

2.1 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda 2015-2022

Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2022 mengalami peningkatan dibandingkan IPP tahun 2020 (51,00) dan tahun 2021 (53,33). Peningkatan IPP dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut mencapai dua poin. Peningkatan IPP tahun 2023 didorong oleh peningkatan cukup tinggi pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta dari domain Lapangan dan Kesempatan Kerja.

Tidak ada domain yang mengalami penurunan pada IPP 2022 dibandingkan IPP tahun sebelumnya. Domain Pendidikan, domain Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Domain Gender dan Diskriminasi memiliki nilai yang sama dengan IPP tahun 2021.

Melihat peningkatan IPP sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 yang menjadi tahun saat pandemi Covid-19 dengan berbagai keterbatasan aktivitas menunjukkan jika pembangunan pemuda telah berada di jalur yang positif. Walaupun jika mengacu pada angka yang didapatkan, nilai ini masih jauh dari nilai tertinggi yaitu 100.



Gambar 3. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Nasional 2015-2022



Gambar 4. IPP Nasional Berdasarkan Domain 2015-2022

2.2 Peringkat IPP Masing-Masing Provinsi

Jika dibandingkan dengan capaian IPP Nasional, terdapat 10 Provinsi yang capaian IPP-nya lebih tinggi dibandingkan IPP Nasional. Provinsi tersebut yaitu DI Yogyakarta, Bali, Maluku Utara, Aceh, Papua, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat, dan Jawa Timur. Jika dilihat dari sebaran lokasi provinsi, hanya provinsi di Pulau Sulawesi yang tidak memiliki angka capaian IPP di atas angka Nasional.

Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan capaian IPP tertinggi. Provinsi DI Yogyakarta mendapatkan angka IPP sebesar 67,50. Capaian ini lebih tinggi 12,17 dibandingkan IPP Nasional. Peringkat kedua dengan capaian IPP tertinggi adalah provinsi Bali dengan angka 62,17. Dibandingkan dengan IPP Nasional angka IPP Bali lebih tinggi 11% atau 6,84 poin. Dan Provinsi ketiga adalah Maluku Utara dengan IPP 59,17.

Adapun provinsi dengan angka IPP terendah didapatkan oleh Provinsi Kalimantan Utara yaitu 49,67 atau lebih rendah 11,40 persen dibandingkan IPP Nasional. Jawa Barat juga mendapatkan

angka IPP yang sama yaitu 49,67. Di peringkat 32 terdapat provinsi Kalimantan Tengah dengan IPP 50,00 atau selisih 5,33 poin dari IPP Nasional.

Tabel 1. Peringkat IPP Provinsi Se-Indonesia

No	Provinsi	IPP	Selisih dengan IPP Nasional	Persentase
1	DI Yogyakarta	67,50	12,17	18,03
2	Bali	62,17	6,84	11,00
3	Maluku Utara	59,17	3,84	6,48
4	Aceh	57,67	2,34	4,05
5	Papua	57,50	2,17	3,77
6	Kepulauan Riau	56,83	1,50	2,65
7	Kalimantan Timur	56,67	1,34	2,36
8	Maluku	56,67	1,34	2,36
9	Papua Barat	55,83	0,50	0,90
10	Jawa Timur	55,50	0,17	0,31
11	Sumatra Barat	55,17	-0,16	-0,30
12	Bengkulu	54,83	-0,50	-0,91
13	Nusa Tenggara Timur	54,33	-1,00	-1,83
14	Gorontalo	53,83	-1,50	-2,78
15	Jawa Tengah	53,83	-1,50	-2,78
16	Sulawesi Selatan	53,67	-1,66	-3,10
17	Sulawesi Utara	53,33	-2,00	-3,74
18	Sulawesi Barat	53,33	-2,00	-3,74
19	Lampung	53,00	-2,33	-4,40
20	Sulawesi Tenggara	53,00	-2,33	-4,40
21	Sulawesi Tengah	53,00	-2,33	-4,40

22	Kepulauan Bangka Belitung	52,67	-2,66	-5,06
23	Sumatra Utara	52,50	-2,83	-5,39
24	Nusa Tenggara Barat	52,50	-2,83	-5,39
25	Banten	52,17	-3,16	-6,06
26	Riau	52,17	-3,16	-6,06
27	Jambi	51,83	-3,50	-6,75
28	DKI Jakarta	51,50	-3,83	-7,44
29	Sumatra Selatan	51,33	-4,00	-7,79
30	Kalimantan Barat	50,33	-5,00	-9,93
31	Kalimantan Selatan	50,17	-5,16	-10,29
32	Kalimantan Tengah	50,00	-5,33	-10,66
33	Jawa Barat	49,67	-5,66	-11,40
34	Kalimantan Utara	49,67	-5,66	-11,40

2.2.1 Domain Pendidikan

Domain pendidikan mencatatkan capaian tertinggi dibandingkan capaian domain lain. Walau menjadi tertinggi, capaian ini mengalami stagnasi sejak tahun 2019. Peningkatan terjadi pada rata-rata lama sekolah pemuda, di mana pada tahun 2021 adalah 10,89 menjadi 10,94 pada 2022. Peningkatan ini didorong oleh terjadinya peningkatan rata-rata lama sekolah pemuda di setiap provinsi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2021 yaitu 88,93 menjadi 88,80 pada tahun 2022. Angka ini menyajikan perbandingan antara jumlah pemuda pada jenjang pendidikan menengah dengan jumlah pemuda di usia sekolah. Demikian halnya dengan APK Perguruan

Tinggi juga mengalami sedikit penurunan dari 31,19 pada tahun 2021, menjadi 31,16 pada tahun 2022. APK Perguruan Tinggi setiap provinsi memiliki gap yang cukup tinggi. Provinsi DI Yogyakarta, memiliki APK Perguruan Tinggi 75,59 berbanding sangat jauh dengan provinsi lainnya yang hanya pada angka 20 hingga 40.



Gambar 5 Infografis Indikator dan Domain Pendidikan

Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan capaian Domain Pendidikan tertinggi yaitu mendapatkan angka 90,00 atau lebih tinggi 20 poin dibandingkan domain Nasional (70,00). Jika dipersentasekan, hasil ini lebih tinggi 28,57 persen. Diperingkat kedua terdapat provinsi Maluku yang mendapatkan angka 80,00. Angka ini lebih tinggi 10,00 poin atau 14,29% dibandingkan angka Nasional. Dan di peringkat ketiga terdapat Provinsi Aceh, Sumatra Barat, Kalimantan Timur dan Maluku Utara mendapatkan angka sama yaitu 76,67 atau lebih tinggi 6,67 poin (9,52%).

Adapun provinsi dengan angka domain pendidikan terendah adalah Provinsi Papua dengan angka 60,00. Angka ini lebih rendah 10 poin (-14,29%) dengan capaian Nasional. Di atasnya terdapat tiga provinsi dengan capaian angka yang sama yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sulawesi Barat. Masing-masing provinsi ini mendapatkan angka domain pendidikan 63,33 atau lebih rendah 6,67 poin (-9,52%) dibandingkan angka domain pendidikan Nasional.

Total terdapat 16 provinsi yang capainnya lebih baik dari capaian Nasional. Selain itu terdapat tujuh provinsi yang memiliki angka capaian yang sama dengan Nasional yaitu Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara. Masing-masing provinsi mendapatkan angka domain Pendidikan sebesar 70,00. Adapun provinsi yang mendapatkan capaian di bawah Nasional ada 11 provinsi.

Tabel 2. Peringkat Domain Pendidikan Provinsi Se-Indonesia

No	Provinsi	Domain Pendidikan	Selisih dengan Domain Pendidikan Nasional	Persentase (%)
1	DI Yogyakarta	90,00	20,00	28,57
2	Maluku	80,00	10,00	14,29
3	Aceh	76,67	6,67	9,52
4	Sumatra Barat	76,67	6,67	9,52
5	Kalimantan Timur	76,67	6,67	9,52
6	Maluku Utara	76,67	6,67	9,52
7	Sumatra Utara	73,33	3,33	4,76

8	Bengkulu	73,33	3,33	4,76
9	DKI Jakarta	73,33	3,33	4,76
10	Jawa Timur	73,33	3,33	4,76
11	Bali	73,33	3,33	4,76
12	Nusa Tenggara Barat	73,33	3,33	4,76
13	Sulawesi Tengah	73,33	3,33	4,76
14	Sulawesi Selatan	73,33	3,33	4,76
15	Sulawesi Tenggara	73,33	3,33	4,76
16	Papua Barat	73,33	3,33	4,76
17	Riau	70,00	0,00	0,00
18	Jambi	70,00	0,00	0,00
19	Kepulauan Riau	70,00	0,00	0,00
20	Jawa Tengah	70,00	0,00	0,00
21	Banten	70,00	0,00	0,00
22	Kalimantan Utara	70,00	0,00	0,00
23	Sulawesi Utara	70,00	0,00	0,00
24	Sumatra Selatan	66,67	-3,33	-4,76
25	Lampung	66,67	-3,33	-4,76
26	Jawa Barat	66,67	-3,33	-4,76
27	Nusa Tenggara Timur	66,67	-3,33	-4,76
28	Kalimantan Tengah	66,67	-3,33	-4,76
29	Kalimantan Selatan	66,67	-3,33	-4,76
30	Gorontalo	66,67	-3,33	-4,76
31	Kepulauan Bangka Belitung	63,33	-6,67	-9,52
32	Kalimantan Barat	63,33	-6,67	-9,52

33	Sulawesi Barat	63,33	-6,67	-9,52
34	Papua	60,00	-10,00	-14,29

2.2.2 Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

Domain kesehatan dan kesejahteraan memiliki nilai tertinggi kedua setelah domain pendidikan yaitu 65,00. Capaian domain kesehatan dan kesejahteraan tahun 2022 mencatatkan peningkatan drastis hingga lima poin. Hal ini dipicu semakin menurunnya mayoritas indikator pada domain ini. Angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, dan persentase pemuda merokok. Adapun persentase remaja perempuan yang sedang hamil memiliki nilai yang tetap dari tahun 2021-2022 sebesar 16,97.

Angka kesakitan pemuda turun dari 10,23% menjadi 9,51%. Walaupun demikian, angka ini masih cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana pada tahun 2020, indikator angka kesakitan pemuda 8,58%. Angka kesakitan pemuda terkait erat dengan tingkat kesehatan pemuda.

Kementerian Kesehatan melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), mengidentifikasi beberapa penyebab angka kesakitan pada usia muda. Beberapa penyebabnya antara lain dikarenakan terjadinya peningkatan penyakit tidak menular pada kelompok usia remaja dan dewasa muda. Penyakit seperti kanker, stroke, diabetes mellitus, dan hipertensi juga muncul pada kelompok usia 15-24 tahun dan angkanya terus meningkat hingga kelompok usia 35-44 tahun. Salah satu penyebabnya karena terkait gaya hidup generasi muda.

Stunting dan penyakit mental menjadi permasalahan kesehatan pemuda. Hasil studi *Indonesia National Adolescent Mental Health Survey* (I-NAMHS) menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia, sekitar 15,5 juta jiwa, memiliki masalah kesehatan mental dalam satu tahun terakhir.

Indikator Pemuda Korban Kejahatan terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir dan mencapai yang terendah pada tahun 2022 ini yaitu 0,46%. Walau jumlahnya semakin menurun, tetapi kewaspadaan pemuda terhadap kejahatan tetap harus ditingkatkan. Data BPS mengungkapkan dari seluruh pemuda yang pernah menjadi korban kejahatan selama setahun terakhir, sebesar 81,89 persen diantaranya menjadi korban pencurian. Sementara itu, sebesar 4,52 persen pemuda menjadi korban penganiayaan, 3,27 persen menjadi korban pencurian dengan kekerasan, dan 1,93 persen menjadi korban pelecehan seksual.

Indikator merokok menjadi indikator yang juga mempengaruhi domain Kesehatan dan Kesejahteraan Pemuda. Merokok menjadi faktor yang membawa risiko Penyakit Tidak Menular seperti jantung koroner, hipertensi, stroke, gangguan pernapasan dan kanker, impotensi, gangguan kehamilan, dan janin. Dalam tiga tahun terakhir, persentase pemuda merokok cenderung terus turun yang pada tahun 2022 mencapai 24,36%. Walau terus turun, angka ini terbilang cukup tinggi. Terlebih temuan BPS lainnya memperlihatkan terdapat 8,92 persen pemuda remaja (usia 16-18 tahun) yang merokok.

Adapun indikator persentase remaja perempuan yang sedang hamil juga menurun dibanding dua tahun sebelumnya yaitu 18,22% (tahun 2020), 16,97% (tahun 2021) dan turun menjadi 14,72% (tahun 2022). WHO mengungkapkan jika remaja Perempuan

terutama berusia di bawah 20 tahun memiliki risiko komplikasi pada kehamilan karena organ reproduksi masih belum berfungsi maksimal. Pemberian pemahaman kesehatan reproduksi perlu terus digalakkan kepada remaja.



Tertinggi
Papua (82,50)
Terendah
DI Yogyakarta (47,50)

Angka Kesakitan Pemuda
2,02 (DKI Jakarta) - 17,56 (Nusa Tenggara Barat)

Persentase Pemuda Korban Kejahatan
0,16 (Bali) - 0,9 (Nusa Tenggara Barat)

Persentase Pemuda yang Merokok
15,17 (Bali) - Nusa Tenggara Barat (30,08)

Persentase remaja Perempuan yang sedang hamil
0,0 (Kep. Riau/Banten) - 96,22 (DKI Jakarta)



Gambar Infografis Indikator dan Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

Provinsi Papua menjadi provinsi dengan capaian angka domain Kesehatan dan Kesejahteraan tertinggi yaitu 82,50. Angka ini lebih tinggi 17,20 poin dari capaian Nasional (65,00) atau setara dengan 26,92%. Di peringkat kedua terdapat provinsi Kepulauan Riau, Bali dan Maluku Utara. Ketiga provinsi ini mendapatkan angka 77,50 atau lebih tinggi 12,50 poin dari capaian Nasional atau setara 19,23%.

Adapun provinsi dengan capaian terendah adalah provinsi DI Yogyakarta yang hanya mendapatkan angka 47,50 atau lebih rendah 17,50 poin yang setara dengan -26,92% dari capaian Nasional. Di atasnya terdapat provinsi Kalimantan Utara yang mendapatkan angka 50,00 atau lebih rendah 15,00 poin (-23,08%). Selanjutnya terdapat provinsi Riau dan Nusa Tenggara Barat yang memiliki angka sama yaitu 52,50 atau lebih rendah 12,50 poin setara -19,23%.

Sebanyak 12 provinsi memiliki capaian Domain Kesehatan dan Kesejahteraan lebih baik dari capaian Nasional. Terdapat sembilan provinsi yang memiliki capaian yang sama dengan angka Nasional pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan yaitu Provinsi Aceh, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Maluku. Masing-masing provinsi ini mendapatkan angka domain Kesehatan dan Kesejahteraan sebesar 65,00. Adapun 13 provinsi mendapatkan angka di bawah Nasional.

Tabel 3. Peringkat Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Provinsi Se-Indonesia

No	Provinsi	Domain Kesehatan & Kesejahteraan	Selisih dengan Domain Kesehatan & Kesejahteraan Nasional	Persentase (%)
1	Papua	82,50	17,50	26,92
2	Kepulauan Riau	77,50	12,50	19,23
3	Bali	77,50	12,50	19,23
4	Maluku Utara	77,50	12,50	19,23
5	Kalimantan Timur	75,00	10,00	15,38
6	Banten	72,50	7,50	11,54
7	Kalimantan Selatan	72,50	7,50	11,54
8	Kepulauan Bangka Belitung	70,00	5,00	7,69
9	Kalimantan Tengah	70,00	5,00	7,69
10	Sulawesi Utara	70,00	5,00	7,69
11	Gorontalo	67,50	2,50	3,85
12	Papua Barat	67,50	2,50	3,85
13	Aceh	65,00	0,00	0,00
14	Sumatra Selatan	65,00	0,00	0,00
15	Lampung	65,00	0,00	0,00
16	Jawa Barat	65,00	0,00	0,00
17	Kalimantan Barat	65,00	0,00	0,00
18	Sulawesi Selatan	65,00	0,00	0,00
19	Sulawesi Tenggara	65,00	0,00	0,00
20	Sulawesi Barat	65,00	0,00	0,00
21	Maluku	65,00	0,00	0,00
22	Sumatra Utara	62,50	-2,50	-3,85

23	Sumatra Barat	62,50	-2,50	-3,85
24	Jambi	62,50	-2,50	-3,85
25	DKI Jakarta	62,50	-2,50	-3,85
26	Nusa Tenggara Timur	60,00	-5,00	-7,69
27	Sulawesi Tengah	60,00	-5,00	-7,69
28	Bengkulu	57,50	-7,50	-11,54
29	Jawa Tengah	57,50	-7,50	-11,54
30	Jawa Timur	57,50	-7,50	-11,54
31	Riau	52,50	-12,50	-19,23
32	Nusa Tenggara Barat	52,50	-12,50	-19,23
33	Kalimantan Utara	50,00	-15,00	-23,08
34	DI Yogyakarta	47,50	-17,50	-26,92

2.2.3 Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Di antara semua domain, Lapangan dan Kesempatan Kerja menjadi yang terendah. Setelah mengalami stagnasi dari pada tahun 2020 dan 2021 (40%), pada tahun 2020 meningkat menjadi 45%. Dua indikator dari domain Lapangan dan Kesempatan Kerja tahun 2022 mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya.

Untuk indikator wirausaha kerah putih (*white collar*), meningkat dari 0,41% menjadi 0,48%, setelah pada tahun 2021 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Wirausaha kerah putih merupakan jenis usaha yang membutuhkan skill dan kompetensi tinggi sehingga mencerminkan pekerja yang berkualitas atau memiliki latar belakang pendidikan yang baik.

Indikator lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda. Seiring meredanya pandemi Covid-19, TPT Pemuda

mengalami penurunan dari yang sebelumnya 15,23 (tahun 2020), lalu membaik dengan turun menjadi 14,42 (tahun 2021) dan kini semakin membaik dengan turun menjadi 13,93. Berdasarkan pendidikan terakhir, BPS hasil Sakernas Agustus 2022 mencatat tingkat pendidikan pengangguran terbanyak merupakan tamat Sekolah Menengah/ sederajat, diikuti tamat SMP/ sederajat.



Gambar 7 Infografis Indikator dan Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Provinsi yang berada pada peringkat teratas domain Lapangan dan Kesempatan Kerja adalah Provinsi DI Yogyakarta dengan angka 70,00. Capaian ini lebih tinggi 25 poin dari capaian Nasional atau 55,56%. Di tempat kedua dan ketiga masing-masing Sulawesi Barat dan Papua yang sama-sama mendapatkan angka 55,00 atau lebih tinggi 22,22% dibandingkan angka Nasional.

Provinsi yang mendapatkan angka terendah pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja adalah provinsi Maluku yaitu 25,00. Angka ini lebih rendah 20 poin (-44,44%) dari capaian Nasional. Adapun Jawa Barat dan Sulawesi Utara berada di peringkat rendah berikutnya dengan sama-sama mendapatkan angka 30,00. Angka ini lebih rendah 15,00 poin yang setara dengan -33,33%.

Sebanyak 11 provinsi mencatatkan capaian lebih tinggi dari capaian Nasional. Adapun 10 provinsi mendapatkan angka capaian yang sama dengan angka Nasional yaitu Riau, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat. Dan 13 Provinsi mendapatkan angka yang lebih rendah dari capaian Nasional.

Tabel 4. Peringkat Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Provinsi Se-Indonesia

No	Provinsi	Domain Lapangan & Kesempatan Kerja	Selisih dengan Domain Lapangan & Kesempatan Kerja Nasional	Persentase (%)
1	DI Yogyakarta	70,00	25,00	55,56
2	Sulawesi Barat	55,00	10,00	22,22
3	Papua	55,00	10,00	22,22
4	Bengkulu	50,00	5,00	11,11
5	Lampung	50,00	5,00	11,11
6	Kepulauan Bangka Belitung	50,00	5,00	11,11
7	Kepulauan Riau	50,00	5,00	11,11
8	Jawa Timur	50,00	5,00	11,11

9	Bali	50,00	5,00	11,11
10	Nusa Tenggara Barat	50,00	5,00	11,11
11	Sulawesi Tenggara	50,00	5,00	11,11
12	Riau	45,00	0,00	0,00
13	Sumatra Selatan	45,00	0,00	0,00
14	Jawa Tengah	45,00	0,00	0,00
15	Nusa Tenggara Timur	45,00	0,00	0,00
16	Kalimantan Timur	45,00	0,00	0,00
17	Kalimantan Utara	45,00	0,00	0,00
18	Sulawesi Tengah	45,00	0,00	0,00
19	Gorontalo	45,00	0,00	0,00
20	Maluku Utara	45,00	0,00	0,00
21	Papua Barat	45,00	0,00	0,00
22	Aceh	40,00	-5,00	-11,11
23	Sumatra Utara	40,00	-5,00	-11,11
24	Sumatra Barat	40,00	-5,00	-11,11
25	Jambi	40,00	-5,00	-11,11
26	Kalimantan Barat	40,00	-5,00	-11,11
27	Kalimantan Tengah	40,00	-5,00	-11,11
28	Sulawesi Selatan	40,00	-5,00	-11,11
29	DKI Jakarta	35,00	-10,00	-22,22
30	Banten	35,00	-10,00	-22,22
31	Kalimantan Selatan	35,00	-10,00	-22,22
32	Jawa Barat	30,00	-15,00	-33,33
33	Sulawesi Utara	30,00	-15,00	-33,33
34	Maluku	25,00	-20,00	-44,44

2.1.4 Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Capaian domain Partisipasi dan Kepemimpinan sama dengan hasil tahun 2021 yaitu 43,33%. Jika mengacu dengan hasil tahun 2015 hingga 2019, maka capaian ini menurun karena sepanjang tahun 2015 hingga 2019 domain ini memiliki nilai 46,67%.

Terdapat tiga indikator yang mempengaruhi domain Partisipasi dan Kepemimpinan yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat.

Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sama dengan tahun sebelumnya yaitu 70,49%. Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi juga sama dengan tahun sebelumnya 4,84%. Demikian halnya dengan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat yaitu 5,40%. Salah satu penyebab dari kondisi ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan berbagai program organisasi dan agenda kepemudaan mengalami penyesuaian.



Gambar 8 Infografis Indikator dan Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Peringkat tertinggi domain Partisipasi dan Kepemimpinan dicatatkan oleh Provinsi Maluku dengan angka 56,67. Angka ini lebih tinggi 13,34 poin atau 30,78 persen dari capaian Nasional. Lalu diikuti empat provinsi yang mendapatkan angka yang sama yaitu Aceh, DI Yogyakarta, Maluku Utara, dan Papua yang masing-masing mencatatkan angka 53,33. Angka ini lebih tinggi 10 poin dari angka Nasional.

Adapun peringkat terbawah ditempati Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan angka 20,00. Hasil ini lebih rendah 23,33 poin yang setara dengan -53,84%. Peringkat di atasnya terdapat provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara dengan nilai 30,00 atau lebih rendah 13,33 poin yang setara dengan -30,76% dibandingkan capaian Nasional.

Sebanyak 10 provinsi mendapatkan angka di atas Nasional. Sedangkan lima provinsi mendapatkan angka yang sama dengan capaian Nasional. Provinsi tersebut antara lain Provinsi Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Tengah. Sedangkan 19 provinsi lainnya mendapatkan nilai yang lebih rendah dari capaian Nasional.

Tabel 5. Peringkat Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Provinsi Se-Indonesia

No	Provinsi	Domain Partisipasi & Kepemimpinan	Selisih dengan Domain Partisipasi & Kepemimpinan Nasional	Persentase (%)
1	Maluku	56,67	13,34	30,78
2	Aceh	53,33	10,00	23,09
3	DI Yogyakarta	53,33	10,00	23,09
4	Maluku Utara	53,33	10,00	23,09
5	Papua	53,33	10,00	23,09
6	Nusa Tenggara Timur	50,00	6,67	15,39
7	Nusa Tenggara Barat	46,67	3,34	7,70
8	Sulawesi Utara	46,67	3,34	7,70
9	Gorontalo	46,67	3,34	7,70
10	Papua Barat	46,67	3,34	7,70
11	Jambi	43,33	0,00	0,00
12	Jawa Tengah	43,33	0,00	0,00
13	Jawa Timur	43,33	0,00	0,00
14	Bali	43,33	0,00	0,00

15	Sulawesi Tengah	43,33	0,00	0,00
16	Sumatra Barat	40,00	-3,33	-7,69
17	Riau	40,00	-3,33	-7,69
18	Bengkulu	40,00	-3,33	-7,69
19	Kalimantan Barat	40,00	-3,33	-7,69
20	Sulawesi Barat	40,00	-3,33	-7,69
21	Sumatra Selatan	36,67	-6,66	-15,38
22	Lampung	36,67	-6,66	-15,38
23	Jawa Barat	36,67	-6,66	-15,38
24	Sulawesi Selatan	36,67	-6,66	-15,38
25	Sumatra Utara	33,33	-10,00	-23,07
26	Banten	33,33	-10,00	-23,07
27	Kalimantan Tengah	33,33	-10,00	-23,07
28	Kalimantan Selatan	33,33	-10,00	-23,07
29	Kepulauan Bangka Belitung	30,00	-13,33	-30,76
30	Kepulauan Riau	30,00	-13,33	-30,76
31	Kalimantan Timur	30,00	-13,33	-30,76
32	Kalimantan Utara	30,00	-13,33	-30,76
33	Sulawesi Tenggara	30,00	-13,33	-30,76
34	DKI Jakarta	20,00	-23,33	-53,84

2.1.5 Domain Gender dan Diskriminasi

Domain gender dan diskriminasi menggunakan indikator angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi, serta persentase

pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Dari perhitungan ketiga indikator ini didapati jika domain gender dan diskriminasi memiliki nilai yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu, 53,33%. Walaupun demikian jika dibandingkan tahun 2015–2020, nilai tahun ini menunjukkan perkembangan yang berarti.

Indikator perkawinan usia anak mempertimbangkan jika perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Selain itu juga dapat menyebabkan beberapa hak dasar anak tidak terpenuhi, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Walau terjadi penurunan persentase perkawinan usia anak, tetapi masih perlu mendapat perhatian. Merujuk data Susenas Maret 2022, masih terdapat sekitar 19,24 persen pemuda yang usia kawin pertamanya di usia 16–18 tahun. Bahkan masih terdapat 2,26 persen pemuda yang menikah di usia kurang dari 16 tahun. Padahal, pemerintah melakukan perubahan atas UU Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2019. Salah satu perubahan yang tertera adalah mengenai batasan umur perkawinan untuk perempuan, yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun.

Persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi juga cenderung naik dibanding capaian pada tahun 2021. Pada tahun 2022, indikator ini naik menjadi 41,66%. Kenaikan ini juga sejalan dengan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Indikator ini naik menjadi 24,03 pada tahun 2022.



Gambar 9 Infografis Indikator dan Domain Gender dan Diskriminasi

Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan capaian tertinggi pada Domain Gender dan Diskriminasi. DI Yogyakarta mendapatkan angka 76,67, di mana angka ini lebih tinggi 23,34 poin atau setara 43,76% dibandingkan capaian Nasional. Di peringkat kedua dan ketiga terdapat DKI Jakarta dan Bali yang mengumpulkan angka sama yaitu 66,67. Angka ini lebih tinggi 13,34 poin atau setara 25,01% dari capaian Nasional.

Adapun Provinsi Papua mendapat nilai terendah yaitu 36,67. Angka ini lebih rendah 16,66 poin (-31,25%) dari nilai Nasional. Di atas Papua terdapat provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah yang mendapatkan angka 40,00 atau lebih rendah 13,33 poin (-25%) dari capaian Nasional.

Sebanyak tujuh provinsi mendapatkan capaian lebih baik dari capaian Nasional. Sedangkan delapan provinsi mendapatkan

capaian sama dengan capaian Nasional. Provinsi tersebut antara lain Aceh, Sumatra Utara, Riau, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Selatan. Adapun jumlah provinsi yang mendapatkan capaian lebih rendah dari angka Nasional terdiri dari 19 provinsi.

Tabel 6. Peringkat Domain Gender dan Partisipasi Provinsi Se-Indonesia

No	Provinsi	Domain Gender & Diskriminasi	Selisih dengan Domain Gender & Diskriminasi	Persentase (%)
1	DI Yogyakarta	76,67	23,34	43,76
2	DKI Jakarta	66,67	13,34	25,01
3	Bali	66,67	13,34	25,01
4	Sumatra Barat	56,67	3,34	6,26
5	Kepulauan Riau	56,67	3,34	6,26
6	Kalimantan Timur	56,67	3,34	6,26
7	Maluku	56,67	3,34	6,26
8	Aceh	53,33	0,00	0,00
9	Sumatra Utara	53,33	0,00	0,00
10	Riau	53,33	0,00	0,00
11	Bengkulu	53,33	0,00	0,00
12	Jawa Tengah	53,33	0,00	0,00
13	Jawa Timur	53,33	0,00	0,00
14	Kalimantan Utara	53,33	0,00	0,00
15	Sulawesi Selatan	53,33	0,00	0,00
16	Kepulauan Bangka Belitung	50,00	-3,33	-6,24

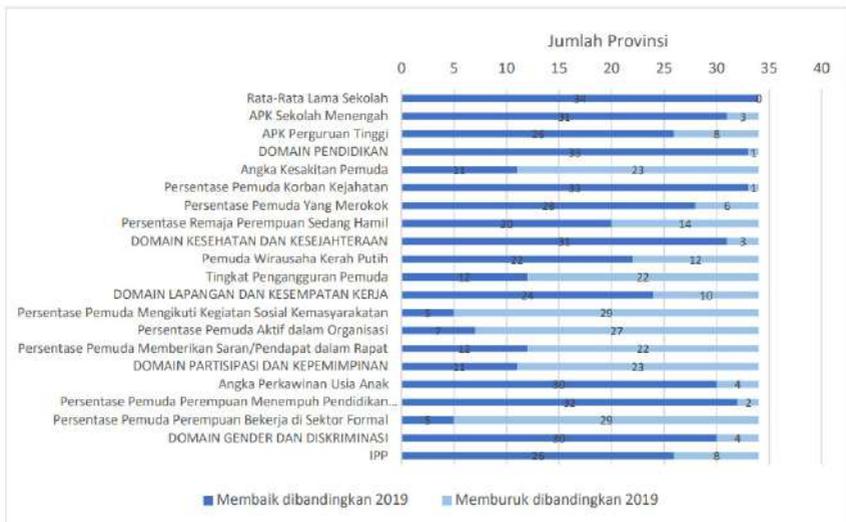
17	Jawa Barat	50,00	-3,33	-6,24
18	Banten	50,00	-3,33	-6,24
19	Nusa Tenggara Timur	50,00	-3,33	-6,24
20	Sulawesi Utara	50,00	-3,33	-6,24
21	Lampung	46,67	-6,66	-12,49
22	Sulawesi Tenggara	46,67	-6,66	-12,49
23	Papua Barat	46,67	-6,66	-12,49
24	Jambi	43,33	-10,00	-18,74
25	Sumatra Selatan	43,33	-10,00	-18,74
26	Kalimantan Barat	43,33	-10,00	-18,74
27	Kalimantan Selatan	43,33	-10,00	-18,74
28	Sulawesi Tengah	43,33	-10,00	-18,74
29	Gorontalo	43,33	-10,00	-18,74
30	Sulawesi Barat	43,33	-10,00	-18,74
31	Maluku Utara	43,33	-10,00	-18,74
32	Nusa Tenggara Barat	40,00	-13,33	-25,00
33	Kalimantan Tengah	40,00	-13,33	-25,00
34	Papua	36,67	-16,66	-31,25

2.3 Pemulihan Capaian Pembangunan Pemuda Pasca Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 mulai dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Sejak saat itu beberapa kebijakan pembatasan aktivitas dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus Covid.

Termasuk dengan berbagai kegiatan terkait pelayanan kepemudaan juga mengalami beragam adaptasi. Walau sepanjang tahun 2022, status pandemi Covid-19 belum dinyatakan selesai, tetapi berbagai kelonggaran aktivitas telah mulai dilakukan termasuk aktivitas pendidikan, dan kegiatan kepemudaan lainnya.

Untuk melihat pertumbuhan pembangunan kepemudaan dari sebelum dan pasca Covid19 dapat dilakukan dengan membandingkan pencapaian setiap domain dan indikator. Perbandingan ini membandingkan capaian tahun 2019 sebelum Covid-19, dengan capaian tahun 2022. Hasilnya diperoleh sebagai berikut:



Gambar 10. Pemulihan Indikator Capaian Pembangunan Pemuda Nasional (% terhadap 2019)

Keterangan: Pemulihan indikator IPP dihitung dengan membandingkan capaian tahun 2022 dengan capaian tahun

2019 yang merupakan kondisi sebelum krisis pandemi COVID-19. Angka nol atau besar dari nol (positif) menunjukkan bahwa capaian suatu indikator telah kembali ke tren capaian sebelum krisis atau bahkan melebihinya. Angka di bawah nol (negatif) menunjukkan capaian suatu indikator belum pulih dari capaian yang sudah baik sebelumnya. Indikator berikut ini dinormalisasi menjadi tren positif: angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, persentase remaja perempuan sedang hamil, tingkat pengangguran pemuda, dan angka perkawinan usia anak.

Dari perbandingan indikator ini, tercermin jika capaian pembangunan pemuda tahun 2022 jauh membaik yang ditunjukkan dengan peningkatan capaian pada 10 indikator yaitu rata-rata lama sekolah, APK sekolah menengah, APK Perguruan Tinggi, angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang merokok, persentase remaja perempuan yang sedang hamil, pemuda wirausaha kerah putih, angka perkawinan usia anak, serta indikator persentase pemuda perempuan menempuh pendidikan menengah dan tinggi.

Adapun lima indikator lainnya belum membaik pasca pandemi Covid-19. Kelima indikator tersebut yaitu tingkat pengangguran pemuda, persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda aktif dalam organisasi, persentase pemuda memberikan saran/pendapat dalam rapat, serta persentase pemuda perempuan bekerja di sektor formal.

Untuk IPP, dibanding tahun 2019, terjadi kenaikan sebanyak 5%. Demikian halnya dengan Domain Pendidikan pada sejumlah indikatornya terdapat kenaikan. Jumlah kenaikan yang cenderung kecil ini belum bisa meningkatkan nilai Domain Pendidikan secara

keseluruhan. Kenaikan pada seluruh indikator juga terlihat pada Domain Kesehatan dan Kesejahteraan di mana terjadi perbaikan yang cukup besar pada indikator Persentase Pemuda Korban Kejahatan (65% dibanding tahun 2019). Alhasil pencapaian ini membuat indikator Domain dan Kesejahteraan naik 18% dibandingkan capaian domain tersebut pada tahun 2019.

Adapun Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja tidak mengalami perubahan. Capaian indikator Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda mengalami penurunan 7% walau indikator Pemuda Wirausaha Kerah Putih naik sebanyak 2%.

Domain yang masih belum membaik pasca Pandemi Covid-19 adalah domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang justru mengalami penurunan sebanyak 7% dibandingkan sebelum Pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pemuda aktif dalam organisasi, persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial dan persentase pemuda memberikan saran/pendapat belum juga membaik. Hal ini dimungkinkan karena beberapa kegiatan organisasi kepemudaan belum pulih seperti sebelum pandemi.

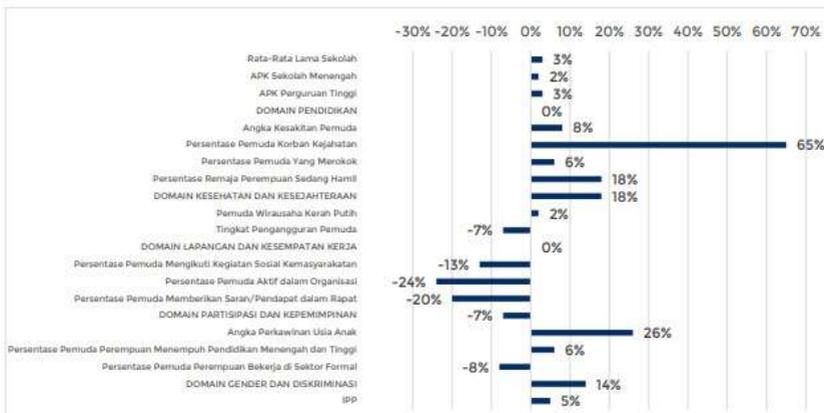
Adapun Domain Gender dan Diskriminasi cenderung lebih baik yaitu meningkat 14% dengan hasil yang didapatkan sebelum pandemi. Semua indikator menunjukkan peningkatan kecuali pada indikator Persentase Pemuda Perempuan menempuh pendidikan menengah/tinggi.

2.4 Pemulihan Capaian Pembangunan Pemuda Pasca Pandemi Setiap Provinsi

Untuk melihat konsistensi sebaran pemulihan capaian pembangunan pemuda pasca pandemi setiap provinsi dilakukan

dengan menghitung jumlah provinsi yang capaiannya lebih baik dibandingkan tahun 2019. Peningkatan IPP setiap provinsi di Indonesia memperlihatkan hasil positif. Dari 34 Provinsi, terdapat 26 provinsi yang hasil IPP pada tahun 2022 lebih baik dibandingkan IPP yang diperoleh pada tahun 2019 lalu. Masih terdapat 8 provinsi yang capaian IPPnya belum kembali ke tren seperti pencapaian mereka pada tahun 2019 lalu.

Gambaran capaian setiap indikator dan domain setiap provinsi dibandingkan dengan hasil tahun 2019 (sebelum pandemi). Berdasarkan hasil pembandingan, tergambar terjadinya ketidakseragaman pemulihan masing-masing provinsi pada berbagai domain. Beberapa domain pulih lebih cepat di banyak provinsi, dan beberapa yang lain masih belum pulih sepenuhnya. Kondisi tersebut terlihat pada tabel berikut:



Gambar 11. Ketidakseragaman Pemulihan Indikator Pemuda Provinsi

Domain pendidikan menjadi domain yang mengalami pemulihan tercepat. Pada indikator rata-rata lama sekolah, seluruh provinsi telah berhasil mendapatkan hasil lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Pada APK Sekolah Menengah, masih terdapat 3 provinsi yang capaiannya di bawah hasil yang didapatkan pada tahun 2019. Sedangkan pada indikator APK perguruan tinggi, masih terdapat 8 provinsi yang capaiannya di bawah hasil 2019.

Adapun domain Kesehatan dan Kesejahteraan, indikator Angka Kesakitan Pemuda memerlukan perhatian, karena terdapat 23 provinsi yang belum mengalami pencapaian yang sama atau lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Demikian halnya pada persentase remaja perempuan sedang hamil, masih terdapat 14 provinsi yang capaiannya di bawah angka 2019. Adapun indikator persentase pemuda korban kejahatan, tersisa satu provinsi yang masih di bawah angka tahun 2019. Dan indikator persentase pemuda yang merokok tersisa 6 provinsi yang capaiannya di bawah angka tahun 2019.

Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Tercatat masih 10 provinsi yang capaiannya belum kembali dengan hasil yang mereka dapatkan di tahun 2019. Indikator tingkat pengangguran pemuda menjadi titik perhatian di mana terdapat 21 provinsi yang mendapatkan nilai lebih buruk dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Adapun indikator pemuda wirausaha kerah putih sebanyak 22 provinsi telah kembali ke tren naik dan 12 sisanya masih mendapatkan hasil di bawah capaian tahun 2019.

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan menjadi domain yang belum mengalami pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Tercatat hanya ada 11 provinsi yang berhasil mendapatkan angka lebih tinggi

dibandingkan capaian tahun 2019. Adapun indikator yang paling lambat pulih ada pada indikator persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, di mana baru terdapat lima provinsi yang mendapatkan capaian lebih baik dibandingkan tahun 2019.

Persentase pemuda aktif dalam organisasi tercatat baru 7 provinsi yang mendapatkan hasil lebih baik dibandingkan tahun 2019. Dan indikator persentase pemuda memberikan saran/pendapat dalam rapat baru 12 provinsi yang mendapatkan hasil lebih baik dibandingkan tahun 2019.

Domain Gender dan Diskriminasi telah menunjukkan pemulihan pasca pandemi Covid19. Tercatat 30 provinsi telah mendapatkan hasil lebih baik dibandingkan tahun 2019. Adapun indikator yang masih menjadi kendala ada pada indikator persentase pemuda perempuan bekerja di sektor formal, di mana baru 5 provinsi yang mendapatkan capaian lebih baik dibandingkan tahun 2019.



BAB 3

PROFIL INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA 34 PROVINSI

Bab ini menampilkan deskripsi statistik capaian Indeks Pembangunan Pemuda secara umum, domain, dan indikator pembentuk domain untuk 34 Provinsi di Indonesia. Pada bagian ini juga dijelaskan perbandingan domain dan indikator IPP setiap provinsi dengan rata-rata nilai nasional

3.1 Provinsi Aceh

Jumlah pemuda di Provinsi Aceh pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 1,38 juta jiwa yang terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 706,6rb dan pemuda perempuan sebanyak 671 ribu jiwa. Capaian IPP di Provinsi Aceh pada tahun 2022 adalah 57,67. Angka ini sama dengan capaian yang didapatkan pada tahun 2021.

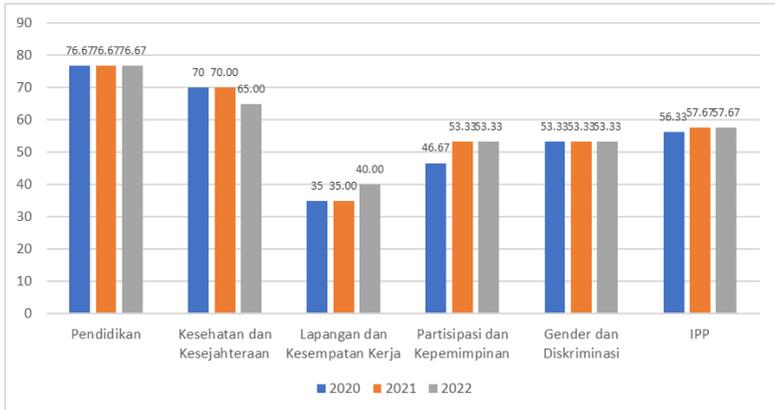
Peningkatan capaian terjadi pada domain Lapangan dan Kesempatan yang semua pada tahun 2021 mendapat nilai 35,00 meningkat menjadi 40,00 pada tahun 2022. Adapun domain Kesehatan dan Kesejahteraan mengalami penurunan dari 70,00 (tahun 2021) menjadi 65,00 pada tahun 2022. Pada domain Gender dan Diskriminasi, hasil yang didapatkan pada tahun 2022, sama dengan hasil yang didapatkan pada tahun 2021 yaitu 53,33.

Jika dibandingkan dengan capaian secara Nasional, domain Pendidikan serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan lebih baik daripada capaian Nasional. Capaian ini membuat IPP Aceh lebih baik dibandingkan IPP secara Nasional.

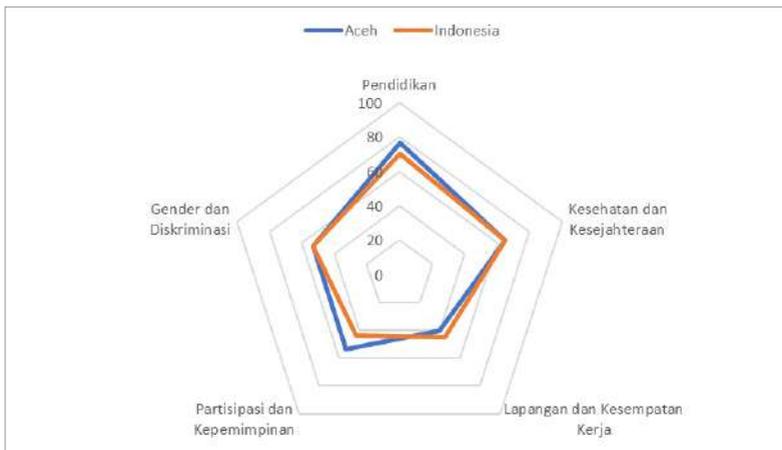
Kinerja capaian pembangunan pemuda yang perlu mendapatkan perhatian ada pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja. Salah satu yang perlu didorong adalah meningkatkan pemuda wirausaha kerah putih yang pada tahun 2022 masih berada di bawah capaian nasional yaitu 0,44 berbanding 0,48.

Gambar 12. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Aceh pada Tahun 2022

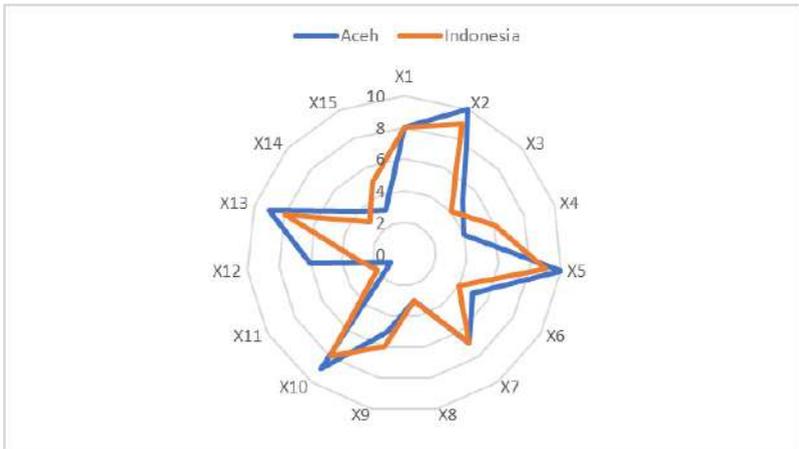
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Aceh tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Aceh dan Nasional pada tahun 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Aceh dan Nasional pada tahun 2022



3.2 Provinsi Sumatra Utara

Sebanyak 3,7 juta pemuda diperkirakan tinggal di Sumatra Utara pada tahun 2022 yang terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 1,89 juta jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 1,83 juta jiwa. Jumlah ini menjadi yang terbesar keempat di Indonesia dan menjadi provinsi dengan jumlah pemuda terbanyak pertama di luar pulau Jawa.

Dibandingkan dengan tahun 2021, semua domain mendapatkan capaian yang sama dengan yang diraih pada tahun 2022. Walau demikian domain Lapangan dan Kesempatan Kerja serta Partisipasi dan Kepemimpinan justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Demikian halnya dengan raihannya IPP tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2020.

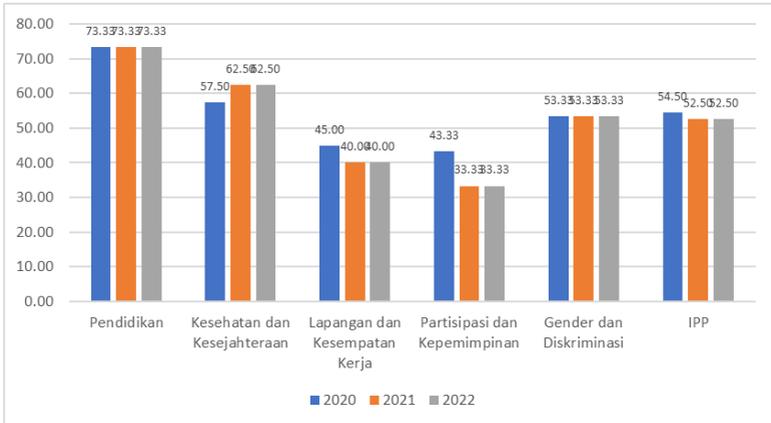
Domain pendidikan di Sumatra Utara berada di atas angka capaian domain Pendidikan Nasional. Sayangnya, mengacu dengan capaian Nasional, IPP Sumatra Utara masih berada dibawah IPP Nasional. Hasil ini karena sejumlah domain yang lebih rendah dibanding capaian Nasional.

Domain Kesehatan dan Kesejahteraan masih lebih rendah dengan capaian Nasional. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan perlu mendapatkan perhatian lebih karena semua indikator cukup rendah. Indikator seperti persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (65,21), persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (4,12) dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (3,45) berada cukup jauh dari capaian Nasional.

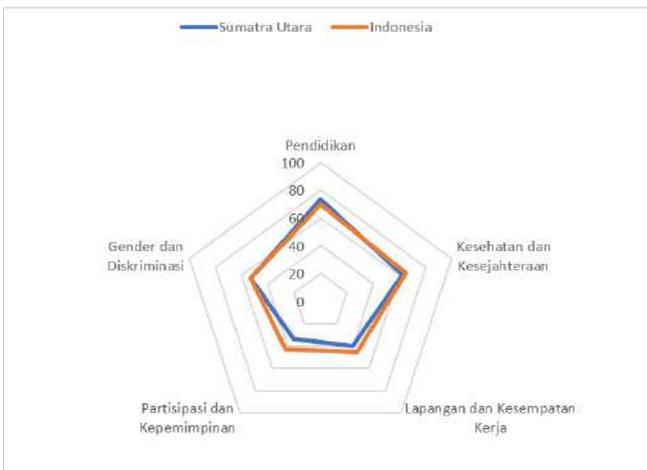
Untuk meningkatkan IPP Sumatra Utara, maka berbagai indikator pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan perlu ditingkatkan. Demikian halnya pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan Pemuda.

Gambar 13. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2022

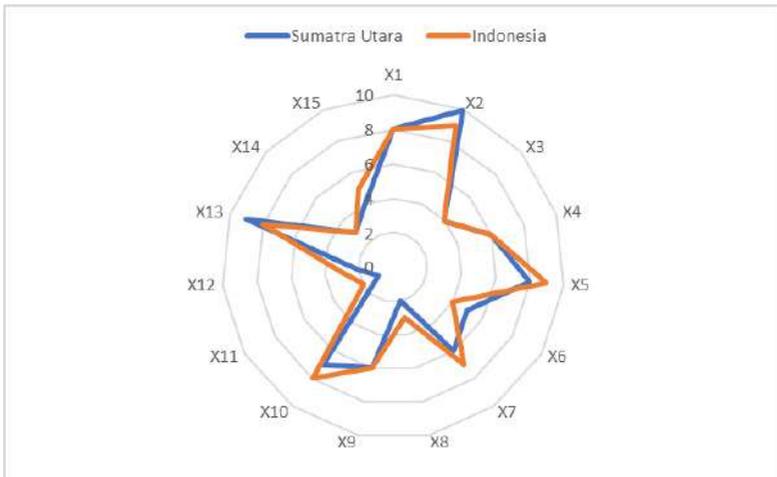
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sumatera Utara dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sumatra Utara dan Nasional pada tahun 2022



3.3 Provinsi Sumatra Barat

Jumlah pemuda di Sumatra Barat pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 1,36 juta jiwa yang terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 698,6 ribu jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 669,3 ribu jiwa. Capaian IPP tahun 2022 di Provinsi Sumatra Barat mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 (51,33). Kenaikan nilai IPP tahun 2022 (55,17) juga mendekati capaian IPP Nasional.

Perbaikan nilai IPP dicapai setelah terjadi perbaikan pada setiap domain. Pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan terjadi perbaikan yang cukup tinggi dari sebelumnya pada tahun 2021 mendapatkan nilai 45,00 meningkat menjadi 62,50. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja juga mendapat perbaikan dari

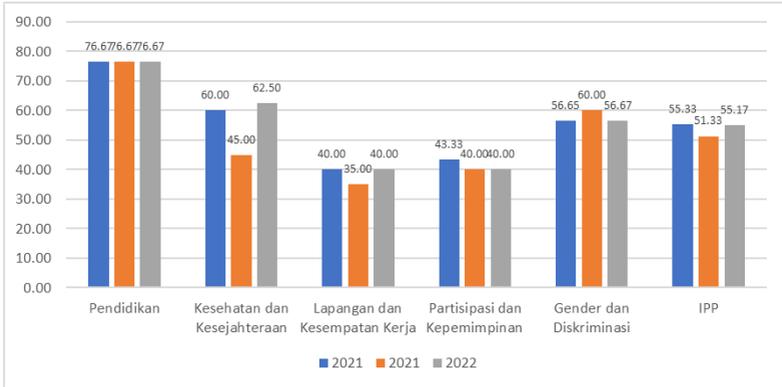
sebelumnya pada tahun 2021 mendapat nilai 35,00 menjadi 40,00 pada tahun 2022.

Domain pendidikan mengalami stagnasi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Angka yang didapatkan lebih tinggi dari angka Nasional. Stagnasi juga terjadi pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan. Domain ini pada tahun 2020 mendapatkan angka 43,33 lalu mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 40,00 dan bertahan pada angka tersebut pada tahun 2022.

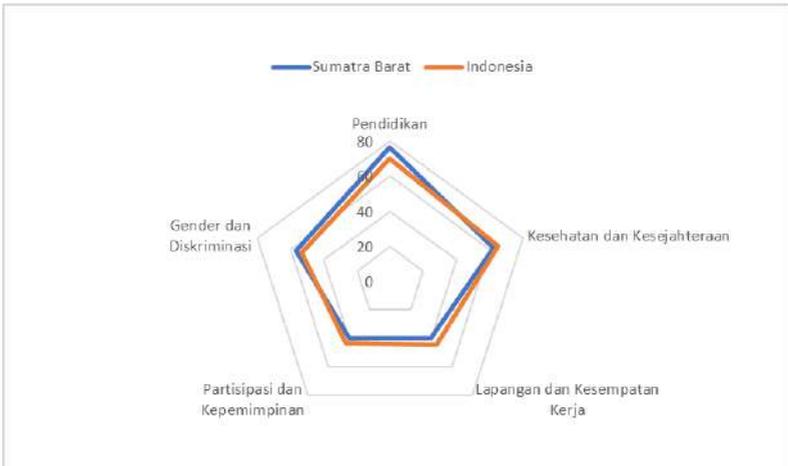
Domain gender dan diskriminasi, meski mengalami penurunan, tetapi nilai yang diraih (56,67) masih berada di atas capaian Nasional. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja telah mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masih berada di bawah rata-rata Nasional. Untuk itu perlu didorong perbaikan pada sejumlah indikator seperti pemuda wirausaha kerah putih (0,36) dan TPT Pemuda (13,34).

Gambar 14. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatra Barat pada Tahun 2022

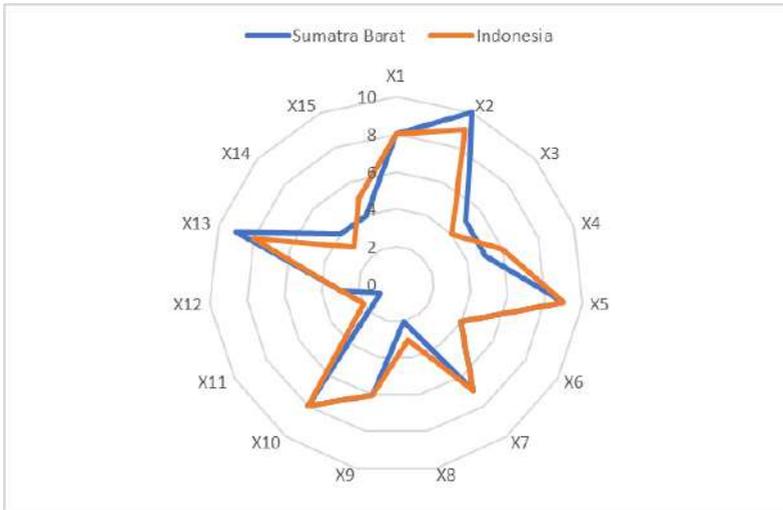
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sumatra Barat tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sumatra Barat dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sumatra Barat dan Nasional pada tahun 2022



3.4 Provinsi Riau

Jumlah pemuda di Provinsi Riau pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 1,8 juta jiwa yang terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 931,9 ribu jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 886,56 ribu jiwa. IPP Provinsi Riau tahun 2022 mengalami penurunan signifikan dibandingkan capaian IPP pada tahun 2021 lalu. Pada 2021, IPP Provinsi Riau senilai 56,17 dan pada tahun 2022 hanya menyentuh angka 52,17. Angka ini lebih rendah dibandingkan IPP Nasional.

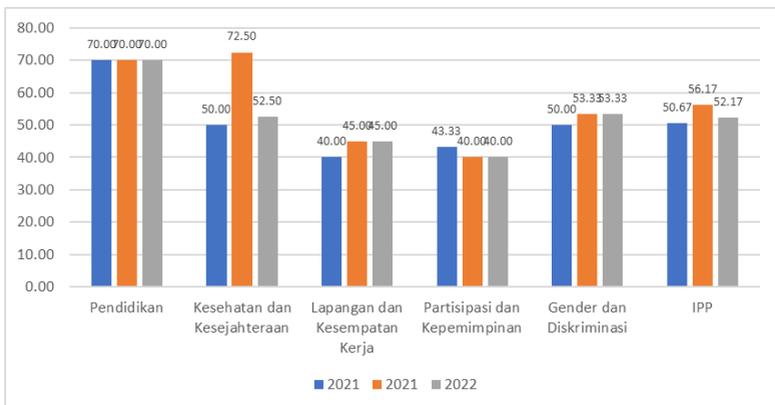
Hasil ini terjadi karena terjadi penurunan yang dalam sejumlah indikator pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan. Demikian halnya pada domain lainnya, angka yang didapatkan sama dengan angka tahun 2021. Kondisi ini terjadi pada domain Pendidikan, domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, domain Partisipasi dan Kepemimpinan, serta domain Gender dan Diskriminasi.

Pada 2021 domain Kesehatan dan Kesejahteraan memiliki nilai 72,50, adapun pada 2022 hanya 52,50. Indikator Angka Kesakitan Pemuda dan Persentase Pemuda yang merokok memang memiliki nilai yang lebih baik dibanding capaian Nasional. Rendahnya nilai pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan disumbang oleh Persentase Pemuda Korban Kejahatan yaitu 0,55% berbanding 0,46% Nasional dan juga persentase remaja perempuan yang sedang hamil yaitu 45,72% berbanding 14,72% Nasional.

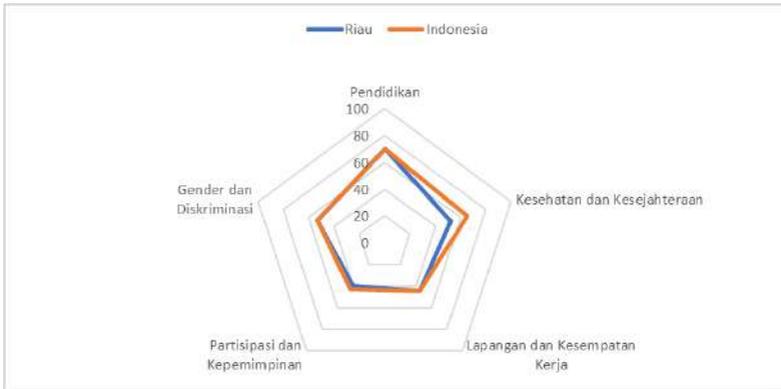
Dari hal tersebut di atas, Provinsi Riau mesti membenahi kekurangan yang ada di domain Kesehatan dan Kesehatan terutama masih tingginya persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan juga masih berada di bawah capaian Nasional, walaupun nilainya tidak sedalam pada Domain Kesehatan dan Kesejahteraan.

Gambar 15. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Riau pada Tahun 2022

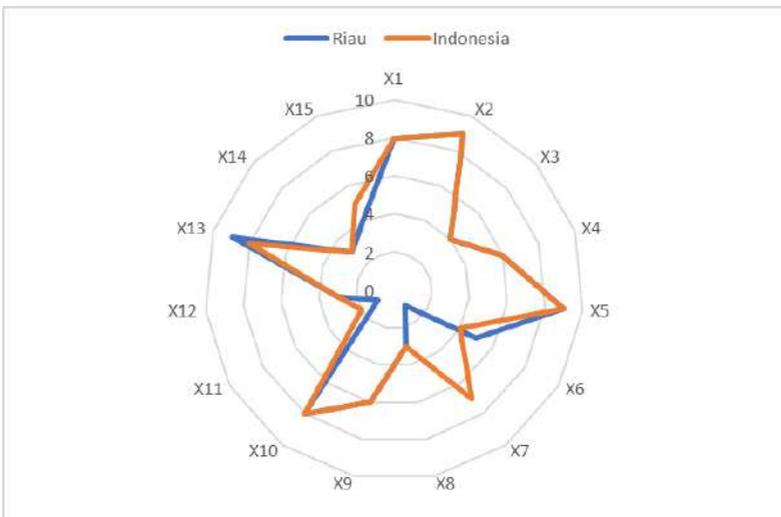
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Riau tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Riau dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Riau dan Nasional pada tahun 2022



3.5 Provinsi Jambi

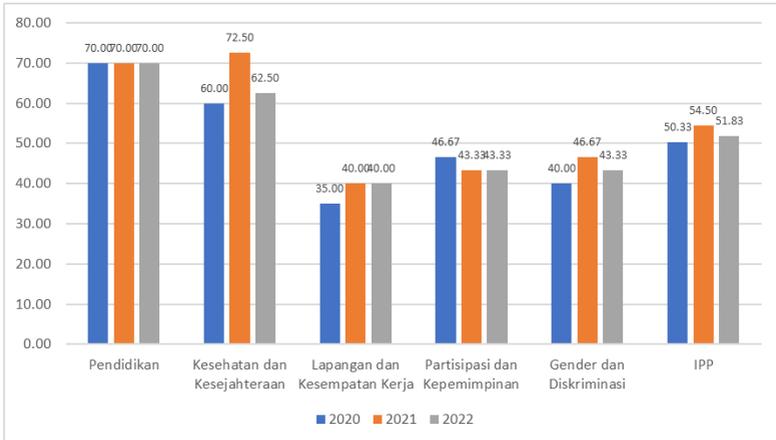
Jumlah pemuda di Provinsi Jambi pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 899 ribu jiwa. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 462,2 ribu jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 437,54 ribu jiwa. IPP Provinsi Jambi tahun 2022 (51,83) mengalami penurunan dibandingkan IPP tahun 2021 (54,50). Dengan nilai ini, IPP Provinsi Jambi berada di bawah IPP Nasional.

Pada domain Pendidikan, capaian yang didapatkan sama dengan capaian Nasional (70,00). Adapun pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan capaian tahun 2021 (72,50 menjadi 62,50). Penurunan dibandingkan tahun 2021 juga terjadi pada domain Gender dan Diskriminasi (dari 46,67 menjadi 43,33). Adapun pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja serta Partisipasi dan Kepemimpinan hasil yang dicapai sama dengan hasil pada tahun 2021.

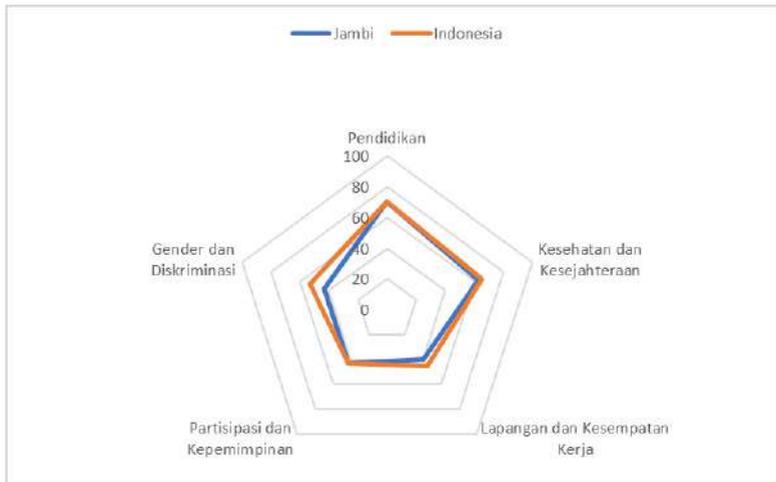
Domain yang harus mendapatkan perhatian lebih ada pada domain Gender dan Diskriminasi. Pencapaian domain ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan nilainya cukup jauh dari nilai Nasional. Nilai Angka Perkawinan Usia Anak masih cukup tinggi yaitu 9,91. Adapun Persentase perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi masih di bawah nasional yaitu (39,45 berbanding 41,66) dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (20,01% berbanding 24,03%).

Gambar 16. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jambi pada Tahun 2022

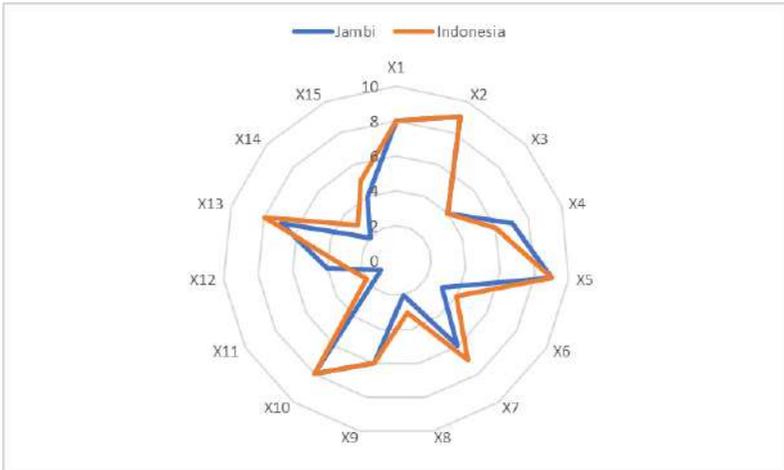
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Jambi tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Jambi dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Jambi dan Nasional pada tahun 2022



3.6 Provinsi Sumatra Selatan

Pemuda yang tinggal di Sumatra Selatan pada tahun 2022 berjumlah 2,1 juta yang terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 1,08 juta jiwa dan pemuda perempuan sejumlah 1,02 juta jiwa. Capaian IPP Sumatra Selatan tahun 2022 mengalami peningkatan dari IPP tahun 2021 (48,33). Dengan capaian 53,33 IPP Sumatra Selatan masih di bawah capaian IPP Nasional.

Domain Pendidikan, domain Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Domain Gender dan Diskriminasi masih berada di bawah capaian Nasional. Adapun pada domain lainnya, menyamai capaian IPP Nasional. Nilai yang terpaut cukup jauh ada pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan, serta domain Gender dan Diskriminasi.

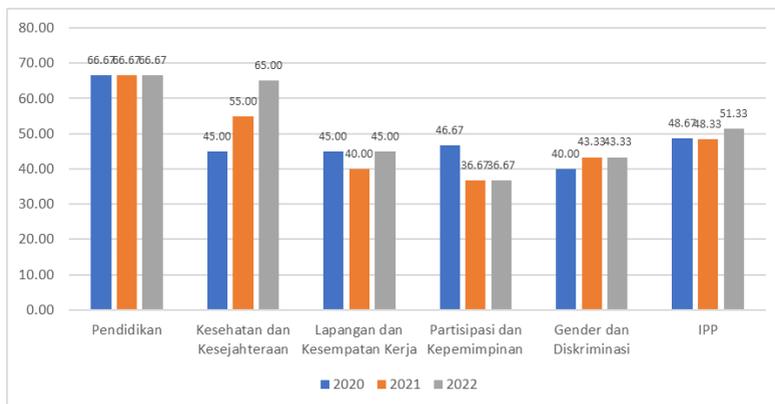
Angka pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta Lapangan dan Kesempatan Kerja tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan angka pada domain yang sama pada tahun 2022. Indikator seperti rata-rata lama sekolah (10,75), APK Sekolah Menengah (85,22) dan APK Perguruan Tinggi (26,31) menjadi indikator pada domain Pendidikan yang harus diperhatikan.

Hal yang harus menjadi perhatian ada pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan ada pada indikator persentase pemuda yang aktif dalam organisasi yang hanya 1,39 persen (capaian Nasional 4,84). Hal yang sama juga terjadi pada indikator persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat yang hanya 3,23 (capaian Nasional 5,40).

Pada domain Gender dan Diskriminasi, indikator angka perkawinan usia anak masih cukup tinggi (11,42). Adapun persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan tinggi (37,98) dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (19,32). Semua indikator pada domain Gender dan Diskriminasi capaiannya tidak lebih baik dari capaian Nasional.

Gambar 17. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2022

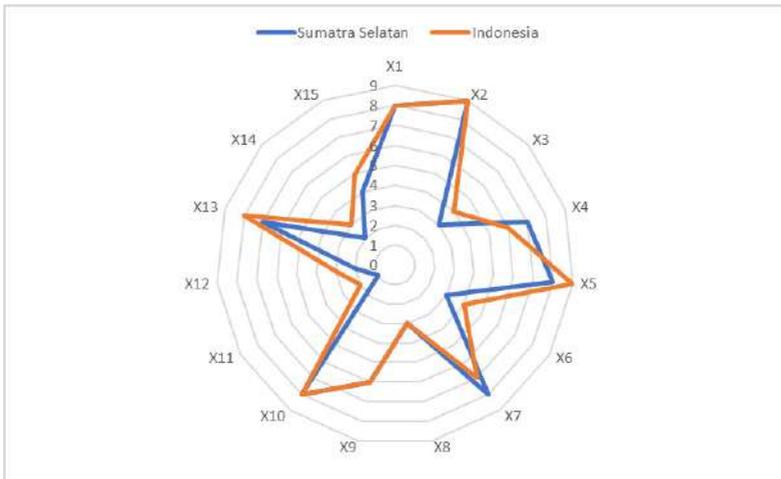
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional pada 2022



- (c) transformasi indikator IPP Provinsi Sumatra Selatan dan Nasional pada tahun 2022



3.7 Provinsi Bengkulu

Jumlah pemuda di Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 500,46 ribu jiwa. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 258,5 ribu jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 241,89 ribu jiwa. Dalam tiga tahun terakhir capaian IPP Provinsi Bengkulu terus mengalami kenaikan. Dari 50,83 di tahun 2020, menjadi 53,17 di tahun 2021, dan 54,83 di tahun 2022. Walaupun demikian, angka ini masih berada di bawah IPP Nasional.

Dari semua domain yang diperhitungkan, tidak satupun domain yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Domain Pendidikan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, serta Partisipasi dan Kepemimpinan mendapat hasil yang sama dengan capaian tahun 2021. Adapun Domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta Gender dan Diskriminasi mengalami

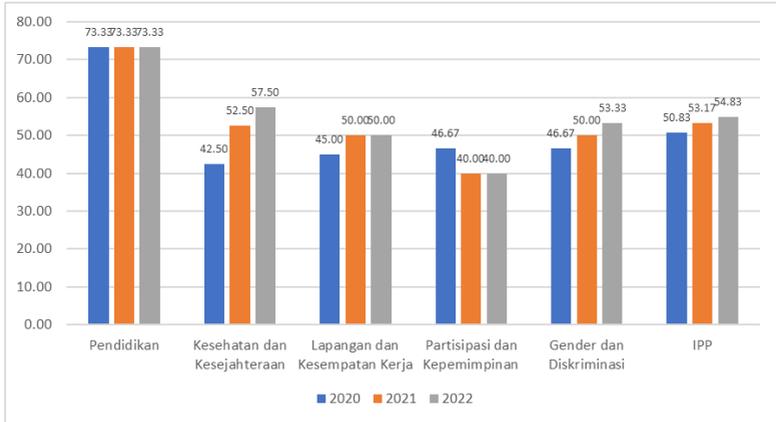
peningkatan. Domain pendidikan bahkan berada di atas capaian Nasional (73,33). Demikian halnya dengan domain Lapangan dan Kesempatan Kerja (50,00).

Domain yang perlu diperhatikan karena berada di bawah capaian Nasional ada pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta Domain Partisipasi dan Kepemimpinan. Pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan, indikator angka kesakitan pemuda (10,70), persentase pemuda korban kejahatan (0,87), dan persentase pemuda yang merokok (28,03) masih berada di atas Nasional.

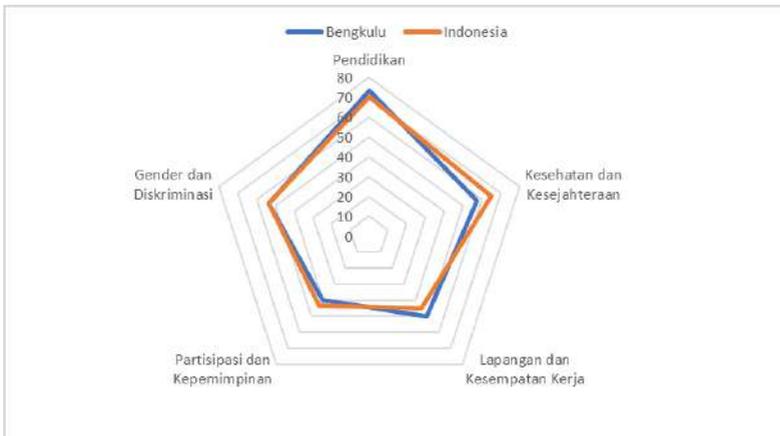
Adapun pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan, indikator seperti persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (64,80), persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (4,54), dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (5,20) mendapatkan angka di bawah angka Nasional.

Gambar 18. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu pada Tahun 2022

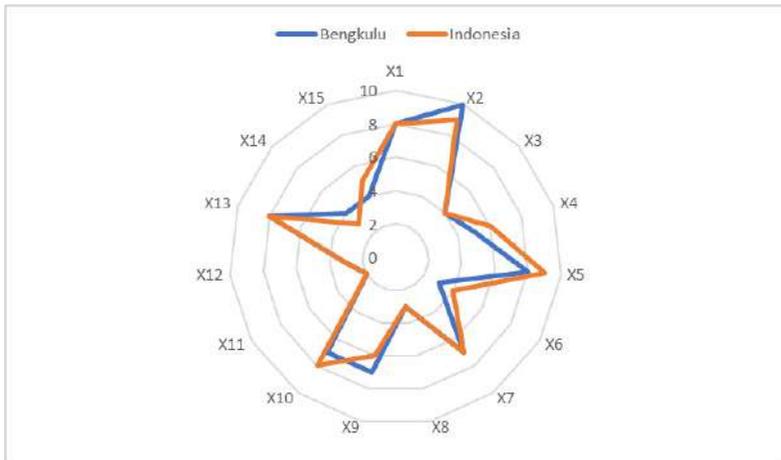
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Bengkulu tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Bengkulu dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Bengkulu dan Nasional pada tahun 2022



3.8 Provinsi Lampung

Jumlah pemuda di Provinsi Lampung pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 2 juta jiwa. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 1,02 juta dan pemuda perempuan sebanyak 972,4 ribu jiwa. IPP yang diperoleh Provinsi Lampung pada tahun 2022 naik dibandingkan capaian IPP tahun 2021 yang lalu. Walaupun demikian angka kenaikan yang dicapai masih di bawah capaian IPP Nasional.

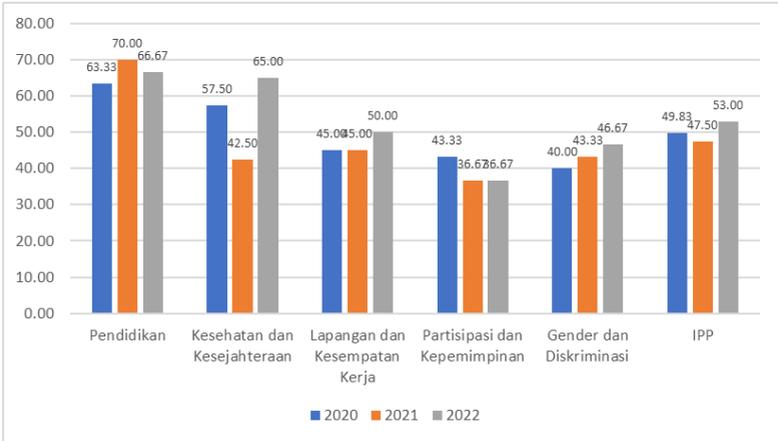
Peningkatan terjadi pada sejumlah domain yaitu Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja serta Domain Gender dan Diskriminasi. Adapun Domain Pendidikan mengalami penurunan yang cukup tajam. Sedangkan Domain Partisipasi dan Kepemimpinan mengalami stagnasi.

Domain Pendidikan mengalami penurunan karena semua indikator pada domain ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja selain mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun lalu, indikator ini mendapatkan angka yang melebihi angka Nasional.

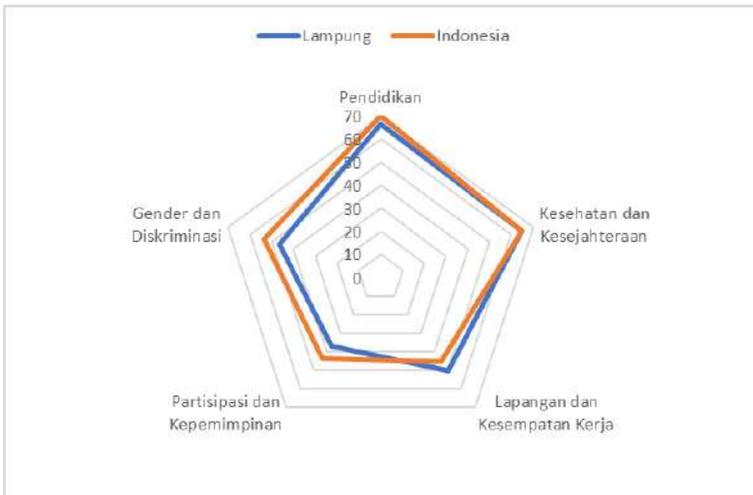
Terdapat dua domain yang perlu mendapatkan perhatian yaitu domain Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Domain Gender dan Diskriminasi yang pencapaiannya masih di bawah hasil Nasional. Indikator Domain Pendidikan yaitu persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (4,20) dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (3,75) mendapatkan nilai di bawah nilai Nasional. Adapun indikator Domain Gender dan Diskriminasi yang mendapatkan capaian di bawah Nasional yang perlu mendapat perhatian adalah Persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi (38,21) dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (19,30).

Gambar 19 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Lampung pada Tahun 2022

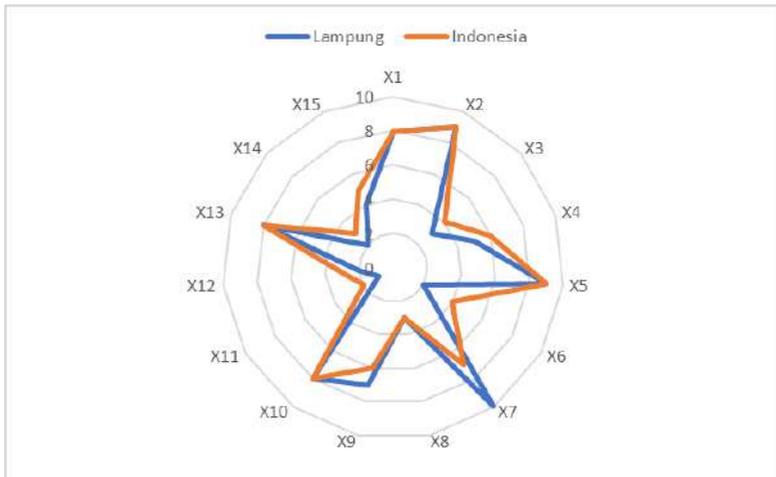
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Lampung tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Lampung dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Lampung dan Nasional pada tahun 2022



3.9 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 374 ribu jiwa. Jumlah ini terdiri dari 194,3 ribu jiwa pemuda laki-laki, serta pemuda perempuan sebanyak 179,67 ribu jiwa. IPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada IPP tahun 2021. Capaian IPP Tahun 2022, masih berada di bawah capaian IPP Nasional, sehingga membutuhkan beberapa perbaikan dalam pembangunan pemuda.

Kenaikan IPP 2022 didorong oleh naiknya semua capaian domain dalam IPP. Domain Pendidikan, Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, Domain Lapangan dan Kesempatan

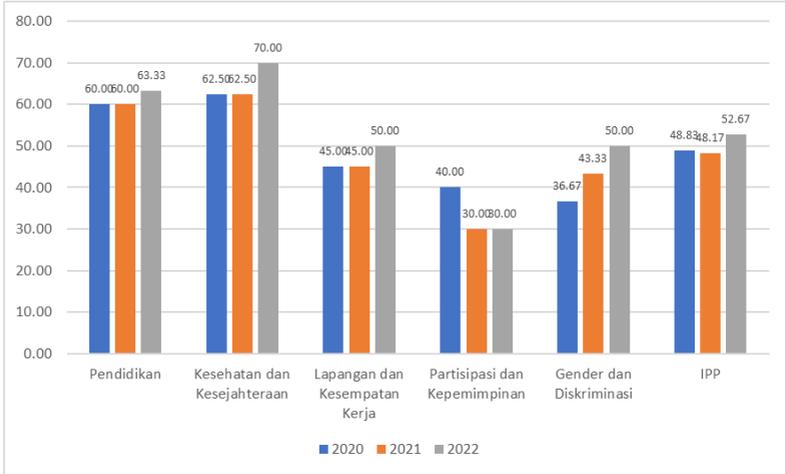
Kerja serta Domain Gender dan Diskriminasi mengalami kenaikan dibandingkan hasil 2021. Adapun domain Partisipasi dan Kepemimpinan mengalami stagnasi.

Domain Kesehatan dan Kesejahteraan mencatatkan hasil yang cukup baik karena melebihi capaian rata-rata Nasional. Demikian halnya dengan capaian pada Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja juga melebihi capaian Nasional.

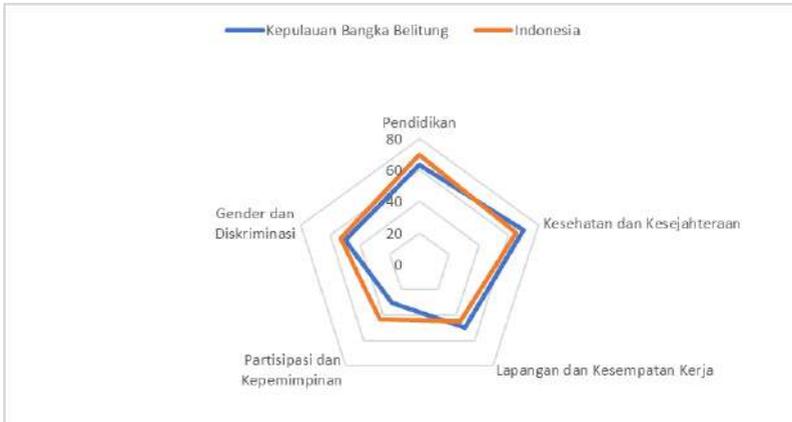
Domain yang perlu mendapat perhatian ada pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang capaiannya cukup berjarak dengan capaian Nasional. Indikator persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (58,89), persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (2,68) dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (3,63) masih berada di bawah rata-rata Nasional.

Gambar 20 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2022

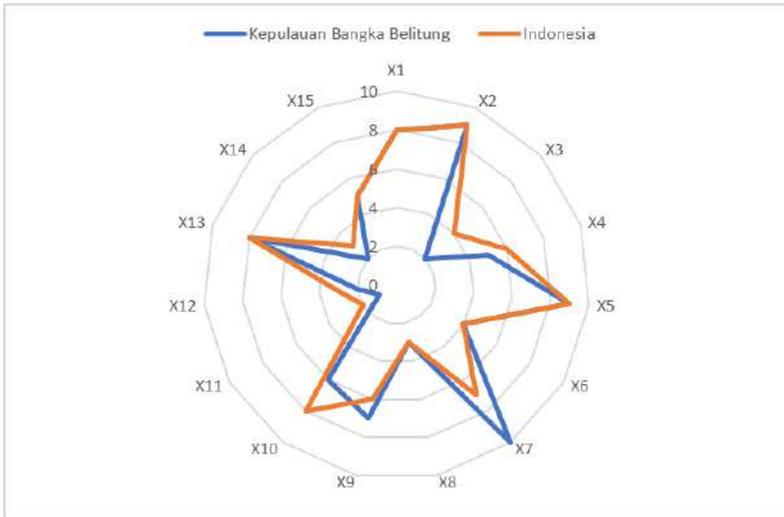
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional pada tahun 2022



3.10 Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah pemuda Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 560,65 ribu jiwa. Jumlah ini terdiri dari 285,12 ribu jiwa pemuda laki-laki dan 275,54 ribu jiwa pemuda perempuan. IPP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 memiliki angka yang sama pada capaian tahun 2021 yaitu 56,83. Angka ini berada di atas IPP Nasional. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan menjadi domain yang mendongkrak capaian IPP Provinsi Kepulauan Riau.

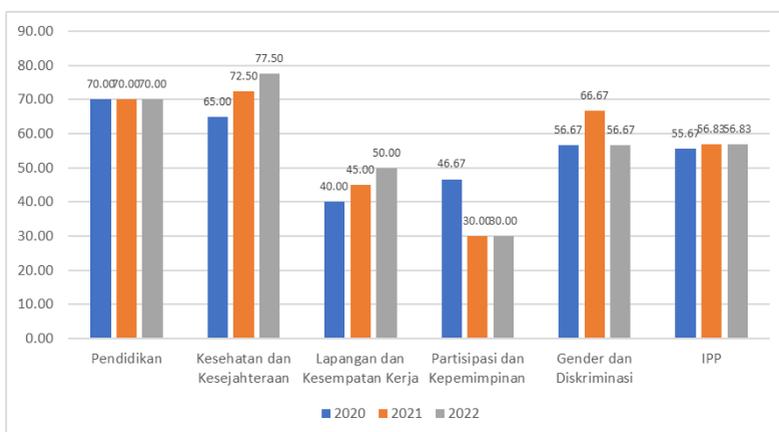
Pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan semua indikator lebih baik daripada capaian Nasional. Angka Kesakitan Pemuda hanya 7,00 berbanding capaian Nasional 9,51. Indikator yang lebih baik juga pada persentase pemuda korban kejahatan (0,73) dan indikator persentase remaja perempuan yang sedang hamil yaitu (0,00).

Domain Gender dan Diskriminasi juga melampaui angka Nasional. Dimana angka perkawinan usia anak (4,87) dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (33,53) lebih baik dibandingkan angka Nasional. Walaupun demikian indikator persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi masih berada di bawah capaian Nasional.

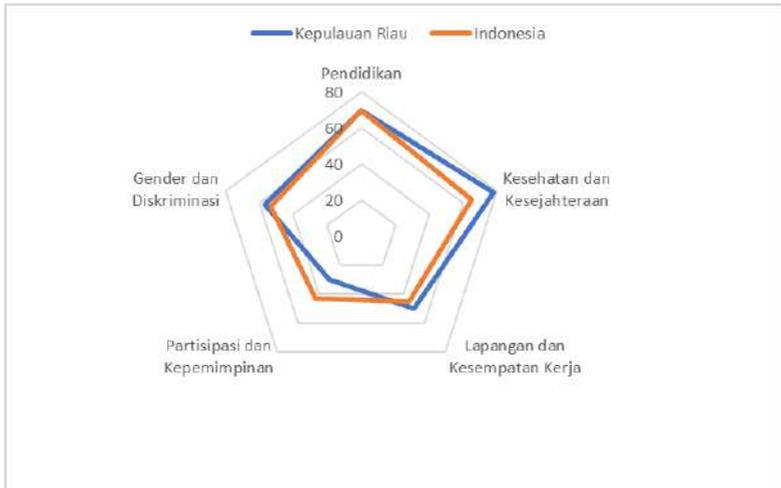
Hal yang perlu mendapatkan perhatian ada pada domain Partisipasi Kepemimpinan yang capaiannya cukup berjarak dengan capaian Nasional. Indikator yang perlu mendapat perbaikan antara lain Persentase Pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (50,40 berbanding 70,49) serta persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (2,46 berbanding 5,40).

Gambar 21 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022

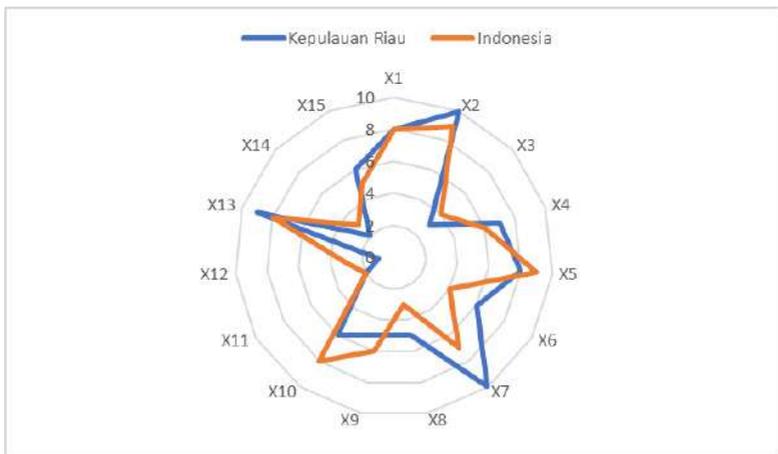
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional pada tahun 2022



3.11 Provinsi DKI Jakarta

Jumlah pemuda di DKI Jakarta pada tahun 2022 sebanyak 2,5 juta jiwa yang terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 1,28 juta jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 1,26 juta jiwa. IPP DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah 51,50. Angka ini masih cukup jauh dari capaian angka Nasional. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan menjadi dua domain yang berada cukup rendah dari capaian Nasional. Adapun domain Pendidikan serta Domain Gender dan Diskriminasi mendapatkan angka di atas capaian Nasional.

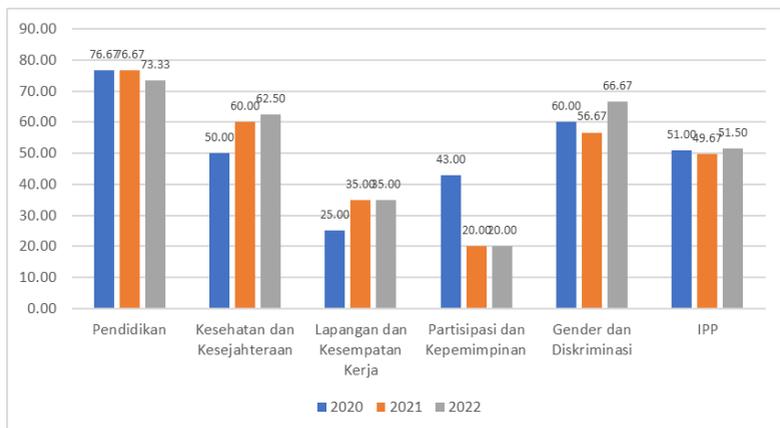
Indikator pada Domain Pendidikan lebih baik dibanding capaian Nasional. Indikator seperti Rata-rata lama sekolah(12,22), APK sekolah menengah (83,36) dan APK Perguruan Tinggi (39,56) menunjukkan angka lebih tinggi dibanding Angka Nasional. Kondisi yang sama juga terjadi pada sejumlah indikator pada domain Gender dan Diskriminasi. Angka perkawinan usia anak 2,07 masih lebih kecil dibandingkan angka Nasional (8,06). Persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi (41,78) juga lebih tinggi dibandingkan angka Nasional (41,66). Demikian halnya dengan Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (36,07) lebih baik dibandingkan capaian Nasional.

Pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan, semua indikator lebih baik dari capaian Nasional kecuali satu indikator yaitu persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Pada indikator ini nilai yang didapatkan yaitu 96,22. Persentase ini bisa dibilang sangat tinggi dan perlu mendapatkan perhatian.

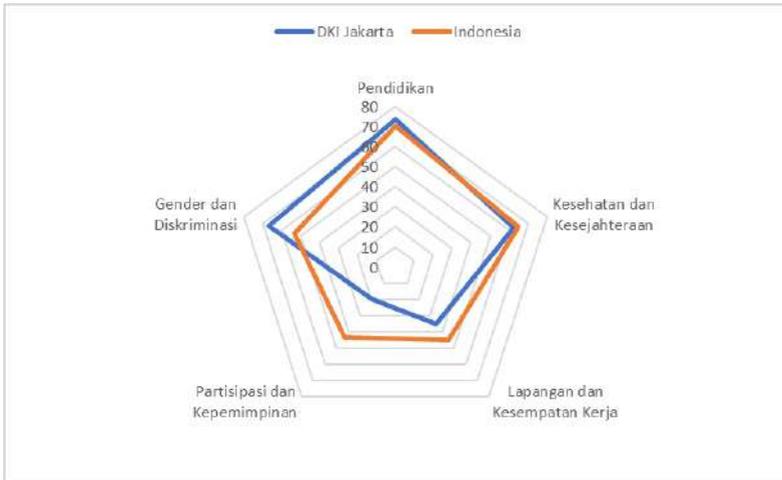
Domain yang harus mendapatkan perhatian ada pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang pencapaiannya berada di bawah capaian Nasional. Indikator persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial keagamaan (37,10), persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (3,74), serta persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (0,96) masih berada di bawah angka Nasional yang masing-masing mendapat angka 70,49; 4,84; dan 5,40.

Gambar 22. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022

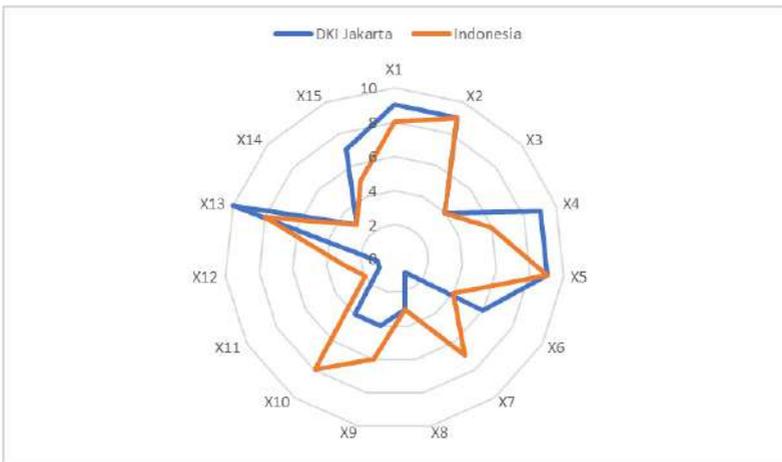
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi DKI Jakarta dan Nasional 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi DKI Jakarta dan Nasional pada tahun 2022



3.12 Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemuda terbanyak di Indonesia. Diperkirakan, pada tahun 2022 terdapat 12,43 juta jiwa pemuda tinggal di Jawa Barat. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 6,37 juta jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 6,05 juta jiwa. Jawa Barat mencatatkan capaian IPP tahun 2022 sebesar 49,67. Mengalami peningkatan dibandingkan IPP tahun 2021, tetapi masih cukup rendah dibandingkan IPP Nasional. IPP Jawa Barat dan IPP Provinsi Kalimantan Utara menjadi IPP tahun 2022 terendah di antara Provinsi lainnya.

Sejumlah indikator mengalami stagnasi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Hasil ini tercermin pada domain Pendidikan (66,67), Lapangan dan Kesempatan Kerja (30,00), serta Partisipasi dan Kepemimpinan (36,67). Kenaikan terjadi pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan, serta domain Gender dan Diskriminasi. Tidak ada domain yang mengalami penurunan.

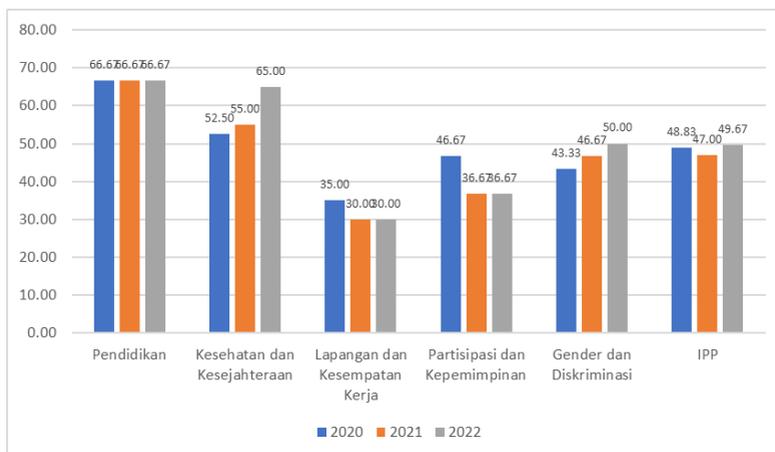
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan mendapat kenaikan tertinggi yang didorong oleh sejumlah indikator. Jawa Barat berhasil memperbaiki indikator angka kesakitan pemuda (dari 11,71 menjadi 10,64). Perbaikan juga terjadi pada persentase pemuda korban kejahatan (dari 1,02 menjadi 0,47); persentase pemuda yang merokok (dari 28,61 menjadi 27,63) dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil (dari 16,71 menjadi 6,37).

Pada domain Gender dan Diskriminasi juga terjadi perbaikan pada indikator angka perkawinan usia anak (dari 10,09 menjadi 8,65); dan indikator pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi naik dari 36,97 menjadi 37,42.

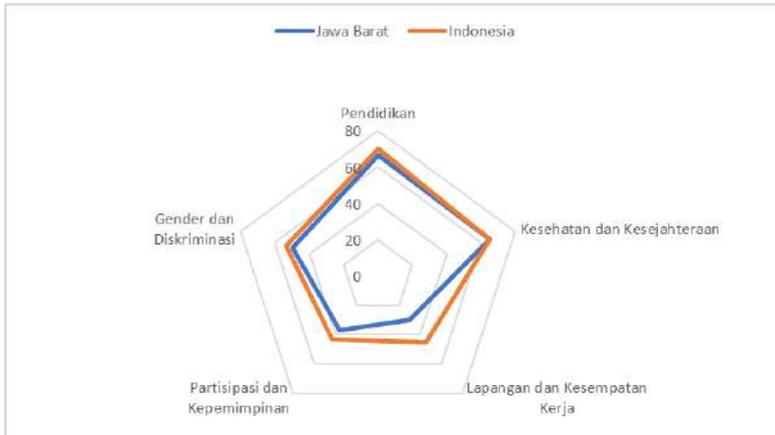
Domain yang harus mendapat perhatian ada pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan. Pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja TPT Pemuda masih cukup tinggi yaitu 20,16 berbanding 13,93 dari capaian Nasional. Adapun pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan, indikator persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi perlu lebih ditingkatkan.

Gambar 23. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022

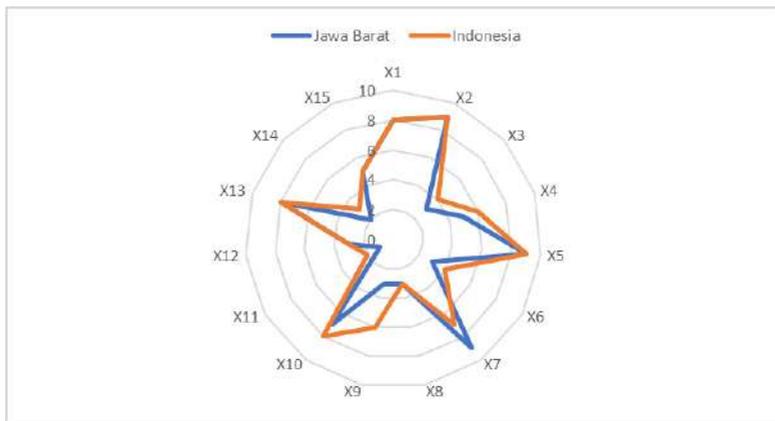
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Jawa Barat tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2022



3.13 Provinsi Jawa Tengah

Jumlah pemuda di Jawa Tengah pada tahun 2022 sebanyak 7,97 juta jiwa yang terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 4 juta jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 3,9 juta jiwa. IPP Jawa Tengah tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan capaian IPP tahun 2021 lalu. Dibandingkan dengan capaian Nasional, IPP Jawa Tengah 2022 masih lebih rendah.

Secara umum tidak ada penurunan pada sejumlah domain jika dibandingkan tahun 2021. Domain pendidikan memiliki nilai yang sama dengan capaian tahun 2021, demikian halnya pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan. Peningkatan terjadi pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan, serta domain Gender dan Diskriminasi.

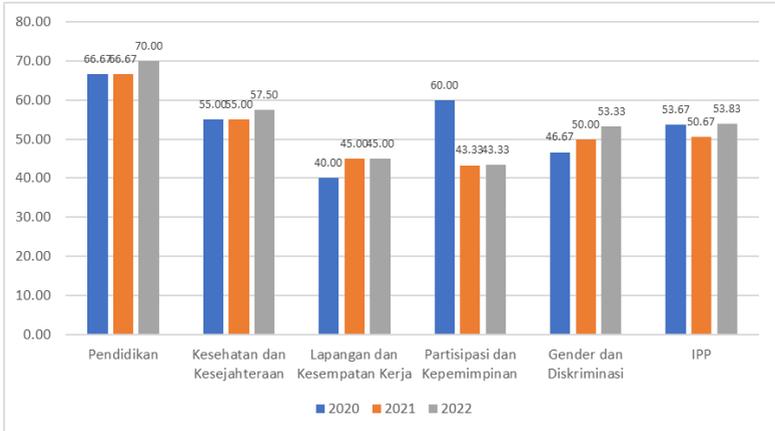
Domain Gender dan Diskriminasi menunjukkan konsistensi peningkatan sejak tahun 2020 dengan capaian 46,67 lalu naik menjadi 50,00 pada tahun 2021 dan naik kembali pada tahun 2022 dengan nilai 53,83.

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan pada tahun 2020 sempat mendapatkan nilai yang tinggi yaitu 60,00 lalu kemudian turun menjadi 43,33 pada tahun 2021 dan 2022. Indikator pada domain ini perlu kembali diperhatikan agar setidaknya bisa menyamai capaian pada tahun 2020 yang lalu.

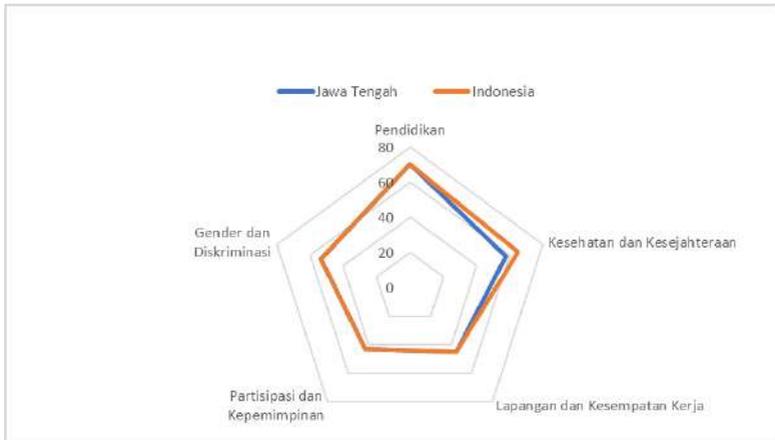
Domain yang harus menjadi perhatian adalah domain Kesehatan dan Kesejahteraan. Domain ini menjadi satu-satunya yang lebih rendah dibandingkan capaian Nasional. Hal ini ditunjukkan oleh indikator angka kesakitan pemuda (10,68), persentase pemuda yang merokok (26,52) dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil (20,84).

Gambar 24. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022

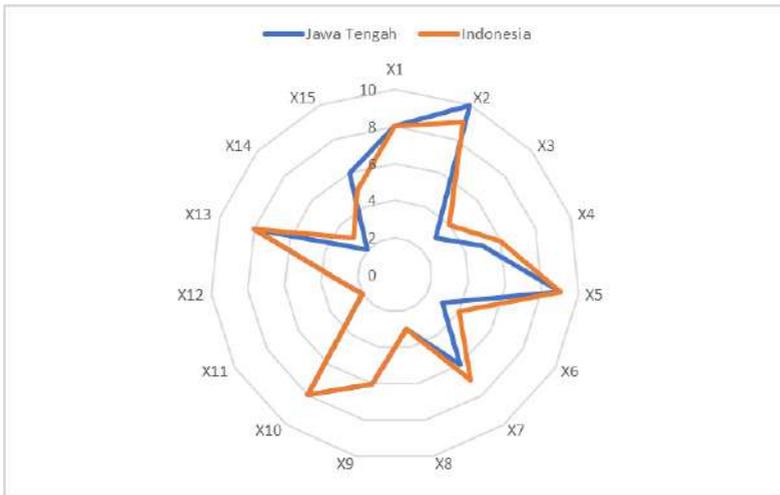
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, 2021 dan 2022



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2022



3.14 Provinsi DI Yogyakarta

Jumlah pemuda di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2022 sebanyak 876 ribu jiwa. Jumlah ini terdiri dari 441 ribu pemuda laki-laki, dan 435.000 pemuda perempuan. IPP Provinsi DI Yogyakarta mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir di mana pada tahun 2020 capaian IPP sebesar 71,00, lalu turun pada tahun 2021 menjadi 69,67 dan kembali turun menjadi 67,50 pada tahun 2022. IPP DI Yogyakarta masih berada di atas capaian IPP Nasional, bahkan angka IPP DI Yogyakarta menjadi yang tertinggi di antara capaian Provinsi lainnya.

Terjadinya penurunan IPP DI Yogyakarta disebabkan oleh merosotnya capaian pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan.

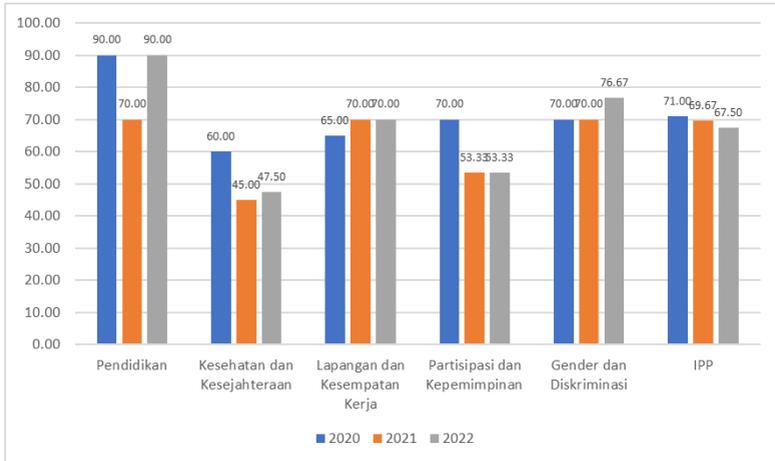
Adapun domain Pendidikan sebesar 90,00 merupakan capaian di atas angka Nasional. Sementara itu pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja senilai 70,00 juga berada di atas capaian Nasional. Hasil capaian yang baik juga ditunjukkan pada domain Gender dan Diskriminasi yang berhasil mencapai 76,67.

Domain Pendidikan Provinsi Yogyakarta menjadi domain Pendidikan tertinggi di Indonesia yaitu 90,00. Hal ini ditunjang dengan angka indikator rata-rata lama sekolah (12,59), indikator APK Sekolah Menengah (91,80) dan APK Perguruan Tinggi (75,59).

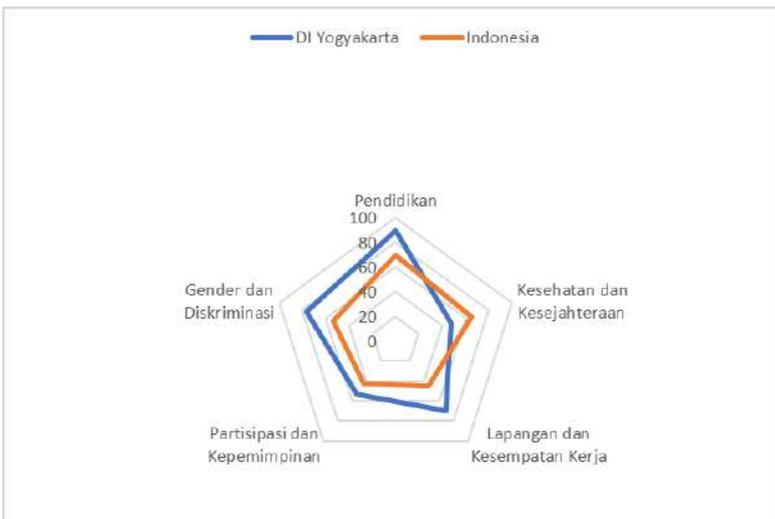
Salah satu yang harus menjadi perhatian ada pada Domain Kesehatan dan Kesejahteraan. Indikator seperti Angka Kesakitan Pemuda (12,04) masih cukup tinggi dibandingkan Nasional (9,51). Demikian halnya persentase pemuda korban kejahatan (0,71) dan juga indikator persentase remaja perempuan yang sedang hamil (31,68) hasilnya tidak lebih baik dari capaian Nasional. Jika domain Kesehatan dan Kesejahteraan bisa diperbaiki, maka semua indikator akan berada di atas capaian Nasional.

Gambar 25. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi DI Yogyakarta pada Tahun 2022

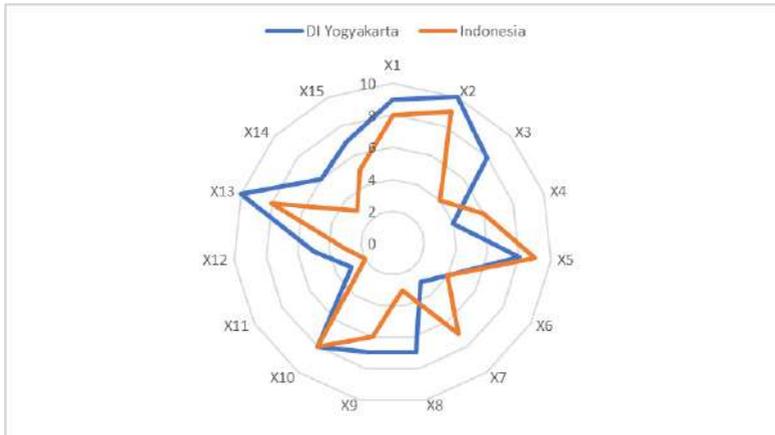
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi DI Yogyakarta tahun 2020, 2021 dan 2022



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi DI Yogyakarta dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Yogyakarta dan Nasional pada tahun 2022



3.15 Provinsi Jawa Timur

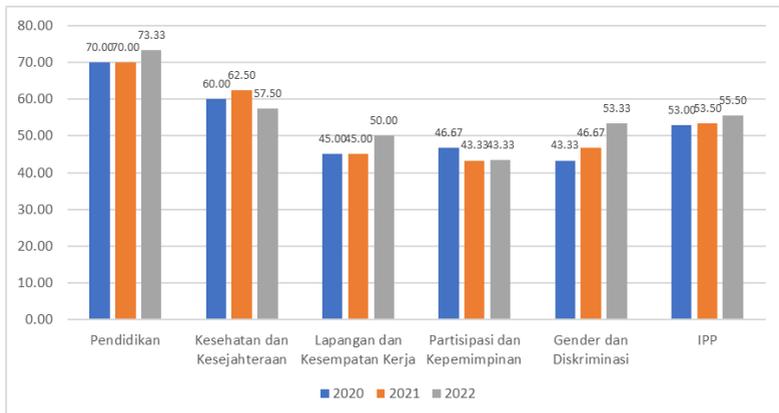
Jumlah pemuda di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 sebanyak 8,95 juta jiwa. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 4,55 juta jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 4,4 juta jiwa. Dengan jumlah pemuda sebanyak ini, Jawa Timur menjadi Provinsi dengan jumlah pemuda terbesar kedua setelah Jawa Barat. IPP Jawa Timur tahun 2022 mengalami peningkatan dari capaian IPP Tahun 2021 yaitu dari 53,50 menjadi 55,50. Angka IPP ini berada di atas angka Nasional.

Terjadi kenaikan pada tiga domain perhitungan IPP yaitu pada domain Pendidikan dari 70,00 menjadi 73,33. Kenaikan juga terjadi pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja dari 45,00 menjadi 50,00 dan pada domain Gender dan Diskriminasi dari 46,67 menjadi 53,33. Adapun penurunan terjadi pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan yaitu dari 62,50 menjadi 57,50. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan mengalami stagnasi dengan nilai 43,33.

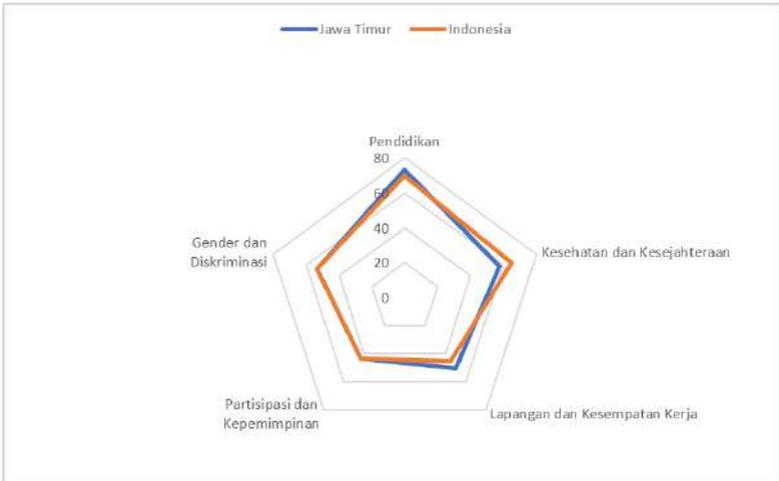
Berdasarkan perbandingan dengan capaian indeks domain Nasional, domain Pendidikan serta domain Lapangan dan Kesempatan Kerja mendapatkan hasil yang lebih baik. Domain yang harus mendapat perhatian ada pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan. Indikator angka kesakitan pemuda masih lebih tinggi yaitu 10,05 berbanding 9,51. Persentase pemuda yang merokok juga lebih tinggi yaitu 25,61 berbanding 24,36, serta persentase remaja perempuan yang sedang hamil 20,25 berbanding 14,72.

Gambar 26. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022

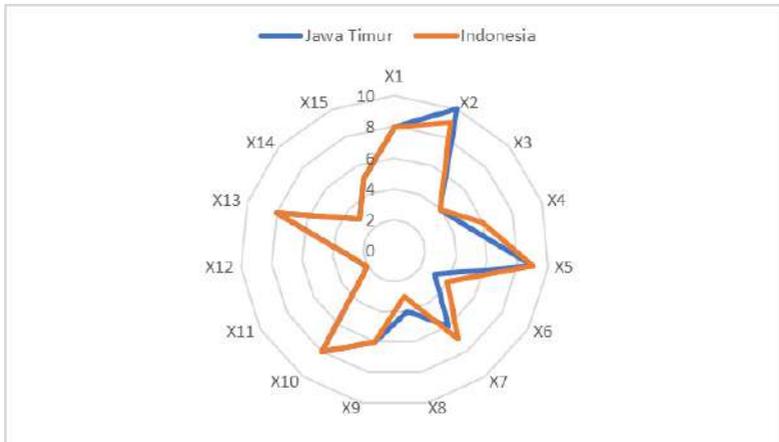
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Jawa Timur tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada 2022



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2022



3.16 Provinsi Banten

Jumlah pemuda di Provinsi Banten pada tahun 2022 sebanyak 3,3 juta jiwa. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 1,7 juta jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 1,6 juta jiwa. IPP Provinsi Banten tahun 2022 naik dibandingkan IPP tahun 2021 yaitu dari 47,83 menjadi 52,17. Capaian IPP ini masih lebih rendah dibandingkan IPP Nasional. Hal ini juga tercermin dari indeks domain di mana hanya Domain Pendidikan yang memiliki capaian sama dengan capaian Nasional.

Domain Kesehatan dan Kesejahteraan mendapatkan peningkatan capaian yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, capaian Kesehatan dan Kesejahteraan mendapat nilai 57,50 yang kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 72,50. Peningkatan ini disebabkan dengan keberhasilan menekan angka kesakitan pemuda hingga mencapai 6,96 setelah sebelumnya 10,06. Persentase pemuda korban kejahatan juga berhasil ditekan menjadi 0,44. Paling signifikan yaitu capaian Persentase remaja perempuan yang sedang hamil 0,00 setelah sebelumnya 21,53.

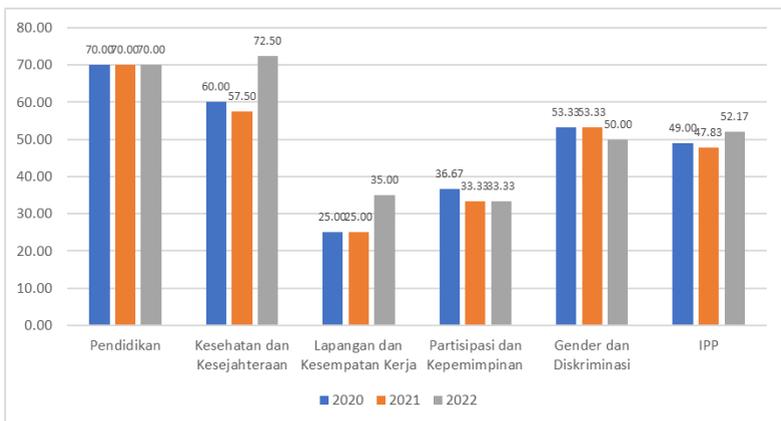
Hal yang harus menjadi perhatian ada pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja. Walau mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2021, tetapi angka yang didapatkan masih di bawah capaian Nasional. Angka TPT Pemuda Provinsi Banten masih cukup tinggi yaitu 19,06. Demikian halnya pemuda wirausaha kerah putih jumlahnya masih di bawah capaian Nasional yaitu 0,46.

Demikian halnya dengan Domain Partisipasi dan Kepemimpinan juga perlu mendapatkan perhatian. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (67,63),

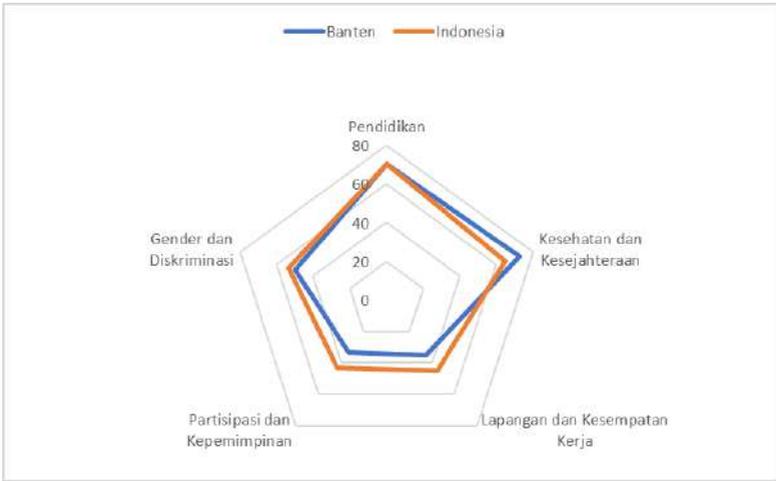
persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (0,91) dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (3,84) masih perlu mendapatkan perbaikan.

Gambar 27. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Banten pada Tahun 2022

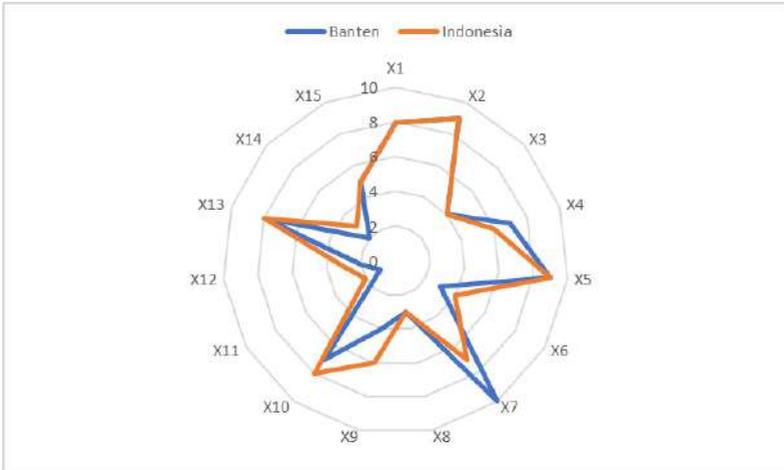
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Banten tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Banten dan Nasional pada 2022



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2022



3.17 Provinsi Bali

Jumlah pemuda di Provinsi Bali pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 1,02 juta jiwa. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki-laki

sebanyak 529 ribu jiwa dan 493,25 ribu pemuda perempuan. Bali menjadi provinsi dengan capaian IPP tertinggi kedua setelah Yogyakarta. Bali sekaligus juga menjadi satu-satunya provinsi yang capaian setiap domain melampaui atau sama dengan capaian Nasional.

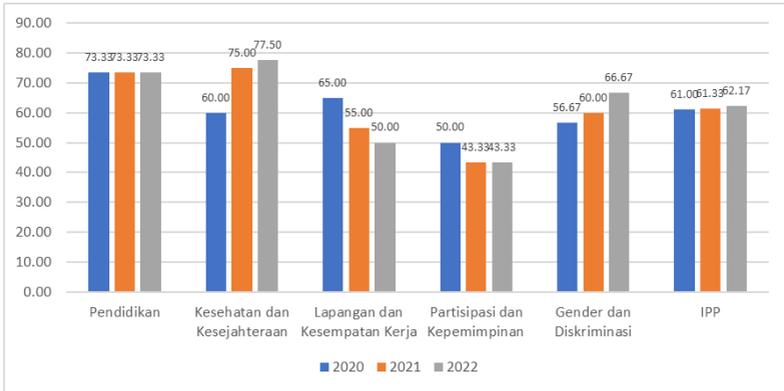
Dari setiap domain yang diperhitungkan, hanya domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang mendapatkan hasil sama dengan capaian Nasional. Selain dari domain tersebut, semua domain lainnya lebih tinggi dibandingkan capaian Nasional. Jika dibandingkan tahun 2021, capaian domain Lapangan dan Kesempatan Kerja mengalami penurunan dari sebelumnya 55,00 menjadi 50,00. Adapun domain Pendidikan, serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan mengalami stagnasi.

Turunnya angka pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja dipengaruhi oleh terjadinya penurunan pada indikator pemuda wirausaha kerah putih dari 0,73 pada 2021 menjadi 0,37 pada tahun 2022. Bali berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka pemuda dari 9,47 pada tahun 2021 menjadi 7,45 pada tahun 2022.

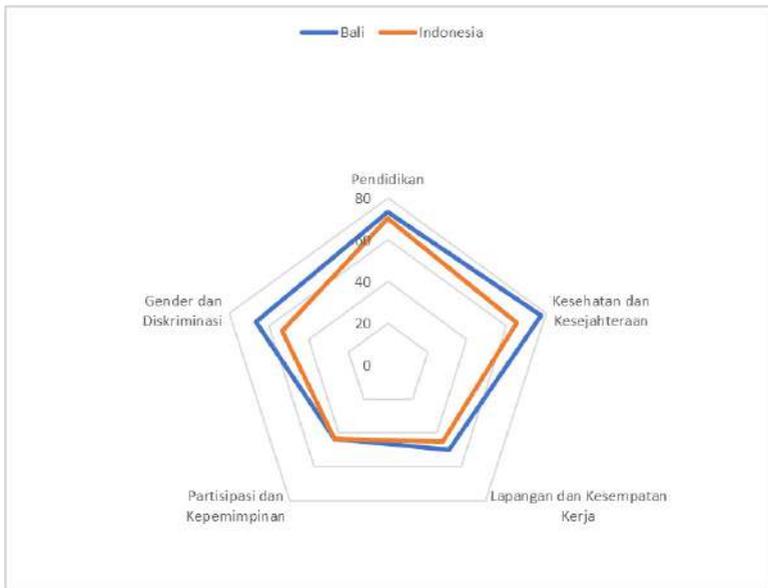
Untuk semakin meningkatkan capaian IPP Provinsi Bali di masa yang akan datang, beberapa domain yang perlu mendapat perhatian adalah domain Partisipasi dan Kepemimpinan. Indikator persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (69,98) berada sedikit di bawah Nasional yang mencapai nilai 70,49. Demikian halnya perlu perhatian adalah indikator persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (4,12) juga masih berada di bawah Nasional (5,40).

Gambar 28 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Bali pada Tahun 2022

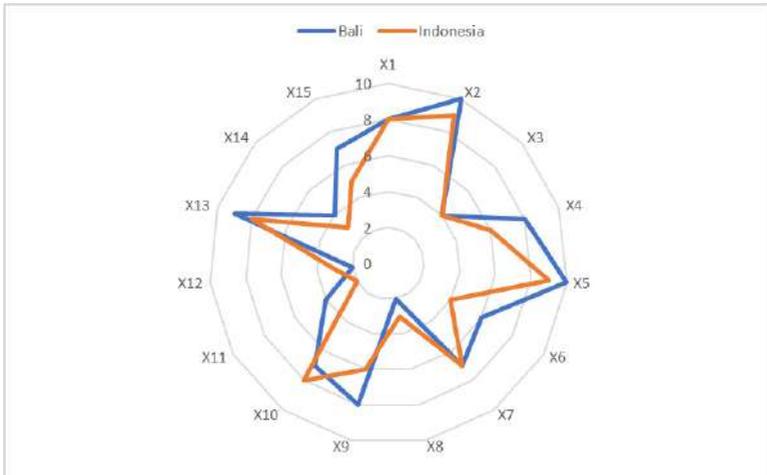
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Bali tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Bali dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Bali dan Nasional pada tahun 2022



3.18 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jumlah pemuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 sebanyak 1,27 juta jiwa yang terdiri dari 648,85 ribu pemuda laki-laki dan 622 ribu pemuda perempuan. Setelah mengalami penurunan IPP pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, capaian angka IPP Provinsi Nusa Tenggara Barat melampaui capaian IPP tahun 2020 dan 2021. Walaupun demikian angka IPP ini tidak melebihi IPP Nasional.

Domain Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Domain ini berada di atas rata-rata domain Pendidikan Nasional yaitu sebesar 73,3. Tidak ada domain yang mengalami penurunan dari semua domain penilaian pada IPP tahun 2022, Nusa Tenggara Barat.

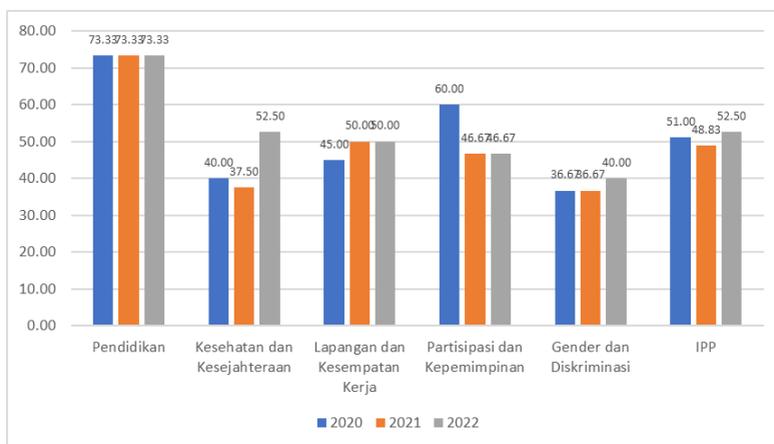
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan bahkan meningkat cukup tinggi dari 37,50 naik menjadi 52,50. Perbaikan capaian ini

masih cukup jauh dari capaian Nasional. Kenaikan ini disebabkan oleh satu indikator yang mengalami perbaikan signifikan yaitu persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Pada tahun 2021, indikator ini mendapat nilai 23,41 dan pada tahun 2022 menjadi 6,68. Adapun pada indikator yang lain seperti angka kesakitan pemuda (17,56), persentase pemuda korban kejahatan (0,90) dan persentase pemuda yang merokok (30,08) masih perlu mendapat perhatian.

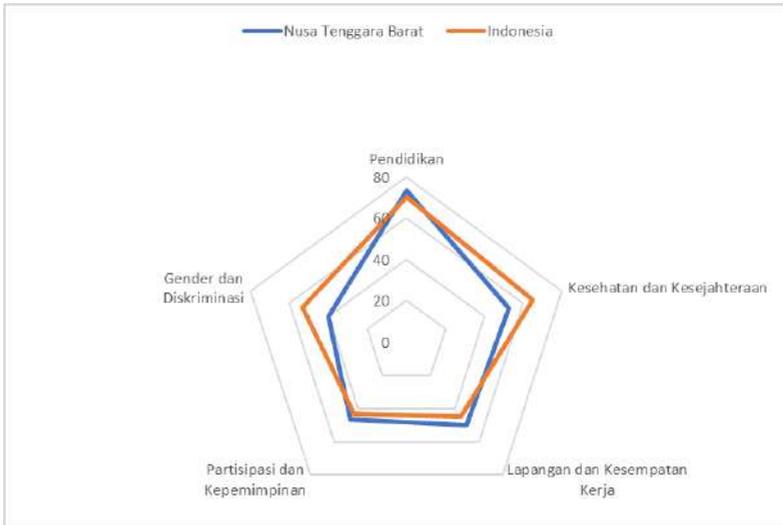
Domain Gender dan Diskriminasi juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Angka perkawinan usia anak masih cukup tinggi (16,23). Indikator persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi (40,87), serta persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (15,75) capaiannya masih di bawah capaian Nasional.

Gambar 29 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2022

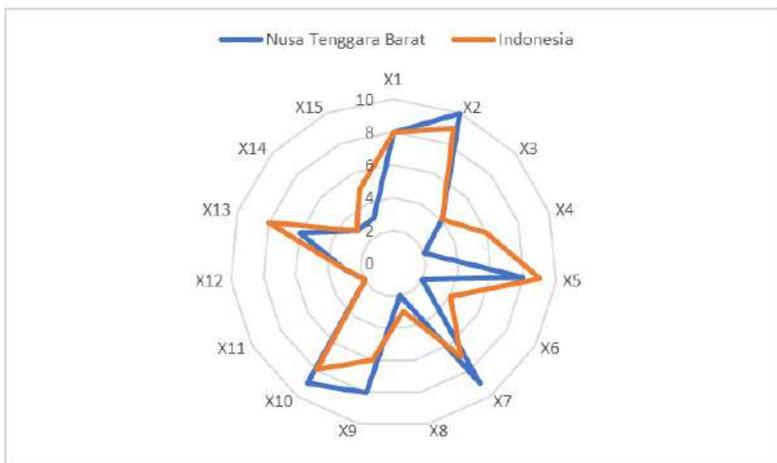
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional pada tahun 2022



3.19 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah pemuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 mencapai 1,44 juta jiwa. Pemuda laki-laki berjumlah sebanyak 732,74 ribu jiwa dan pemuda perempuan berjumlah 712,17 juta jiwa. Nusa Tenggara Timur mencatatkan peningkatan capaian IPP tahun 2022 dibanding IPP tahun 2020 dan 2021. Kenaikan nilai IPP Nusa Tenggara Timur belum melampaui IPP Nasional.

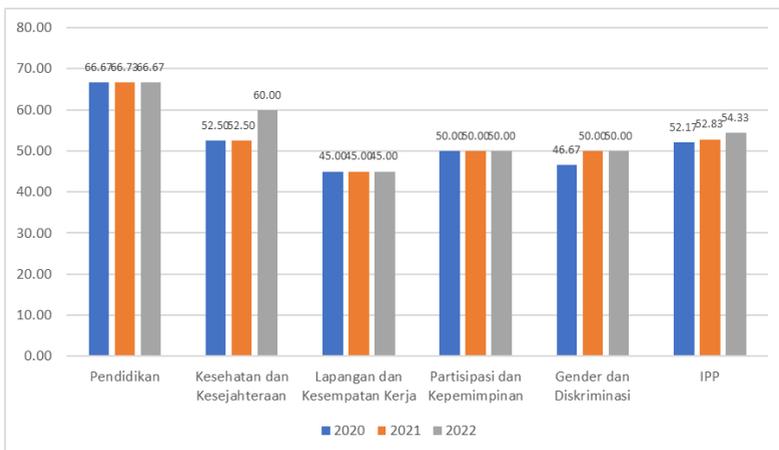
Semua domain yang diperhitungkan dalam IPP mengalami stagnasi, kecuali pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan yang mengalami peningkatan walau belum melampaui angka Nasional. Domain pendidikan, serta domain Lapangan dan Kesempatan Kerja tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020.

Peningkatan domain Kesehatan dan Kesejahteraan karena indikator persentase remaja perempuan yang sedang hamil mengalami perbaikan dari 31,97 pada tahun 2021 menjadi 18,35. Perbaikan juga terjadi pada Persentase pemuda korban kejahatan dari 0,75 menjadi 0,55. Indikator lain pada domain ini justru mendapat hasil di bawah capaian tahun 2021. Misalnya angka kesakitan pemuda dari 8,67 menjadi 10,89. Juga persentase pemuda merokok justru semakin meningkat dari 24,88 menjadi 24,93.

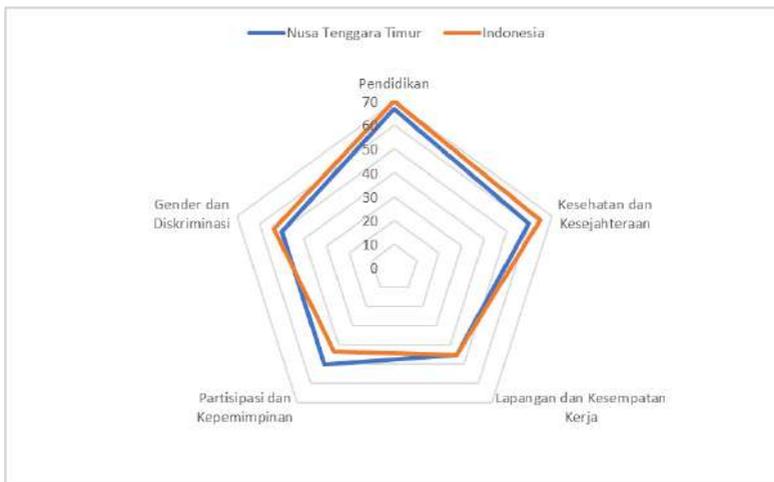
Terdapat terdapat satu domain yang hasilnya lebih baik dari capaian Nasional yaitu domain Partisipasi dan Kepemimpinan. Terdapat tiga domain yang perlu mendapat perhatian yaitu domain Pendidikan, domain Kesehatan dan Kesejahteraan, serta domain Gender dan Diskriminasi. Perhatian ini utamanya pada indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal yang hanya mendapat angka 15,97. Masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Nasional 24,03.

Gambar 30 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2022

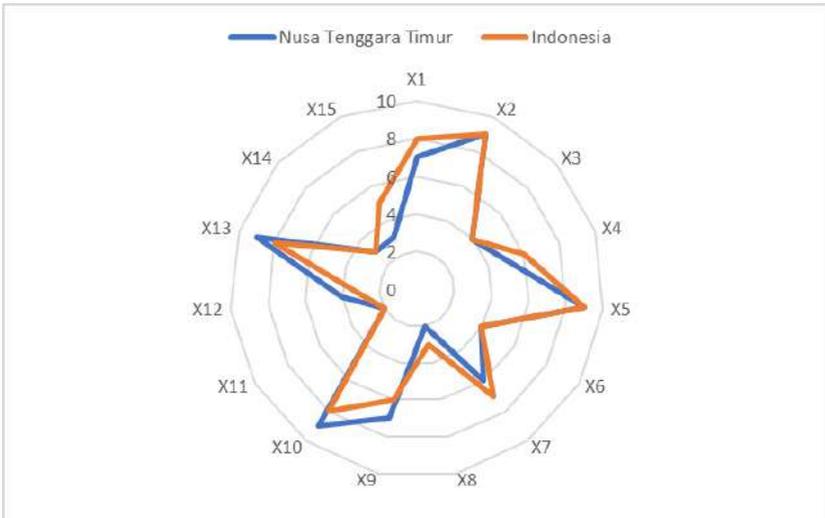
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020, 2021 dan 2022



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional pada tahun 2022



3.20 Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2022 sebanyak 1,32 juta jiwa. Pemuda laki-laki sebanyak 683,65 ribu jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 641,25 ribu jiwa. IPP Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami perbaikan dari 47,83 pada tahun 2020, lalu 49,50 pada tahun 2021 dan 50,33 pada tahun 2022. Capaian IPP ini belum bisa melampaui angka IPP Nasional.

Domain Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat masih di bawah capaian Nasional. Domain ini perlu mendapat perhatian karena selama tiga tahun berturut mengalami stagnasi dengan nilai 63,33. Adapun pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan, setelah sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021, kembali merosot pada tahun 2022 dengan nilai 65,00. Kinerja yang capaiannya sama

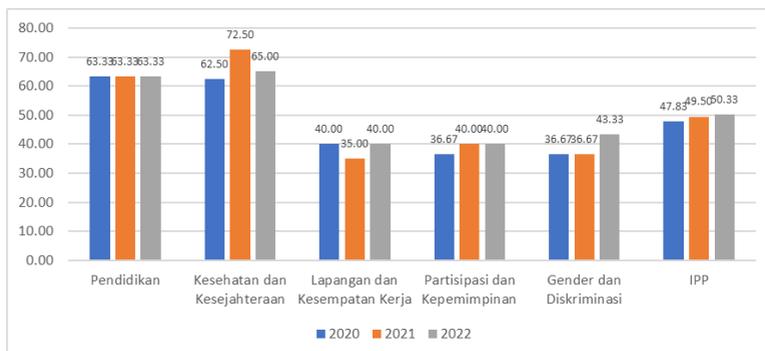
dengan capaian Nasional hanya terdapat pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan. Domain lainnya berada di bawah angka Nasional.

Dibandingkan dengan angka yang didapatkan pada tahun 2021, domain Lapangan dan Kesempatan Kerja serta Domain Gender dan Diskriminasi mengalami peningkatan pada tahun 2022.

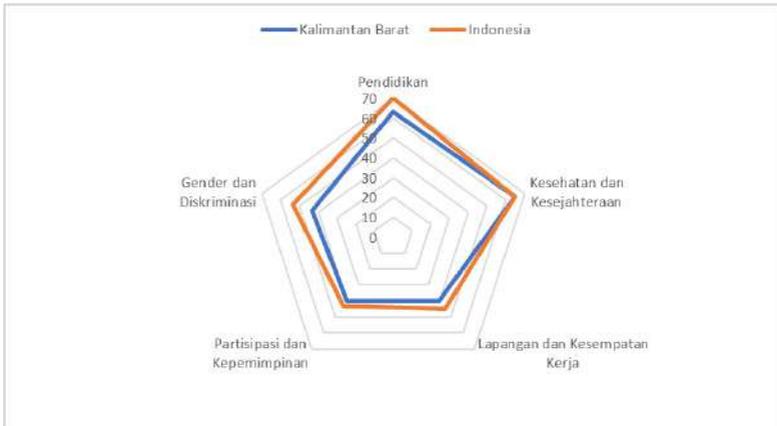
Domain Pendidikan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta domain Gender dan Diskriminasi perlu mendapatkan perhatian lebih. Domain ini semuanya mendapatkan nilai di bawah capaian Nasional. Indikator seperti perkawinan usia anak (12,84) masih cukup tinggi. Indikator lainnya yaitu persentase perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi (38,90) dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (19,62) masih perlu mendapat perhatian.

Gambar 31 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022

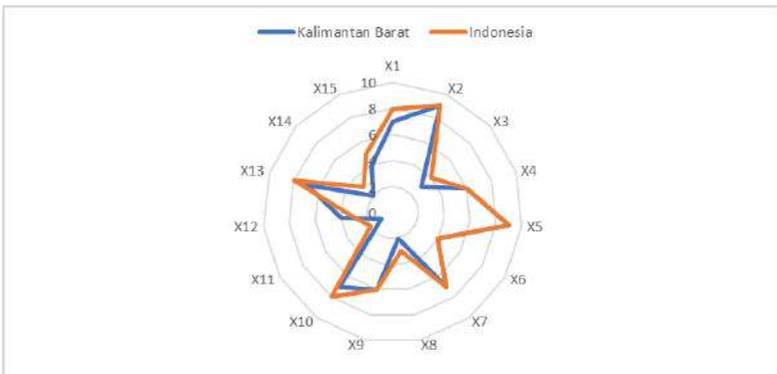
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional pada tahun 2022



3.21 Provinsi Kalimantan Tengah

Jumlah pemuda di Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebanyak 688,35 ribu. Pemuda laki-laki sebanyak 352,64 ribu dan pemuda perempuan sebanyak 335,71 ribu jiwa. IPP Kalimantan

Tengah menjadi yang terendah kedua setelah IPP Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Utara yang memiliki nilai sama. IPP Kalimantan Tengah naik dibandingkan capaian tahun 2021. Peningkatan ini belum bisa melampaui hasil yang diperoleh pada tahun 2020.

Pencapaian setiap domain dalam IPP Kalimantan Tengah cenderung stagnan. Hanya domain Kesehatan dan Kesejahteraan yang mengalami peningkatan dari 65,00 ke 70,00. Adapun domain pendidikan, domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, domain partisipasi dan Kepemimpinan, serta domain Gender dan Diskriminasi mendapatkan hasil yang sama dengan capaian tahun 2021.

Hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan pembangunan pemuda di Kalimantan Tengah antara lain meningkatkan indikator pada Domain Pendidikan. Rata-rata lama sekolah (10,77), APK Sekolah Menengah (86,93), APK Perguruan Tinggi (25,84) memiliki angka di bawah angka Nasional.

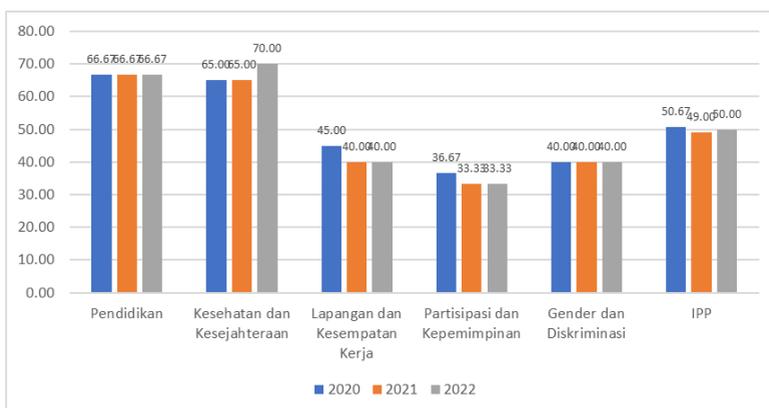
Indikator pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja juga perlu diperhatikan, terutama meningkatkan pemuda wirausaha kerah putih (0,17 berbanding 0,48 Nasional). Domain Partisipasi dan Kepemimpinan membutuhkan upaya perbaikan. Indikator yang perlu ditingkatkan antara lain persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (68,87), persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (3,19) dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (4,38).

Domain Gender dan Diskriminasi mendapatkan hasil di bawah capaian Nasional. Beberapa indikator yang membutuhkan perhatian antara lain angka perkawinan usia anak yang lebih tinggi dari angka Nasional (14,72). Persentase pemuda perempuan yang menempuh

pendidikan menengah dan tinggi (37,61) perlu ditingkatkan, demikian halnya dengan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (21,25).

Gambar 32. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022

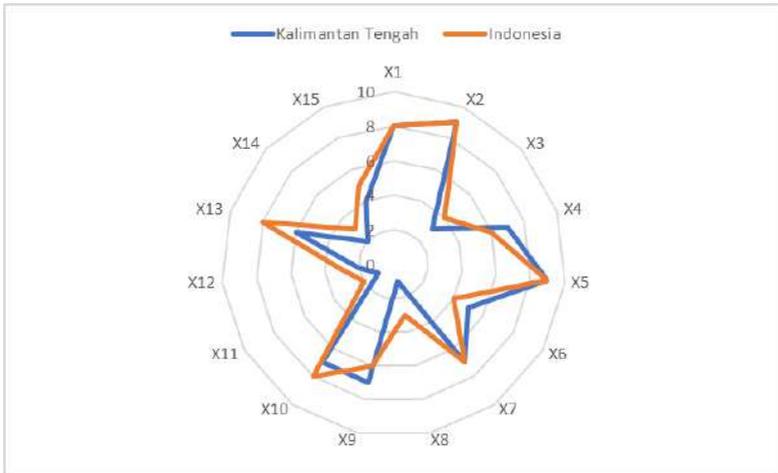
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada tahun 2022



3.22 Provinsi Kalimantan Selatan

Jumlah pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sebanyak 1,04 juta jiwa. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 529,8 ribu jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 509,73 juta jiwa. Raihan IPP Kalimantan Selatan tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Capaian IPP ini masih cukup jauh dari angka IPP Nasional.

Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Kalimantan Selatan mencatatkan hasil yang cukup baik dan berada di atas capaian Nasional yaitu 72,50. Domain ini mengalami peningkatan dua tahun berturut-turut yaitu 65,00 (2020) yang meningkat 70,00 di tahun 2021 dan di tahun 2022 kembali meningkat.

Capaian ini tidak diikuti oleh capaian di domain lainnya. Pada domain Pendidikan walau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, tetapi hasil yang diperoleh masih berada di bawah

capaian Nasional. Peningkatan juga terjadi pada domain Gender dan Diskriminasi yaitu 40,00 pada tahun 2021 menjadi 43,33 pada tahun 2022.

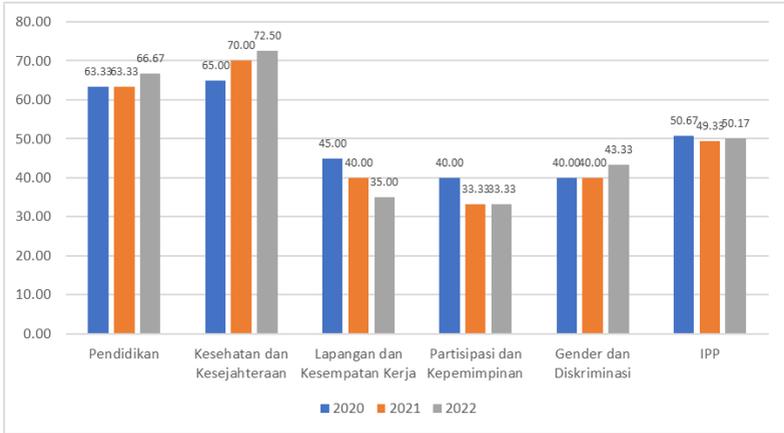
Domain Pendidikan memang mengalami kenaikan tetapi masih belum mencapai angka Nasional. Indikator rata-rata lama sekolah (10,80), APK Sekolah Menengah (83,72) dan APK Perguruan Tinggi (27,50) harus terus ditingkatkan.

Kinerja pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja perlu mendapatkan perhatian. Domain ini mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu 40,00 menjadi 35,00. Hal tersebut membuat domain ini cukup jauh dari angka Nasional. Indikator yang mempengaruhi hal tersebut yaitu semakin menurunnya persentase wirausaha kerah putih 0,19 berbanding 0,48.

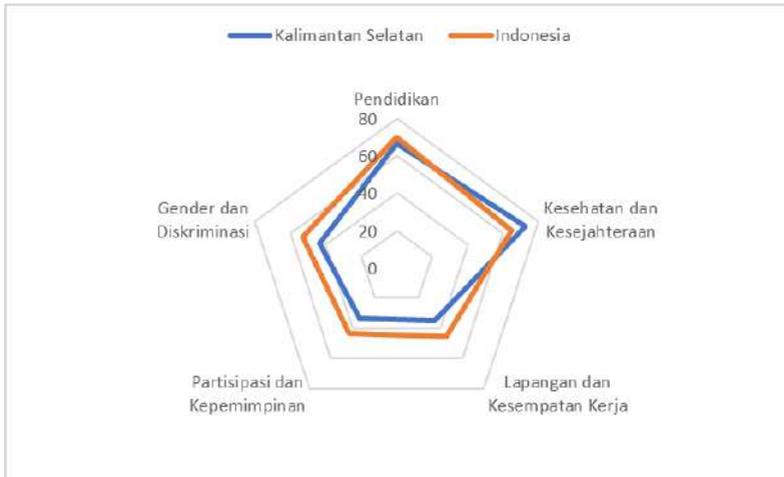
Indikator pada domain Gender dan Diskriminasi juga perlu mendapatkan perhatian. Angka perkawinan usia anak (10,53) masih harus ditekan. Adapun persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi (38,35) dan persentase perempuan yang bekerja di sektor formal (22,93) perlu terus ditingkatkan.

Gambar 33. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2022

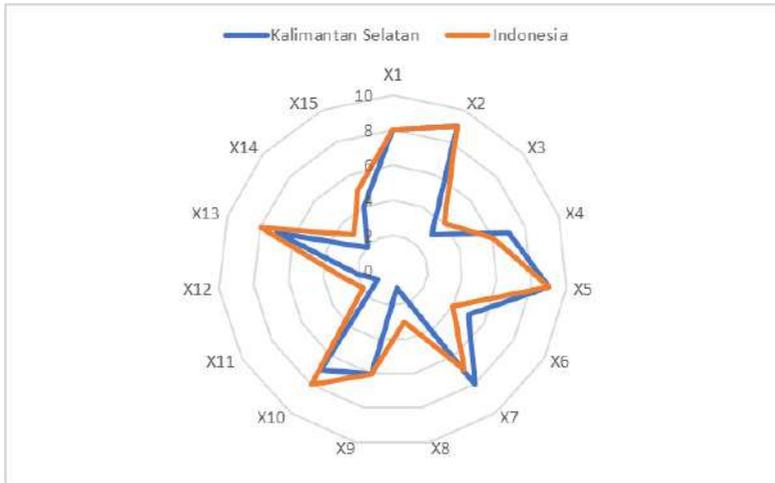
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional pada tahun 2022



3.23 Provinsi Kalimantan Timur

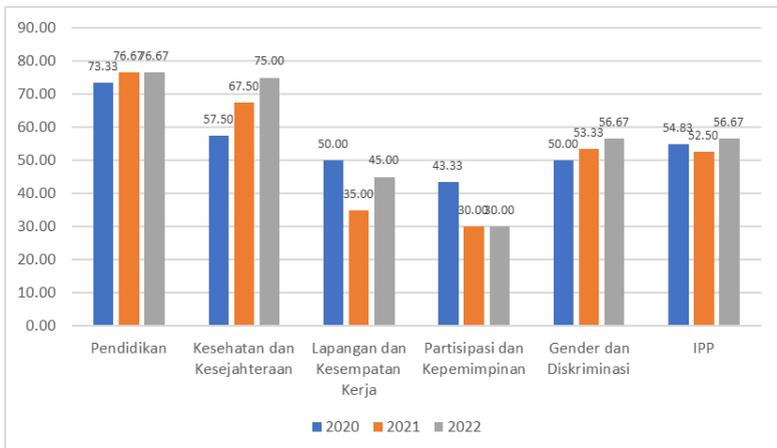
Jumlah pemuda di Kalimantan Timur pada tahun 2022 sebanyak 935,47 ribu jiwa. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 486,80 ribu jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 448,67 ribu jiwa. Capaian IPP Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada di atas capaian Nasional. IPP Kalimantan Timur juga meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2021 yaitu dari 52,50 menjadi 56,67.

Peningkatan IPP Kalimantan Timur tahun 2022 didorong oleh sejumlah perbaikan pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan, domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, serta domain Gender dan Diskriminasi. Tidak ada domain yang bergerak menurun. Pada domain Pendidikan serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan mengalami stagnasi atau sama dengan pencapaian tahun 2021.

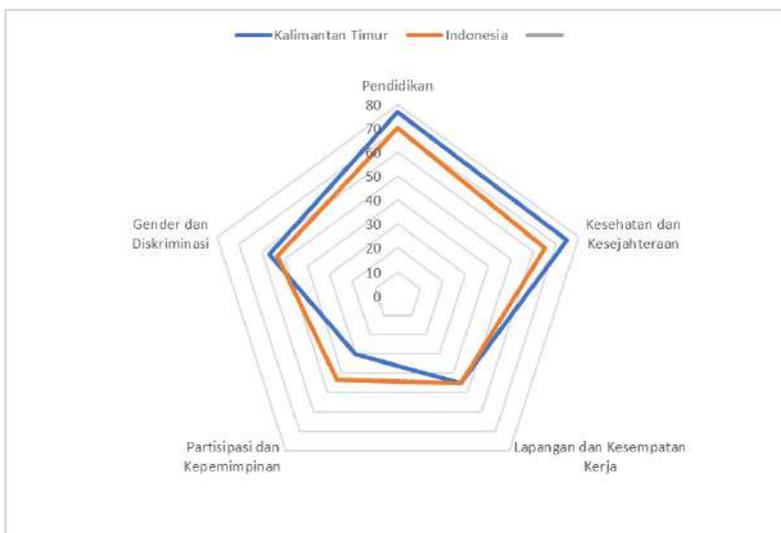
Hal yang harus diperhatikan ada pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang angkanya berada di bawah angka Nasional. Domain ini bahkan bergerak turun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang berada di angka 43,33 lalu turun menjadi 30,00 pada 2021 dan bertahan di angka 30,00 pada tahun 2022. Hal ini dipicu oleh menurunnya persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan yang pada tahun 2020 mencapai 70,55 turun menjadi 50,56 pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan juga terjadi pada indikator persentase pemuda yang aktif pada dalam organisasi (4,87 menjadi 4,15 pada tahun 2021 dan 2022).

Gambar 34. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022

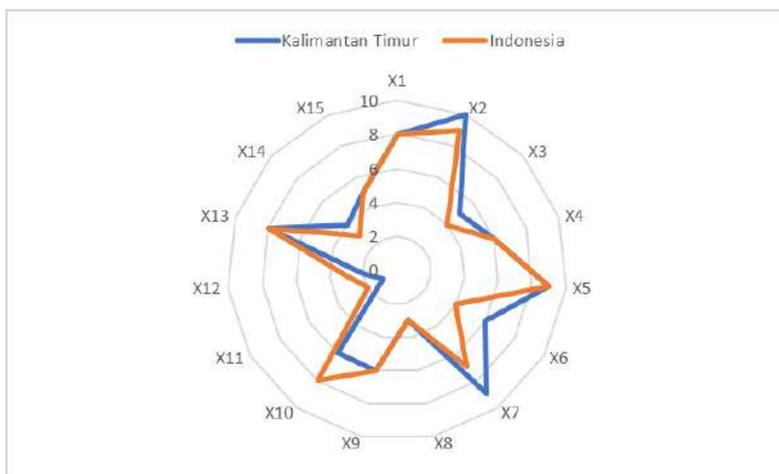
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional pada 2022



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional pada tahun 2022



3.24 Provinsi Kalimantan Utara

Jumlah pemuda yang tinggal di Kalimantan Utara pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 190,2 ribu jiwa. Jumlah ini terdiri dari 102,15 ribu pemuda laki-laki dan 88 ribu pemuda perempuan. Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah pemuda paling sedikit dibandingkan provinsi lainnya. IPP Kalimantan Utara mengalami peningkatan dari capaian tahun 2021. IPP Kalimantan Utara dan IPP Jawa Barat sebesar 49,67 menjadi IPP terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Rendahnya IPP Kalimantan Utara karena merosotnya sejumlah indikator pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan turun dari angka 65,00 pada tahun 2020, lalu 52,50 pada tahun 2021 dan turun kembali menjadi 50,00 pada tahun 2022. Adapun domain Partisipasi dan Kepemimpinan turun dari 40,00 pada tahun 2020 menjadi 30,00 pada tahun 2021 dan 2022.

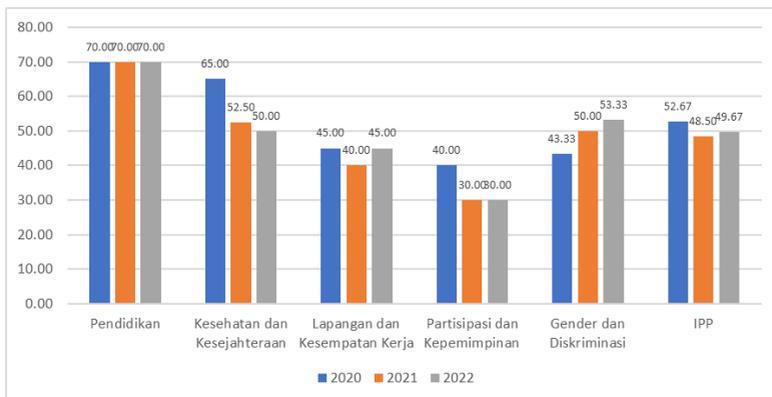
Domain pendidikan serta domain Gender dan Diskriminasi menjadi dua domain yang mendapatkan nilai sama dengan capaian Nasional. Peningkatan yang terjadi pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja dari 40,00 menjadi 45,00 membuat capaian domain ini sama dengan capaian Nasional.

Hal yang harus diperhatikan untuk memperbaiki IPP Kalimantan Utara yaitu melakukan langkah perbaikan pada indikator Kesehatan dan Kesejahteraan. Angka kesakitan pemuda sebesar 13,99 harus terus diperbaiki. Indikator yang juga harus diperbaiki yaitu persentase remaja perempuan yang sedang hamil di mana angka tahun 2022 37,34 berbanding 14,72 angka Nasional.

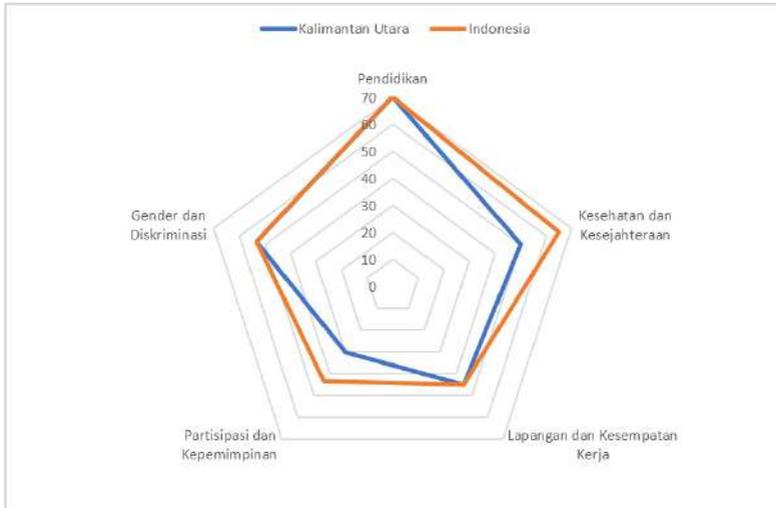
Perbaikan pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan dengan meningkatkan persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial keagamaan yang saat ini masih di angka 43,23. Demikian halnya persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (3,28) serta indikator pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (5,22).

Gambar 35. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2022

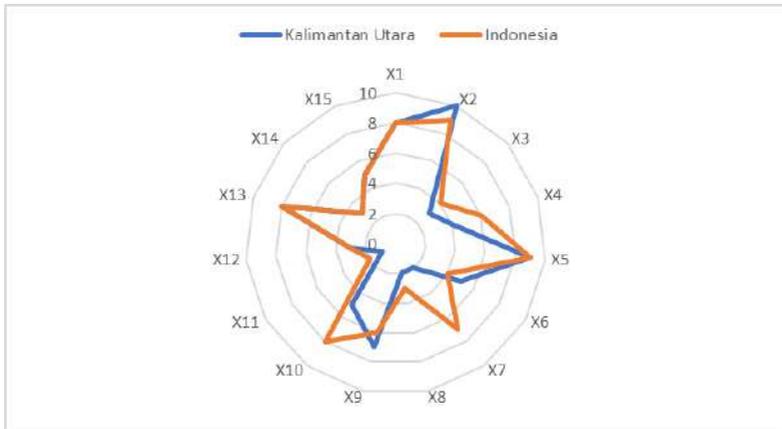
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional pada 2022



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional pada tahun 2022



3.25 Provinsi Sulawesi Utara

Jumlah pemuda di Sulawesi Utara pada tahun 2022 sebanyak 597,38 ribu jiwa yang terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 312,25

ribu jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 285,13 ribu jiwa. IPP Provinsi Sulawesi Utara terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 49,50 pada tahun 2020, lalu pada tahun 2021 IPP mencapai 52,00 dan pada tahun 2022 53,55. Peningkatan ini masih di bawah angka IPP Nasional.

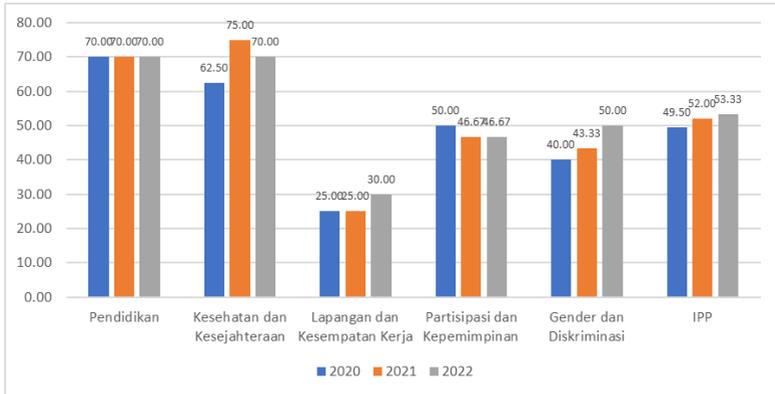
Peningkatan IPP Sulawesi Utara dipengaruhi karena meningkatnya domain Lapangan dan Kesempatan Kerja serta domain Gender dan Diskriminasi. Domain pendidikan mengalami stagnasi sejak tahun 2020. Adapun domain Kesehatan dan kesejahteraan justru mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2021. Penurunan yang terjadi pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan, tidak membuat domain ini berada di bawah capaian Nasional.

Domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan berada di atas capaian Nasional. Sedangkan domain pendidikan menyamai capaian Nasional. Sedangkan domain Gender dan Diskriminasi, serta domain Lapangan dan Kesempatan Kerja masih berada di bawah capaian Nasional.

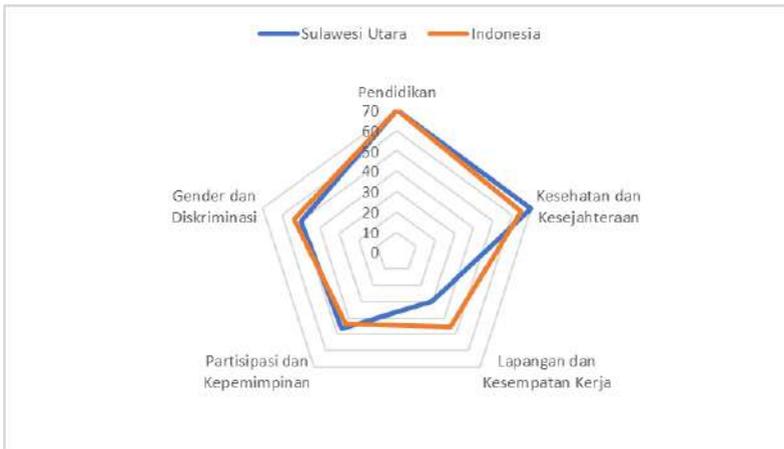
Hal yang harus diperhatikan adalah domain Lapangan dan Kesempatan Kerja. Walau terjadi peningkatan dibandingkan tahun lalu, tetapi masih dibutuhkan perbaikan terhadap berbagai indikator agar pembangunan pemuda pada domain ini bisa lebih baik. Pemuda wirausaha kerah putih harus terus ditingkatkan di mana saat ini jumlahnya 0,27. Demikian halnya tingkat pengangguran terbuka pemuda masih cukup tinggi yaitu 18,81 jika dibandingkan dengan TPT Pemuda Nasional 13,93.

Gambar 36. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2022

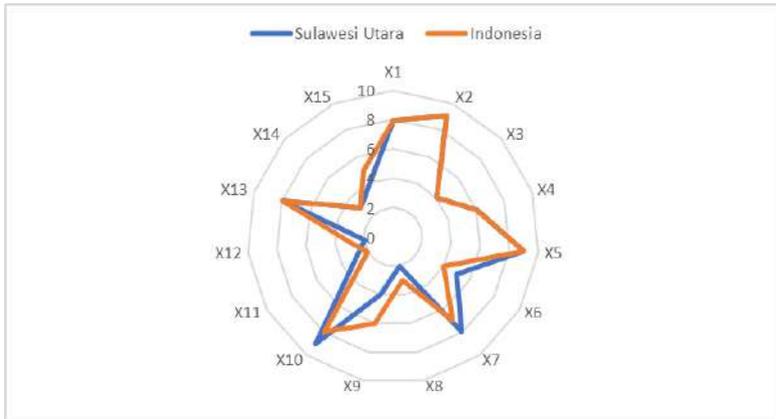
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020, 2021 dan 2022



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional pada tahun 2022



3.26 Provinsi Sulawesi Tengah

Jumlah pemuda di Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mencapai 801,64 ribu jiwa. Jumlah ini terdiri 406,69 ribu jiwa pemuda laki-laki dan 394,95 pemuda perempuan. IPP Sulawesi Tengah mengalami penurunan dibandingkan IPP tahun 2021. Penurunan ini disebabkan tidak ada domain yang mengalami peningkatan.

Domain pendidikan, serta domain Kesehatan dan Kesejahteraan mengalami penurunan. Sedangkan domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, domain Partisipasi dan Kepemimpinan, serta domain Gender dan Diskriminasi mendapatkan angka yang sama dengan tahun sebelumnya.

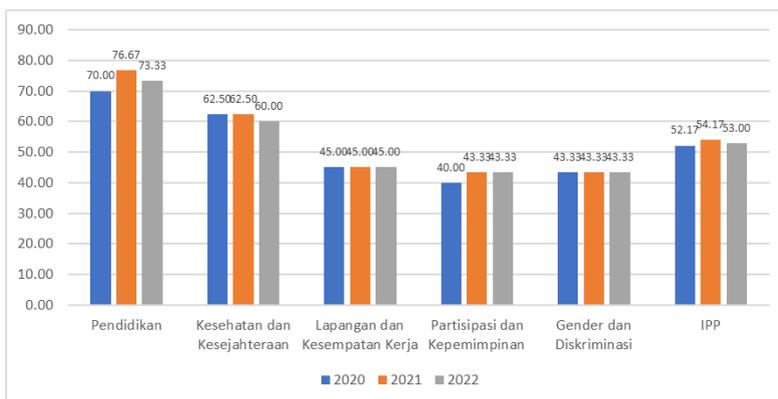
Domain pendidikan walau mengalami penurunan, tetapi angka capaiannya masih di atas angka Nasional. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang mengalami stagnasi, capaiannya sama dengan capaian Nasional.

Hal yang harus diperhatikan ada pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta domain Gender dan Diskriminasi. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan berada di bawah angka Nasional. Angka kesakitan pemuda (10,56) harus terus ditekan, juga pada indikator persentase remaja perempuan yang sedang hamil (18,66) berada di atas angka Nasional.

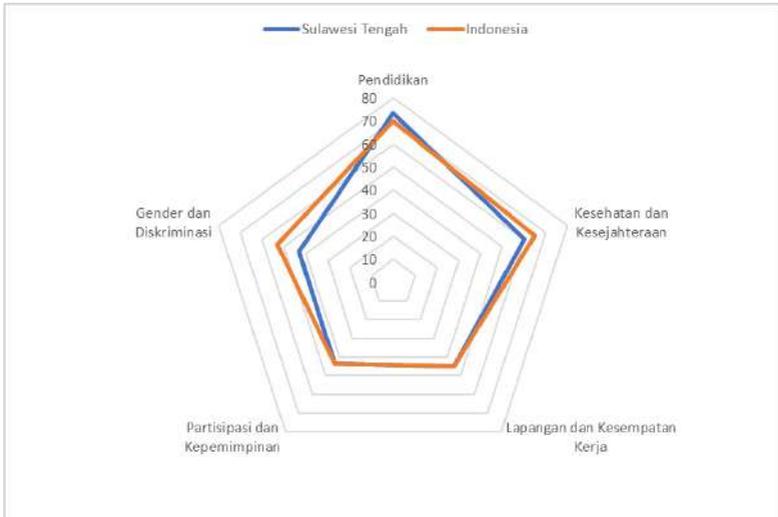
Pada domain Gender dan Diskriminasi, indikator angka perkawinan usia anak (12,65) masih harus ditekan, indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal (16,83) masih harus terus ditingkatkan karena capaian yang didapatkan masih berada di bawah capaian Nasional.

Gambar 37. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022

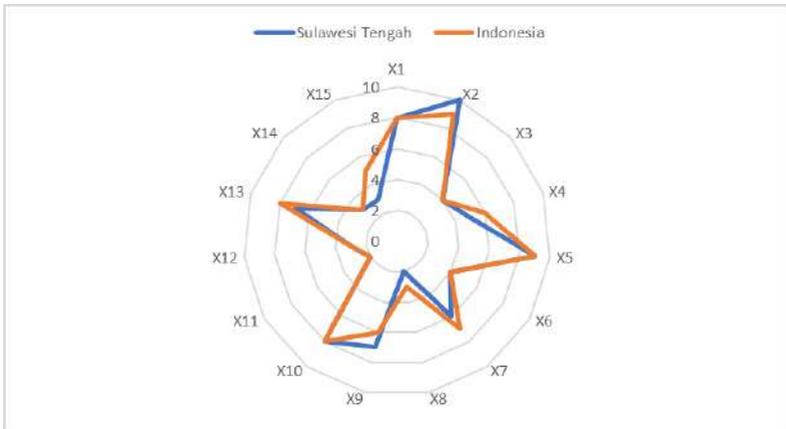
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional pada 2022



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional pada tahun 2022



3.27 Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah pemuda di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sebanyak 2,3 juta jiwa. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki-laki

sebanyak 1,15 juta dan pemuda perempuan sebanyak 1,14 juta jiwa. IPP Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sebesar 53,67. Nilai ini naik dari capaian yang diraih pada tahun 2021. Kenaikan nilai IPP Sulawesi Selatan pada tahun 2022 masih di bawah IPP Nasional.

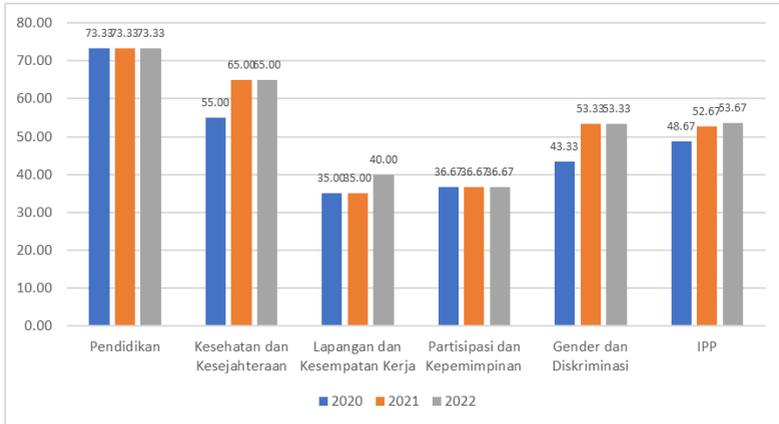
Sebagian besar domain yang dinilai pada IPP mengalami stagnasi. Domain Pendidikan, sejak tahun 2020, 2021 dan 2022 masih bertahan di angka 73,33. Capaian ini berada di atas capaian Nasional. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan juga mendapat hasil yang sama pada tahun 2021 lalu yaitu 65,00. Domain ini sama dengan capaian angka Nasional. Domain Gender dan Diskriminasi juga sama dengan capaian tahun 2021 dan angka ini sama dengan capaian Nasional.

Satu-satunya domain yang mengalami peningkatan ada pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja yaitu naik dari 35,00 menjadi 40,00. Domain ini walau mengalami kenaikan tetapi menjadi faktor yang harus diperhatikan karena berada di bawah capaian Nasional. Jumlah pemuda wirausaha kerah putih di Sulawesi Selatan harus terus ditingkatkan. Saat ini angka yang didapatkan adalah 0,25 turun dari tahun sebelumnya 0,35 dan berada di bawah angka Nasional 0,48.

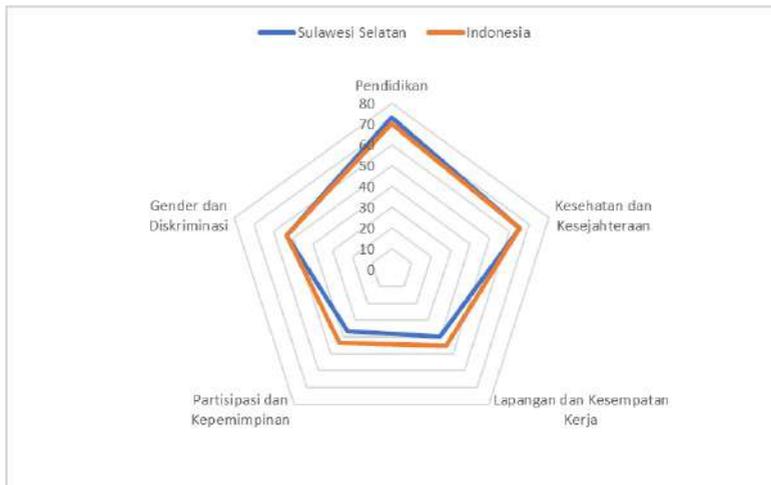
Partisipasi dan Kepemimpinan menjadi domain yang juga harus diperhatikan. Domain ini capaiannya berada di bawah angka Nasional. Indikator yang harus menjadi perhatian adalah persentase pemuda yang aktif dalam organisasi (4,47) dan indikator persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (3,58).

Gambar 38. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022

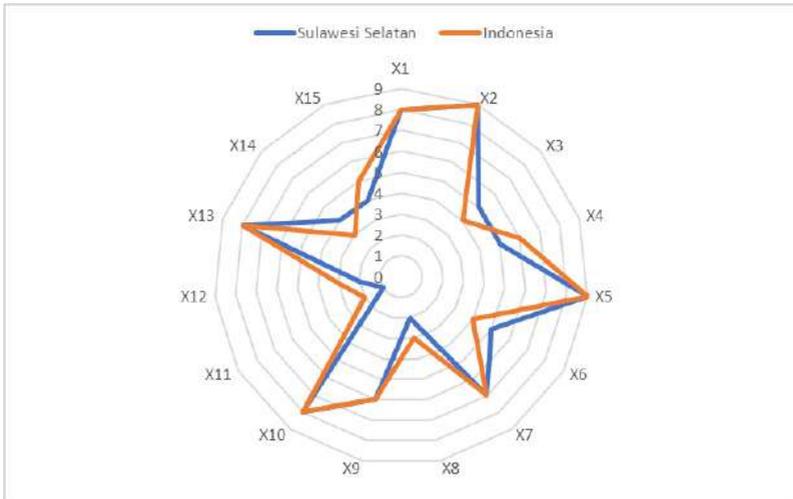
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, 2021 dan 2022



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional pada tahun 2022



3.28 Provinsi Sulawesi Tenggara

Jumlah pemuda di Sulawesi Tenggara sebanyak 701,55 ribu jiwa. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki sebanyak 356,8 dan pemuda perempuan sebanyak 344,75. IPP Provinsi Sulawesi Tenggara terus naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPP Sulawesi Tenggara naik dari 48,83 lalu naik 50,33 pada tahun 2021 dan naik menjadi 53,00 pada tahun 2022. Kenaikan IPP ini masih berada di bawah capaian IPP Nasional.

Kenaikan IPP Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 didorong oleh hasil capaian masing-masing IPP yang mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Tidak ada domain yang mengalami penurunan. Domain Pendidikan dan domain Partisipasi dan Kepemimpinan mendapatkan hasil yang sama dengan capaian tahun 2021. Adapun domain Kesehatan dan Kesejahteraan, domain

Lapangan dan Kesempatan Kerja, serta domain Gender dan Diskriminasi mengalami peningkatan.

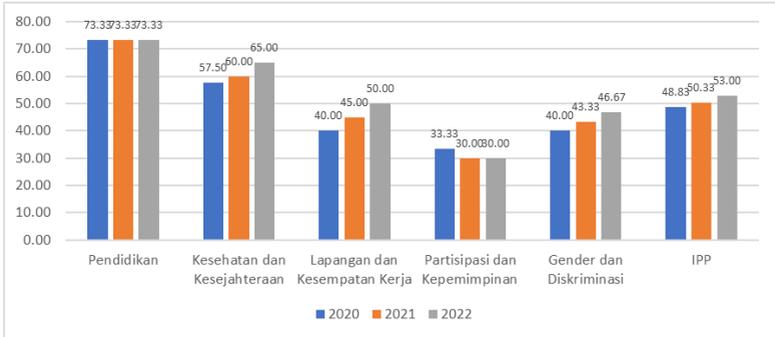
Terdapat dua domain yang menjadi penilaian IPP berada pada angka di bawah capaian Nasional. Domain tersebut adalah domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang mendapatkan angka 30,00. Capaian tahun 2022 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020.

Hal yang harus diperhatikan ada pada indikator persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial masyarakat yang mendapatkan angka 57,12 berbanding 70,49 capaian Nasional. Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi mendapatkan 2,32. Demikian halnya dengan indikator persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat (4,51).

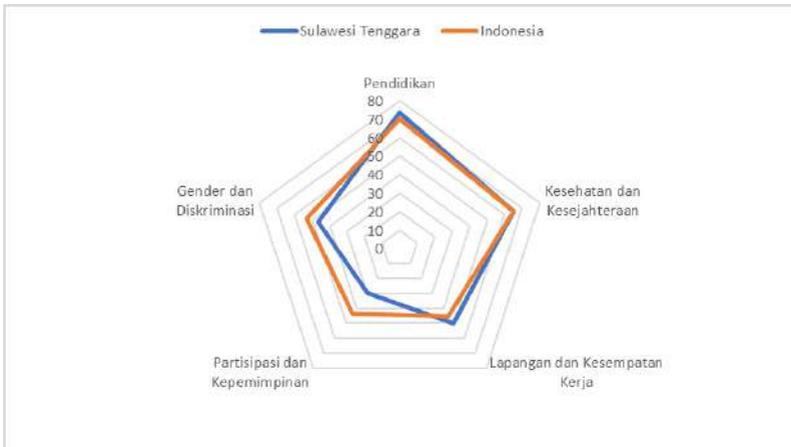
Perhatian juga harus diberikan pada domain Gender dan Diskriminasi. Angka perkawinan usia anak di Sulawesi Tenggara adalah 12,26 lebih tinggi dibandingkan Nasional 8,06. Selain itu persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal mendapatkan angka 19,89 berbanding 24,03 capaian Nasional.

Gambar 39. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2022

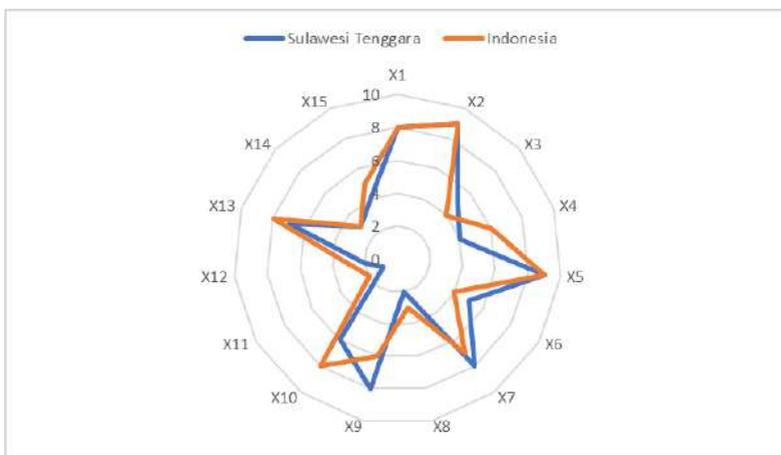
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional pada tahun 2022



3.29 Provinsi Gorontalo

Jumlah pemuda di Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 sebanyak 323,76 ribu jiwa yang terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 166 ribu dan pemuda perempuan sebanyak 157,7 ribu jiwa. Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 mendapatkan angka IPP 53,88. IPP ini naik dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sejumlah domain yang menentukan nilai IPP, domain Pendidikan, serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan mendapatkan angka yang sama dengan capaian tahun 2021. Adapun domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta domain Lapangan dan Kesempatan Kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun domain Partisipasi dan Kepemimpinan mendapatkan angka yang sama dengan tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan capaian Nasional, domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang didapatkan Provinsi Gorontalo lebih baik dengan capaian Nasional. Adapun domain lapangan dan

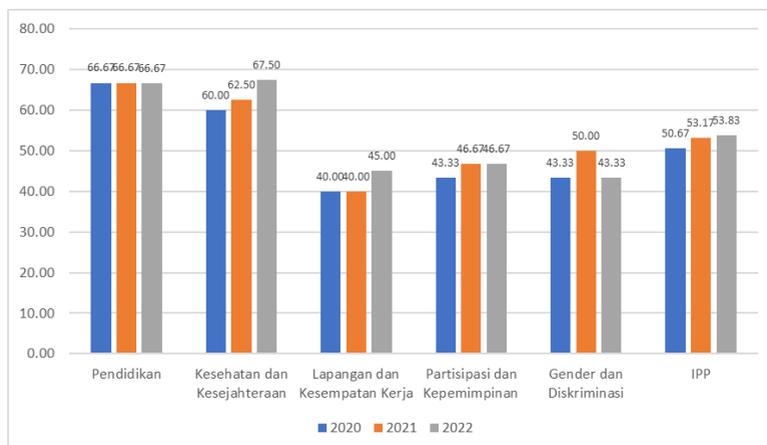
Kesempatan Kerja mendapat nilai yang sama dengan capaian Nasional.

Domain yang perlu mendapatkan perhatian ada pada domain Gender dan Diskriminasi. Angka perkawinan usia anak di Gorontalo masih lebih tinggi dibandingkan angka Nasional yaitu 13,65. Perhatian juga perlu diberikan pada persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal yang mendapatkan angka 19,64 berbanding 24,03 capaian Nasional.

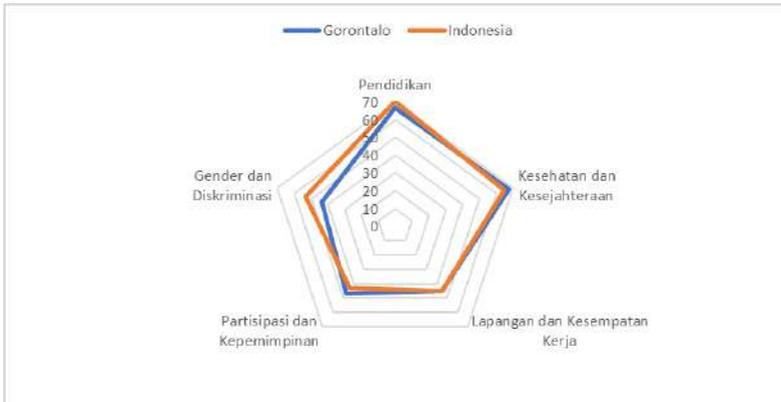
Domain Pendidikan juga berada di bawah capaian Nasional. Perhatian perlu diperhatikan pada indikator rata-rata lama sekolah (10,23), APK Sekolah Menengah (83,71) dan APK Perguruan Tinggi (36,94).

Gambar 40. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo pada Tahun 2022

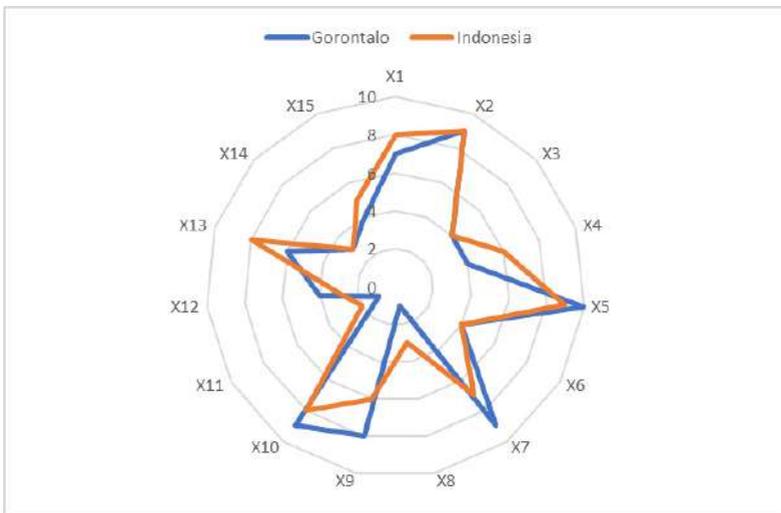
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Gorontalo tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Gorontalo dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Gorontalo dan Nasional pada tahun 2022



3.30 Provinsi Sulawesi Barat

Jumlah pemuda di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 sebanyak 373,56 ribu. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 192,9 ribu jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 180,69 ribu jiwa. Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan angka IPP 2022 53,33. Angka IPP ini lebih tinggi dibandingkan angka IPP tahun 2020 dan tahun 2021. Angka IPP Sulawesi Barat masih berada di bawah angka IPP Nasional.

Domain Pendidikan di Sulawesi Barat fluktuatif. Pada tahun 2020 mendapat angka 63,33 lalu naik menjadi 66,67 pada tahun 2021 dan turun kembali menjadi 63,33 pada tahun 2022. Capaian domain Pendidikan ini berada di bawah capaian Nasional sehingga perlu menjadi perhatian. Indikator rata-rata lama sekolah (10,21), APK Sekolah Menengah (86,25) dan APK Perguruan Tinggi (29,43) masih berada di bawah angka Nasional.

Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, domain Lapangan dan Kesempatan Kerja serta domain Gender dan Diskriminasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun domain Partisipasi dan Kepemimpinan angkanya tetap sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu 40,00.

Jika dibandingkan dengan capaian Nasional, domain Lapangan dan Kesempatan Kerja mendapatkan angka di atas angka Nasional. Pada domain ini indikator wirausaha kerah putih berhasil ditingkatkan dari 0,05 pada tahun 2021 menjadi 0,29 pada tahun 2022. Angka ini masih di bawah angka Nasional. Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda, Sulawesi Barat mendapatkan angka yang lebih baik yaitu 5,46 lebih rendah dari angka Nasional (13,93). Adapun domain Kesehatan dan

Kesejahteraan memiliki nilai yang sama dengan angka Nasional.

Selain domain Pendidikan, domain Gender dan Diskriminasi perlu menjadi perhatian. Pada domain ini terdapat indikator angka perkawinan usia anak (11,70) yang masih tinggi dibandingkan angka Nasional. Indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal mendapatkan angka 16,99 yang berada di bawah angka Nasional 24,03.

Gambar 41. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022

- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, 2021 dan 2022
- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional pada 2022
- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional pada tahun 2022

3.31 Provinsi Maluku

Jumlah pemuda di Provinsi Maluku sebanyak 481,6 ribu jiwa yang terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 246,67 dan pemuda perempuan sebanyak 234,93 ribu jiwa. IPP Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPP

Maluku 52,00, lalu naik menjadi 54,67 dan naik menjadi 56,67 pada tahun 2022. Angka IPP Provinsi Maluku berada di atas capaian IPP Nasional.

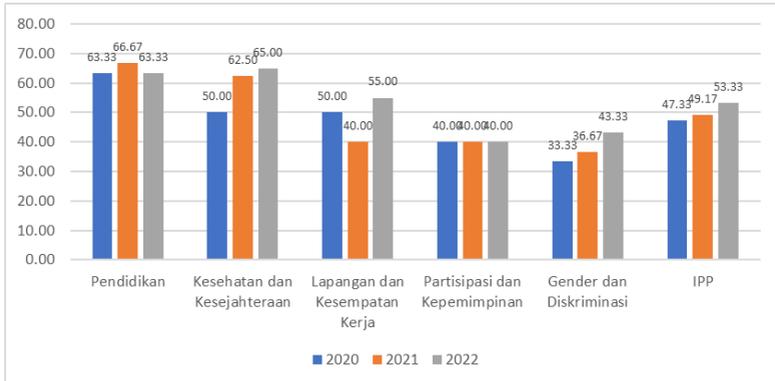
Dari lima domain yang diperhitungkan dalam IPP, hanya domain Lapangan dan Kesempatan Kerja yang mengalami penurunan. Terdapat satu domain yang hasilnya sama dengan tahun sebelumnya yaitu domain Partisipasi dan Kepemimpinan. Adapun domain Pendidikan, serta domain Gender dan Diskriminasi mendapatkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Domain Pendidikan yang diperoleh Provinsi Maluku berada di atas capaian Nasional yaitu 80,00. Hasil lebih tinggi dari capaian Nasional juga terlihat pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan, serta domain Gender dan Diskriminasi. Adapun domain Kesehatan dan Kesejahteraan mendapatkan angka yang sama dengan angka Nasional.

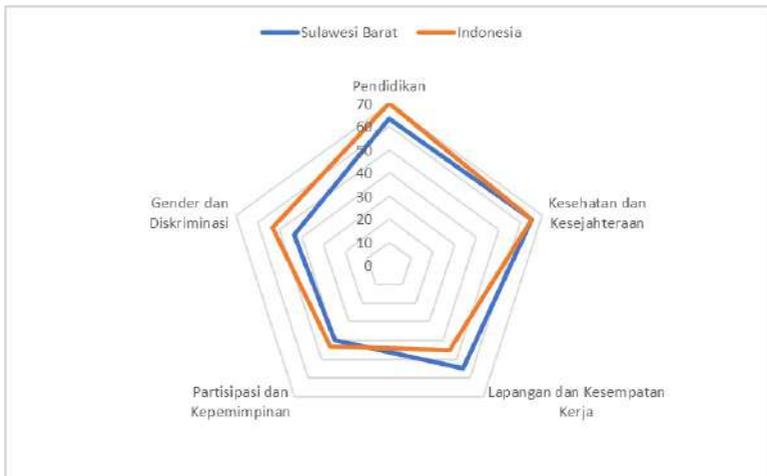
Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Domain ini terus mengalami penurunan dari tahun 2020 (35,00) lalu turun menjadi 30,00 pada tahun 2021 dan turun kembali menjadi 25,00 pada tahun 2022. Indikator yang perlu mendapatkan pembenahan adalah persentase wirausaha kerah putih yang mendapatkan angka 0,19.

Gambar 42. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku pada Tahun 2022

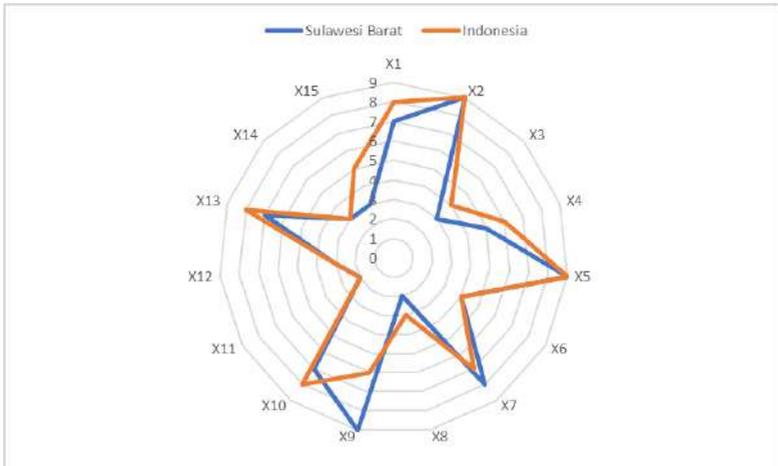
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Maluku tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Maluku dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Maluku dan Nasional pada tahun 2022



3.32 Provinsi Maluku Utara

Jumlah pemuda di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 diperkirakan 332,22 ribu jiwa. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 171,79 ribu jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 160,43 ribu jiwa. IPP Maluku Utara mengalami peningkatan dari IPP tahun 2021 yaitu dari 55,67 menjadi 59,17. Angka IPP ini lebih tinggi dari angka IPP Nasional.

Capaian angka domain Pendidikan Maluku Utara (76,67) berada di atas angka Nasional. Angka ini mengalami stagnasi sejak tahun 2020 hingga 2022. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan juga mendapatkan angka di atas Nasional yaitu 77,50. Domain ini meningkat setelah pada tahun 2021 mendapatkan nilai 65,00.

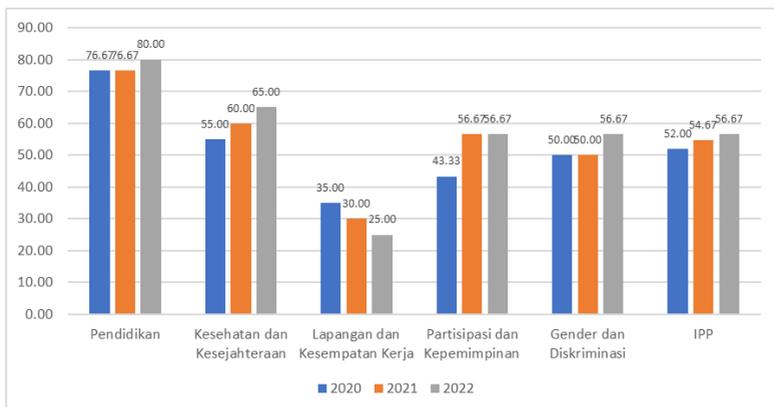
Maluku Utara berhasil menekan angka kesakitan pemuda menjadi 5,12. Hal yang sama juga pada indikator persentase pemuda

korban kejahatan yang pada tahun 2021 mendapatkan angka 0,98 menjadi 0,38. Selain itu menekan persentase remaja perempuan yang sedang hamil dari 16,54 menjadi 3,28. Satu-satunya indikator yang belum berhasil diturunkan ialah persentase pemuda yang merokok.

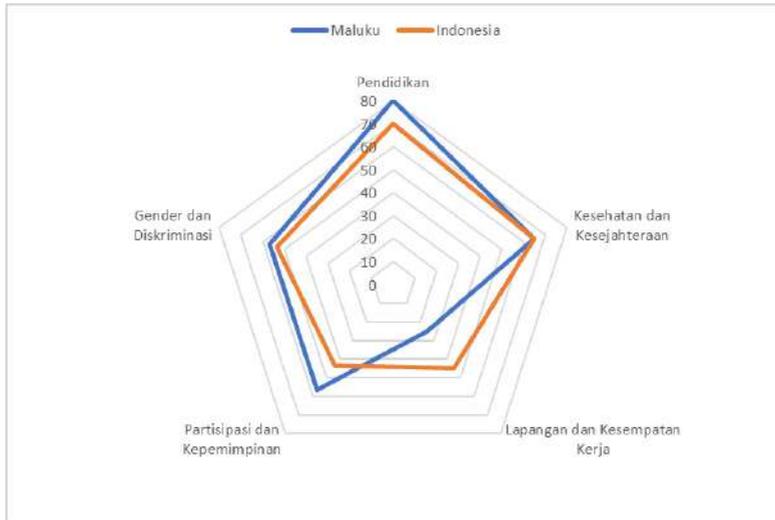
Domain Gender dan Diskriminasi menjadi satu-satunya domain yang capaiannya berada di bawah angka Nasional. Indikator yang harus diperhatikan pada domain ini antara lain Angka perkawinan usia anak 12,52 lebih tinggi dari angka Nasional. Indikator yang menjadi perhatian ialah persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal yaitu 15,88. Angka ini berada di bawah angka Nasional 24,03.

Gambar 43 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2022

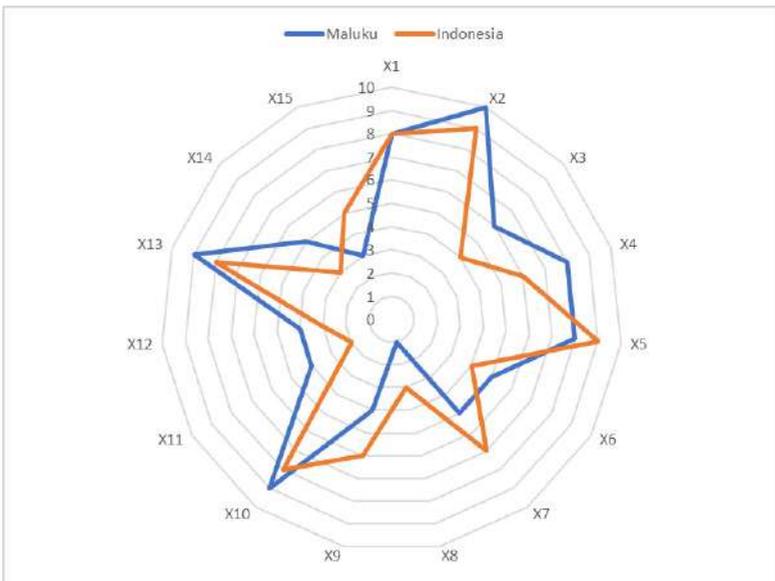
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Maluku Utara tahun 2020, 2021 dan 2022



- (b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Maluku Utara dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Maluku Utara dan Nasional pada tahun 2022



3.33 Provinsi Papua Barat

Jumlah Pemuda yang tinggal di Papua Barat pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 272,9 ribu jiwa yang terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 140,9 ribu jiwa dan pemuda perempuan 132 ribu jiwa. Jumlah ini menjadi jumlah terendah kedua setelah Provinsi Kalimantan Utara. Angka IPP Provinsi Papua Barat terus meningkat dari tahun ke tahun di mana pada tahun 2022 mendapatkan angka 55,83 yang berarti berada di atas angka IPP Nasional.

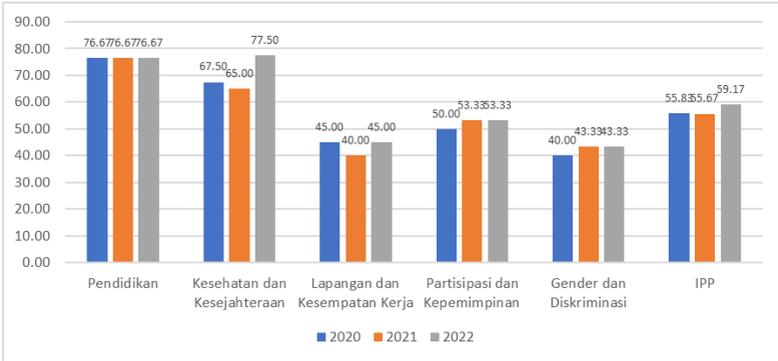
Dibandingkan dengan capaian tahun 2021, hampir semua domain mendapatkan angka yang sama dengan tahun 2021, kecuali pada domain Gender dan Diskriminasi yang naik dari 43,33 menjadi 46,67.

Domain Pendidikan di Papua Barat berada di atas angka Nasional yaitu 73,33. Demikian halnya dengan domain Kesehatan dan Kesejahteraan (67,50) dan domain Partisipasi dan Kepemimpinan (46,67). Adapun domain Lapangan dan Kesempatan Kerja mendapatkan angka yang sama dengan angka Nasional.

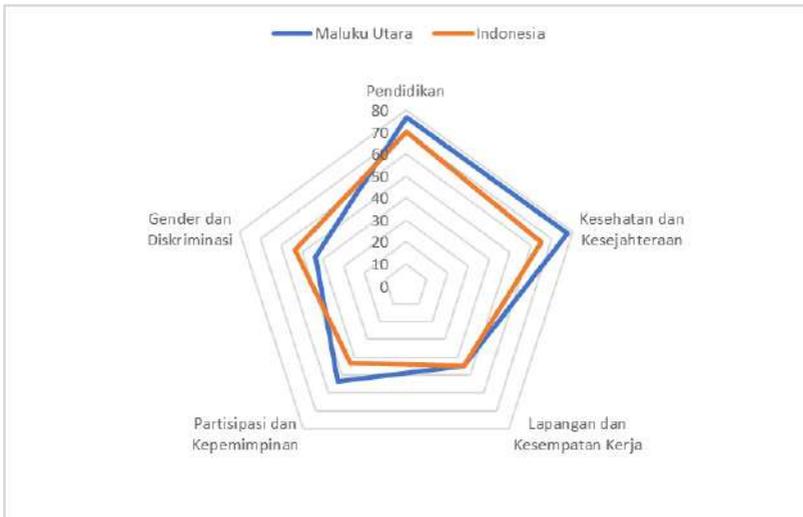
Domain yang harus diperhatikan adalah domain Gender dan Diskriminasi yang masih berada di bawah angka Nasional. Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal menjadi satu-satunya indikator di domain ini yang nilainya lebih rendah dibandingkan angka Nasional yaitu 16,05 berbanding 24,03.

Gambar 44. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Papua Barat pada Tahun 2022

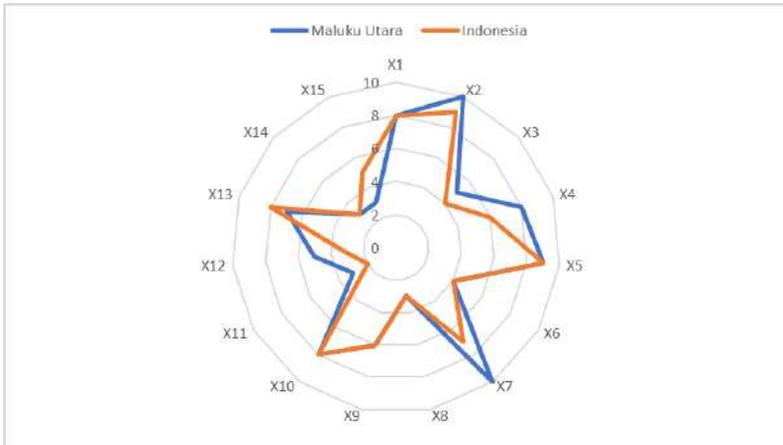
(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Papua Barat tahun 2020, 2021 dan 2022



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Papua Barat dan Nasional pada 2022



- (c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Papua Barat dan Nasional pada tahun 2022



3.34 Provinsi Papua

Jumlah pemuda di Provinsi Papua pada tahun 2022 diperkirakan sejumlah 931,6 ribu jiwa. Jumlah ini terdiri dari pemuda laki-laki sebanyak 496,93 ribu jiwa dan pemuda perempuan sebanyak 434,67 ribu jiwa. IPP Provinsi Papua tahun 2022 naik dari 52,00 pada tahun 2021 menjadi 57,50. Angka ini berada di atas IPP Nasional.

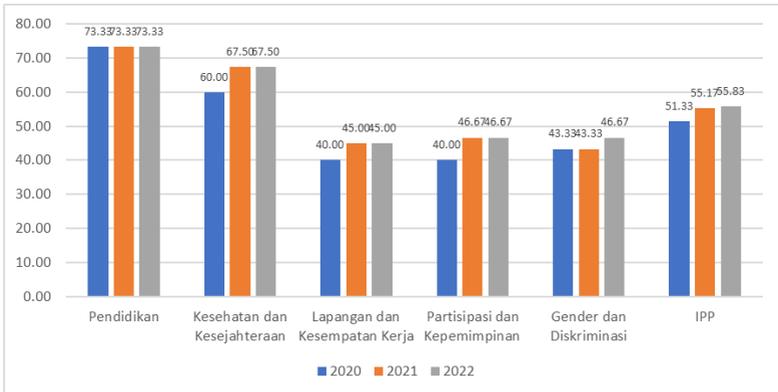
Terjadi peningkatan pada sejumlah domain yang dijadikan barometer IPP. Domain pendidikan naik dari 56,67 menjadi 60,00. Walaupun mendapatkan kenaikan, tetapi angka yang didapatkan masih berada di bawah capaian Nasional. Hal yang harus diperhatikan antara lain indikator rata-rata lama sekolah (8,21), juga indikator APK Sekolah Menengah (80,42) dan APK Perguruan Tinggi (20,08).

Hasil cukup tinggi didapatkan pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan yang naik menjadi 82,50. Papua berhasil menekan angka kesakitan pemuda hingga 2,44 (Nasional 9,51). Persentase pemuda korban kejahatan juga diturunkan menjadi 0,44. Demikian halnya pada indikator persentase pemuda yang merokok menjadi 16,73 (Nasional 24,36), serta persentase remaja perempuan yang sedang hamil menjadi 5,08 (Nasional 14,72).

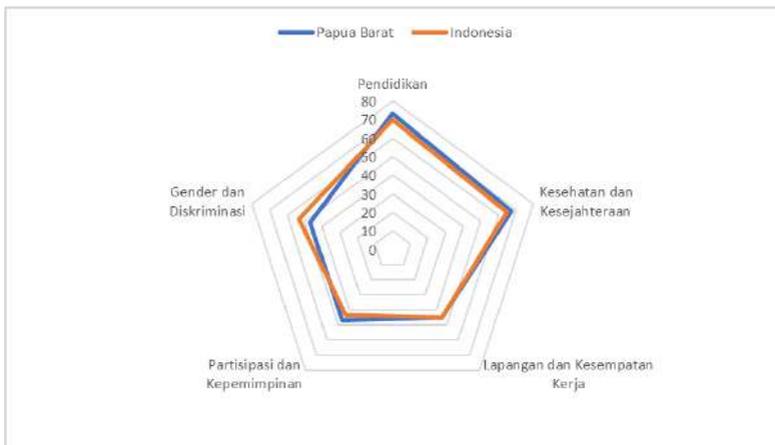
Hal yang harus diperhatikan adalah pada domain Gender dan Diskriminasi. Angka domain ini memang naik dari 30,00 menjadi 36,67. Angka ini masih di bawah angka Nasional. Indikator yang harus diperhatikan adalah angka perkawinan usia anak yang masih berada di atas Nasional. Persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi juga perlu didorong agar semakin bertambah. Serta persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal yang angkanya pada tahun 2022 5,99 berbanding 24,03 Nasional.

Gambar 45 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Papua pada Tahun 2022

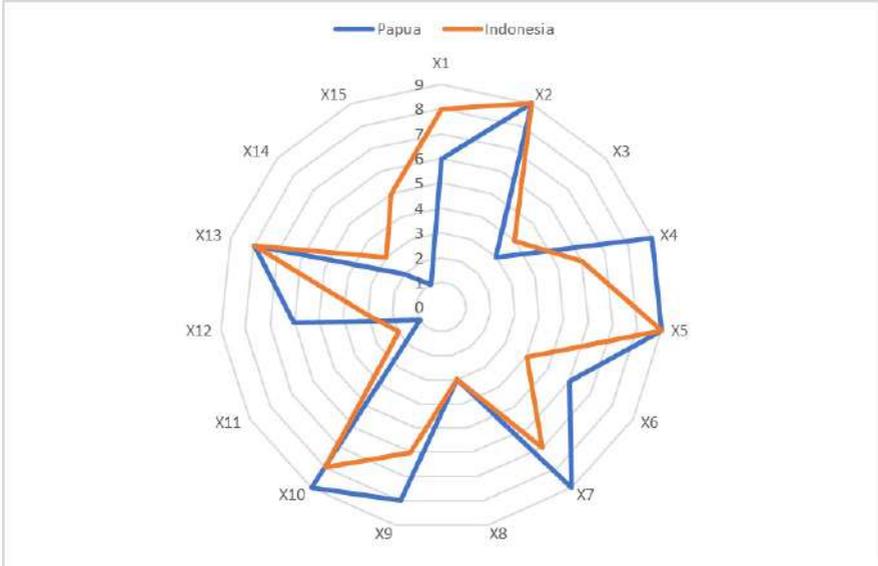
- (a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Papua tahun 2020, 2021 dan 2022



(b) Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Papua dan Nasional pada 2022



(c) Perbandingan antara nilai transformasi indikator IPP Provinsi Papua dan Nasional pada tahun 2022





BAB 4

MENERJEMAHKAN IPP MENJADI KEBIJAKAN

Bab ini membahas tentang proses memanfaatkan IPP untuk mewujudkan pembangunan pemuda yang lebih baik melalui rumusan kebijakan yang responsif terhadap tantangan yang dihadapi dan adaptif terhadap konteks dan perubahan.

UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan meletakkan sejarah peran aktif pemuda sebagai ujung tombak dalam perjuangan bangsa Indonesia sebagai bagian penting dalam pembangunan kepemudaan. Pada pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan Pembangunan Kepemudaan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki

jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan kepemudaan dilakukan dengan cara melakukan pelayanan kepemudaan dalam berbagai dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan. Pelayanan kepemudaan tersebut dengan cara melakukan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.

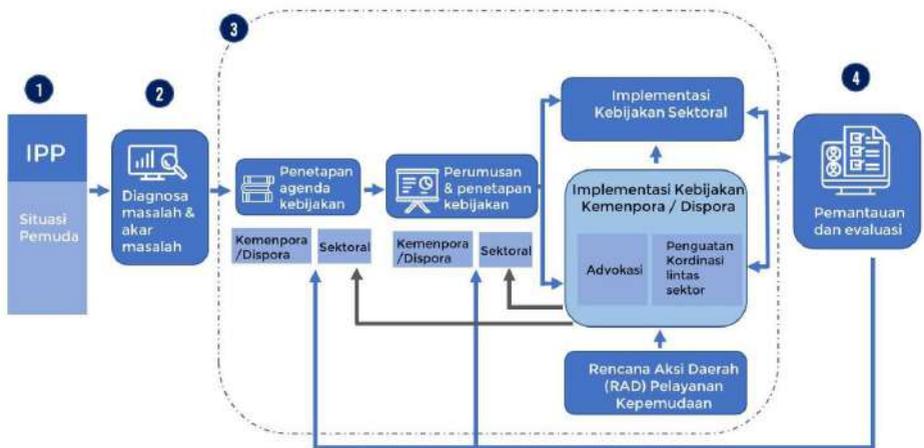
Upaya pelayanan kepemudaan tentu saja akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan konteks sesuai dengan perubahan dan dinamika yang terjadi baik pada level daerah, regional, nasional maupun Internasional. Untuk menjawab kondisi pembangunan kepemudaan di setiap provinsi maupun Nasional dibutuhkan tolok ukur yang kemudian dituangkan ke dalam Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP). Keberadaan IPP mempermudah proses penilaian terhadap keberhasilan pembangunan pemuda karena situasi pemuda di berbagai aspek kehidupannya dapat tercermin dalam satu angka.

IPP memberikan gambaran mengenai kondisi pemuda saat ini melalui beberapa indikator (aspek *what*). IPP juga memberikan perbedaan antar setiap provinsi dalam pembangunan pemuda (aspek *where*) dan sejauh mana situasi pemuda telah berhasil berkembang waktu ke waktu (aspek *when*). Untuk memanfaatkan lebih jauh hasil IPP, maka diperlukan analisis terhadap berbagai domain dan indikator agar IPP dapat dimanfaatkan sebagai alat kebijakan dengan menelusuri faktor yang menyebabkan munculnya situasi pemuda tertentu (aspek *why*), strategi yang diperlukan

(aspek *how*) dan pelaksana dari strategi tersebut (aspek *who*). Keenam hal ini penting dihadirkan untuk memudahkan proses perencanaan berbasis data yang didapatkan melalui IPP.

Proses menerjemahkan IPP menjadi kebijakan dalam konteks pembangunan pemuda dilakukan dengan empat tahapan. Pertama, menganalisis IPP sebagai gambaran kondisi dan situasi pemuda. Kedua, melakukan diagnosa masalah dan mencari akar masalah dari kondisi tersebut. Ketiga, tahapan implementasi kebijakan mulai dari penetapan agenda kebijakan, perumusan hingga implementasi. Keempat, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasinya.

Gambar 46. Diagram Alur Proses Menerjemahkan IPP menjadi Kebijakan dalam Konteks Pembangunan Pemuda



4.1 Tahap 1 Analisis Situasi Pemuda Melalui IPP

IPP memberikan informasi mengenai situasi pemuda di tingkat Daerah dan Nasional. Analisis dilakukan dengan melihat kelima belas indikator yang menjadi penyusun IPP. Analisis juga mempertimbangkan faktor sosio-demografis seperti pemuda laki-laki/perempuan, pendidikan, juga ekonomi.

Hasil IPP setiap daerah bisa menjadi petunjuk awal bagi pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan kepemudaan. Dibutuhkan keterbukaan dan komitmen dari pemerintah daerah untuk membenahi setiap persoalan kepemudaan. Selain itu juga dibutuhkan kerja sama antar sektor untuk membenahi setiap persoalan.

Hasil analisis situasi pemuda selanjutnya akan menjadi bahan untuk melakukan diagnosis masalah dan akar masalah. Kesalahan melakukan analisis terhadap kondisi pemuda, bisa membuat diagnosa permasalahan tidak menyentuh akar permasalahan sebenarnya.

4.2 Tahap 2 Diagnosis dan Mencari Akar Masalah

Setelah melihat kondisi pemuda baik di tingkat Daerah maupun Nasional, selanjutnya dilakukan diagnosis untuk mencari penyebab atau akar masalah dari sebuah capaian yang belum maksimal. Diagnosis tidak hanya untuk mencari penyebab dari rendahnya capaian, tetapi juga penting untuk mencari penyebab mengapa sebuah capaian tidak mengalami peningkatan.

Tahap kedua ini merupakan bagian dari proses merumuskan kebijakan pembangunan pemuda. Analisis yang keliru terhadap sebuah permasalahan, menyebabkan solusi yang diberikan tidak

efektif bahkan bisa tidak tepat. Sebaliknya dengan diagnosis yang tepat akan memudahkan proses penyelesaian permasalahan melalui pelibatan pemangku kepentingan yang tepat pula.

Pada tahapan ini, diagnosis dilakukan dengan membedah masing-masing indikator dan melakukan kajian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah indikator. Pada tahap ini, koordinasi dengan lintas sektor terkait dan lintas pemangku kepentingan diharapkan sudah terjalin. Hal ini penting dilakukan karena seringkali, satu indikator terkait dengan beberapa sektor sehingga perlu koordinasi dan komunikasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Penggalian akar masalah dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan untuk memperoleh pengetahuan dengan menganalisis data berbentuk angka, sementara melalui pendekatan kualitatif, pengetahuan diperoleh dengan menghimpun dan menganalisis data selain angka untuk memahami perilaku, nilai, persepsi individu/kelompok terhadap topik yang dianalisis. Pendekatan kuantitatif diantaranya dilakukan dengan menganalisis korelasi dan regresi dari indikator-indikator yang terdapat dalam IPP dan indikator lainnya.

Adapun pengumpulan informasi melalui pendekatan kualitatif dapat dilakukan di antaranya melalui diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*, wawancara mendalam, pengamatan berpartisipasi, analisis studi kasus. Pihak yang dapat terlibat di antaranya pemuda, rumah tangga dengan pemuda, masyarakat, institusi sekolah, tempat kerja, pemerintah pusat dan daerah, NGO, dan akademisi—pihak yang dilibatkan sangat tergantung pada topik yang dianalisis.

Secara umum bagian ini melakukan inventarisasi terhadap identifikasi masalah yang dihadapi, apa yang telah dicapai dan seberapa besar sumber daya yang dimiliki, potensi sumber daya yang dapat dikembangkan, dan identifikasi kondisi lingkungan. Salah satunya dengan melakukan pemetaan mengenai pemangku kepentingan yang memiliki (potensi) peran strategis untuk menyelesaikan masalah /akar masalah. Power dan agenda yang dimiliki aktor tersebut perlu dianalisis, disertai celah yang dimiliki oleh pemerintah saat ini dalam menyelesaikan masalah pembangunan pemuda. Pemangku kepentingan ini lah yang selanjutnya akan diadvokasi oleh Kemenpora atau Dispora untuk menyelenggarakan intervensi yang memastikan pemuda ikut serta sebagai objek dan subjek pembangunan).

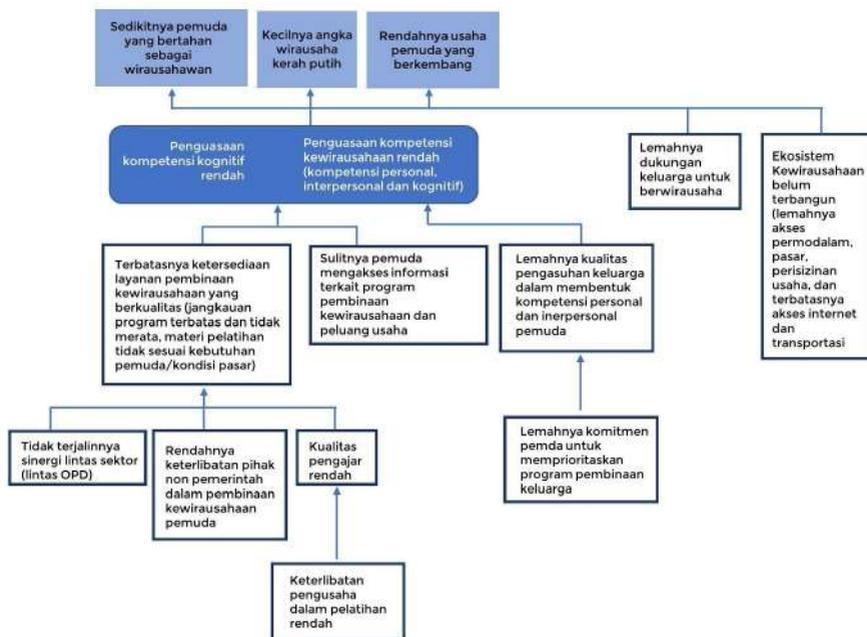
Saat melakukan penggalian akar masalah antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya sangat memungkinkan melahirkan perbedaan hasil. Hal ini terjadi karena setiap wilayah di Indonesia memiliki dinamika pembangunan pemuda yang berbeda. Perbedaan ini membuat pemetaan akar persoalan pembangunan pemuda di wilayah lain kemungkinan besar akan menghasilkan pemetaan persoalan yang berbeda dengan tantangan yang dihadapi daerah lain.

Dalam menghimpun data dan informasi, proses triangulasi perlu dilakukan. Triangulasi adalah proses untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Hal ini dapat ditelusuri dengan memastikan konsistensi temuan berdasarkan beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan. Proses ini menduduki peranan penting dalam rangka memberikan masukan dalam proses formulasi kebijakan pembangunan pemuda.

Berikut disajikan contoh analisis akar masalah pembangunan

pemuda pada domain partisipasi dan kesempatan kerja pada tingkat nasional. Analisis ini dilakukan melalui FGD pengembangan Background Study RPJPN dan RPJMN Bidang Pemuda dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang partisipasi dan kesempatan kerja termasuk kementerian/lembaga, pemuda, akademisi, pemerintah daerah, mitra pembangunan dan pihak swasta.

Gambar 47. Diagram Alur Proses Menerjemahkan IPP menjadi Kebijakan dalam Konteks Pembangunan Pemuda



Sumber: FGD perumusan background study RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Pemuda

4.3 Tahap 3 Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan

Setelah mendapatkan hasil diagnosis terhadap akar masalah, dilakukanlah proses perencanaan dan penetapan agenda kebijakan. Proses perumusan kebijakan terdiri dari rangkaian kegiatan yang membentuk sebuah siklus. Siklus kebijakan terdiri dari tahapan penerapan agenda kebijakan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi ini nantinya bermanfaat untuk mendorong perbaikan kebijakan ke depannya.

Dalam proses perencanaan kebijakan pembangunan pemuda, Kemenpora dan Dispora menjalankan peran untuk mengadvokasi dan menguatkan koordinasi pembangunan pemuda dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan yang terjalin sejak tahap perencanaan. Peran ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 yang menempatkan Kemenpora sebagai Kementerian Kelompok III.

Kementerian Kelompok III merupakan yaitu kementerian yang menangani pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Status Kemenpora sebagai Kementerian Kelompok III ini serupa dengan status yang dimiliki oleh Bappenas, KemenPANRB, Kemenkop UKM, Kemenparekraf, Kemen PPPA, dan BRIN. KL kelompok III ini merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidangnya, tapi fungsi sebagai pelaksanaan kebijakan bukan menjadi bagian dari fungsi KL kelompok III.

Kebijakan yang dibuat diarahkan pada upaya untuk mendorong perbaikan capaian pembangunan pemuda pada setiap domain dan indikator serta melakukan advokasi sebagai bagian untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Kemenpora/Dispora juga memastikan instansi pemerintah

lintas sektor memiliki kebijakan dan program yang mengintervensi akar persoalan pembangunan pemuda. Kebijakan dan program tersebut dapat seharusnya dapat diakses oleh seluruh pemuda secara setara termasuk pemuda disabilitas, laki-laki dan perempuan, berpendidikan/ berketerampilan rendah, pemuda luar sekolah, miskin, pemuda dengan HIV, pemuda yang menikah/hamil di usia anak, dan pemuda pengungsi

Kemenpora/Dispora memastikan penyelenggaraan program kementerian/dinas lintas sektor (terutama terkait lima domain pembangunan pemuda) mempertimbangkan aspirasi pemuda, sesuai dengan kebutuhan spesifik pemuda, serta memperhatikan karakteristik pemuda rentan sehingga layanan dapat diakses secara mudah, aman dan nyaman oleh pemuda. Pemuda didorong untuk ikut berpartisipasi sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan evaluasi.

Proses pembuatan kebijakan menjadi proses yang membutuhkan koordinasi antar sektor. Di antara setiap proses, tahapan ketiga ini merupakan proses yang kompleks. Kompleksitas ini terjadi karena banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan pemuda (paling tidak terdapat 27 kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya membangun pemuda—berdasarkan Perpres No. 43 Tahun 2022).

Kompleksitas juga sebagai oleh konsekuensi dari pengambilan kebijakan publik. Konflik kepentingan bisa menjadi aral bagi pelaksanaan kebijakan. Bagian ini biasa diatasi jika disertakan kesepahaman akan akar masalah pembangunan pemuda. Untuk itu dalam pelaksanaan sebuah kebijakan publik perlu dibangun komunikasi, koordinasi dan kepemimpinan untuk menjembatani kepentingan yang berbeda.

Dalam konteks pengembangan kewirausahaan pemuda seperti yang dicontohkan pada bagian 2 di atas, kerangka berfikir yang bisa diterapkan meliputi tahapan aktivitas, output, outcome dan dampak. Hal tersebut secara bisa digambarkan sebagai berikut:

Tabel 7. Kerangka Berfikir Logis Perencanaan Kebijakan

Kegiatan	Output	Outcome	Dampak	Penanggung Jawab
Merumuskan skema insentif bagi pemangku kepentingan yang mendukung upaya pembinaan kualitas pengasuhan dan keterampilan kerja/wirusaha pemuda secara berkelanjutan (sebagai tenaga pengajar, dalam penyusunan kurikulum, dll)	<ul style="list-style-type: none"> Tersusun dan terlaksananya rumusan insentif bagi pemangku kepentingan yang menjalankan kegiatan pembinaan keterampilan kerja/wirusaha pemuda secara berkelanjutan Meningkatnya kapasitas pemuda dalam melakukan kegiatan wirausaha 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya proporsi pemuda wirausaha kerah putih Menurunnya tingkat pengangguran nasional Meningkatnya proporsi pemuda wirausaha yang menciptakan lapangan kerja 	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Bappeda, Dispora, Dinas koperasi dan UKM, disnaker, dinas pendidikan, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, OPD sektoral lainnya yang terkait, NGO, pengusaha/pihak swasta, akademisi
Kampanye/ promosi pemuda pewirusaha sukses secara luas dan berkelanjutan untuk membangun citra positif profesi wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> Terbangun persepsi positif keluarga terhadap profesi pewirusaha Terjadinya perbaikan dukungan keluarga bagi pemuda pewirusaha 			Bappeda, Dispora, Dinas komunikasi dan informasi, Dinas koperasi dan UKM, disnaker, dinas pendidikan, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, OPD sektoral lainnya yang terkait, NGO, media

<p>Pengembangan sistem penyebaran informasi pembinaan kewirausahaan dan peluang usaha secara luring maupun daring</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemuda mengetahui keberadaan program dan informasi dapat dengan mudah diakses pemuda • Meningkatnya jumlah pemuda yang mengakses program pembinaan 			<p>Bappeda, Dispora, Dinas komunikasi dan informasi, Dinas koperasi dan UKM, disnaker, dinas pendidikan, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, OPD sektoral lainnya yang terkait, NGO, media</p>
<p>Menyusun instrumen sinkronisasi dan koordinasi perencanaan & pelaksanaan pembangunan, serta instrument pemantauan dan evaluasi program pembangunan pemuda lintas sektor</p>	<p>Tersusun dan terlaksananya rancangan koordinasi perencanaan dan penganggaran RKP lintas K/L</p>	<p>Terselenggaranya program pengembangan kewirausahaan pemuda yang sinergis lintas sektor</p>		<p>Bappeda, Dispora, dan OPD sektoral terkait</p>
<p>Pemetaan (beserta pendataan) target sasaran dan sebaran kegiatan kepemudaan lintas K/L yang tumpang tindih</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terhimpunnya data sasaran, deskripsi kegiatan, dan sebaran kegiatan lintas dinas yang tumpang tindih 			<p>Bappeda, Dispora, dan OPD sektoral terkait</p>
<p>Merancang strategi untuk mengadvokasi serta melakukan dialog terencana secara berkelanjutan dengan OPD dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan terpenuhinya celah ketersediaan layanan kepemudaan (layanan kewirausahaan dan penga-suhan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya dialog lintas OPD dan lintas pemangku kepentingan secara berkelanjutan 			<p>Bappeda, Dispora, dan OPD sektoral terkait</p>

4.4 Tahap 4 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi (P&E) merupakan bagian penting dari siklus pelaksanaan program pembangunan. Kerangka hukum yang menjadi landasan penyusunan P&E di Indonesia meliputi:

- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- PP No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
- PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Sulistyaningrum 2018; Kemenpora 2019).

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengukur hasil dari intervensi pembangunan yang dilakukan. *PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan* mendefinisikan pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Adapun evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Tujuan dari penyelenggaraan pemantauan adalah untuk mengetahui seberapa baik program diimplementasikan. Sementara tujuan dari kegiatan evaluasi adalah untuk menilai tingkat relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, serta dampak dari program.

4.5 Implementasi Perpres No. 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah dalam Bentuk Rencana Aksi Nasional berbasis IPP

Adanya urgensi koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan Presiden, sehingga Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden No. 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Melalui koordinasi ini diharapkan terbentuk:

1. efektifitas pelayanan kepemudaan
2. sinkronisasi dan harmonisasi program/kegiatan kepemudaan
3. kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan mengacu pada lima domain IPP. Bentuk koordinasinya terdiri dari:

1. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
2. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda;
3. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan diatur melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan yang juga diamanatkan melalui pasal 8 Peraturan Presiden No. 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024. (Pasal 8).

4.5.1 Pengorganisasian RAD Pelayanan Kepemudaan

Adapun pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan untuk tingkat daerah mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana yang diatur pada pasal 9. RAD Pelayanan Kepemudaan diatur dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024. (Pasal 9).

Kegiatan ini seperti diatur pada pasal 18 ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah provinsi. Adapun pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan

Kepemudaan ditetapkan oleh gubernur.

Tim RAD Pelayanan Kepemudaan terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana dan Kelompok Kerja.

1. Tim Pengarah

- *Ketua* : Gubernur di tingkat provinsi; Bupati/Wali Kota di tingkat Kabupaten/ Kota.
- *Sekretaris* : Kepala Dinas yang menangani kepemudaan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
- *Anggota* : Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah di tingkat provinsi; Wakil Bupati/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah di tingkat kabupaten/kota.
- *Tugas* : Memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam rangka penyusunan RAD, termasuk memfasilitasi koordinasi antar OPD terkait.

2. Tim Pelaksana

- *Ketua* : Kepala dinas yang menangani kepemudaan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
- *Sekretaris* : Ketua Bappeda
- *Anggota* : Pejabat Eselon II dari OPD yang terkait kepemudaan
- *Tugas* : Membuat dan melaksanakan langkah-langkah teknis penyusunan RAD sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan

3. Kelompok Kerja

- *Ketua* : terkait dengan bidangnya
- *Anggota* : Pejabat Eselon III OPD terkait, Wakil Organisasi Kepemudaan, Media, Akademisi/Pakar Kepemudaan, BUMD dan Swasta
- *Jumlah* : Pokja dibentuk sesuai kebutuhan daerah dan

disesuaikan dengan alokasi anggaran daerah. Disarankan jumlah Pokja mengikuti 5 domain IPP.

- *Tugas* : Pokja merupakan *think tank* yang membantu Tim Pelaksana dalam menganalisis data dan merumuskan RAD Pelayanan Kepemudaan. Pokja juga merupakan motor penggerak dalam mengimplementasikan RAD Pelayanan Kepemudaan.

4.5.2 Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan

Untuk meningkatkan capaian IPP, Pemerintah Daerah bisa memaksimalkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan. Agar apa yang telah dirumuskan dalam RAD Pelayanan Kepemudaan bisa efektif dan mencapai hasil yang diharapkan dibutuhkan tiga faktor penting:

1. Adanya *political will* dan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk menjadikan kepemudaan sebagai bagian penting dari pembangunan di daerahnya.
2. Adanya basis legalitas mengenai pelayanan kepemudaan. Di tingkat Nasional sudah ada landasan hukum seperti UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Perpres No. 43/2022 tentang koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan. Dan di tingkat Daerah perlunya Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut sesuai kewenangan daerah.
3. Faktor lainnya seperti proses yang partisipatif, tujuan dan indikator yang jelas, adanya sumber pendanaan, penanggung jawab setiap indikator, adanya *monev* yang akuntabel, serta adanya strategi komunikasi yang tepat dan efektif.

Untuk pendanaan sesuai dengan Sesuai dengan ketentuan Perpres No. 43/2022, pendanaan penyelenggaraan kegiatan koordinasi strategis pelayanan kepemudaan di tingkat daerah, termasuk di dalamnya pembiayaan penyusunan RAD pelayanan kepemudaan, bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan terdapat 11 tahapan yang dimulai dari pembentukan dan penetapan Tim Koordinasi Daerah hingga penyampaian laporan pelaksanaan RAD. Secara lengkap tahapan tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:



Gambar 48. Tahapan Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan

Hubungan antara capaian IPP dan penyusunan RAD terlihat dalam format matriks RAD Pelayanan Kepemudaan.

Koordinasi Strategis Lintas Sektor (sesuai pasal 3)	Domain IPP/Bentuk Koordinasi - PROGRAM/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Indikator IPP/Indikator RO	Baseline (2020)	Target				OPD Koordinator/Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)

Gambar 49. Format Matriks RAD Pelayanan Kepemudaan

Penjelasan:

- Bagian 1 memuat sinergi program berdasarkan isu-isu strategis kepemudaan yang telah dipetakan dalam penyusunan naskah RAD.
- Bagian 2 berisi memuat sinergi program berdasarkan isu-isu strategis kepemudaan yang telah dipetakan dalam penyusunan naskah RAD.
- Bagian 3 berisi rumusan indikator dari domain IPP yang sedang diisi
- Bagian 4 berisi angka yang menunjukkan persentase atau jumlah tertentu dari indikator yang ditentukan, yang selanjutnya dijadikan angka awal bagi penghitungan capaian pada tahun tahun berikutnya

- Bagian 5 berisi yang menunjukkan persentase atau jumlah tertentu dari indikator yang ditentukan, yang selanjutnya dijadikan angka awal bagi penghitungan capaian pada tahun tahun berikutnya
- Bagian 6 memuat rumusan indikator dari domain IP memuat nama opd yang menjadi koordinator atau pelaksana program/ kegiatan

4.5.3 Pemantauan dan Evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan

Tahap terakhir yang juga penting dalam RAD Pelayanan Kepemudaan ialah melakukan pemantauan dan evaluasi. Setiap OPD melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Matriks RAD.

Hasil evaluasi selanjutnya diserahkan kepada Tim Pelaksana Koordinasi untuk dikompilasi dan hasilnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Pusat. Instrumen evaluasi dan pengukuran kinerja disediakan dalam format aplikasi digital oleh Tim Koordinasi Pusat.



BAB 5

PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari data yang diperlihatkan oleh IPP baik secara Nasional maupun Provinsi. Bab ini juga berisi saran/rekomendasi.

5.1 Kesimpulan

Secara Nasional capaian pembangunan pemuda yang ditunjukkan dalam IPP 2022 lebih baik dibandingkan tahun 2021. Berbagai pelayanan kepemudaan seiring semakin berakhirnya pandemi Covid-19 telah berjalan seperti sediakala. Hal ini tercermin angka capaian masing-masing domain telah pulih dibandingkan tahun 2019 atau tahun sebelumnya, kecuali pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan.

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan menjadi satu-satunya domain yang belum kembali pada tren peningkatan seperti pada sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, domain Partisipasi dan Kepemimpinan, mencapai angka 46,67, sedangkan pada tahun

2022 hanya mendapatkan angka 43,33.

Terdapat dua domain yang memiliki angka yang sama sebelum pandemi Covid-19 dan setelah Covid Covid. Pada domain Pendidikan, capaian tertinggi sebelum pandemi adalah 70.00. Adapun capaian pada tahun 2022, juga sama yaitu 70.00. Hal yang sama juga terjadi pada domain Lapangan dan Kesempatan Kerja. Angka tertinggi didapatkan pada tahun 2019 (45,00) dan pada tahun 2022, juga mendapatkan angka yang sama yaitu 45,00.

Pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan, capaian tertinggi sebelum pandemi adalah 57,50 (tahun 2018), dan capaian tahun 2022 adalah 65.00. Domain Gender dan Diskriminasi telah melebihi capaian sebelum pandemi di mana pada tahun 2019 mendapatkan angka 46,67, dan pada tahun 2022 mencapai angka 53,33.

Dari 34 Provinsi sebanyak 27 Provinsi berhasil mencatatkan peningkatan IPP. Sebanyak tiga provinsi memiliki IPP yang sama dengan IPP yang didapatkan pada tahun 2021, dan empat Provinsi justru mengalami penurunan angka IPP.

5.2 Saran

Melihat sejumlah dinamika dalam capaian IPP, berikut beberapa saran agar menjadi perbaikan pada kebijakan pembangunan pemuda.

1. Pengambil kebijakan sektoral agar menjadikan capaian pembangunan pemuda berdasarkan masing-masing domain sebagai bahan evaluasi bagi kebijakan pembangunan pemuda. Misalnya, domain pendidikan oleh kemendikbud, domain Kesehatan dan Kesejahteraan oleh Kemenkes, serta

domain Lapangan dan Kesempatan Kerja oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Tenaga Kerja.

2. Memaksimalkan peran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam tata kelola kebijakan pembangunan kepemudaan secara nasional. Kemenpora dapat menjadi orkestrator dan advokator yang mengkoordinasikan kebijakan pengambil kebijakan sektoral dalam kerangka perbaikan capaian pembangunan pemuda.
3. Perlunya meningkatkan peran pemerintah daerah (baik provinsi dan kabupaten/kota) dalam keberhasilan perbaikan capaian pembangunan pemuda.
4. Persoalan pada tiap domain pembangunan pemuda tidak benar-benar terpisah satu sama lain. Beberapa faktor kunci teridentifikasi memengaruhi capaian lebih dari satu domain. Misalnya, domain Pendidikan, bisa mempengaruhi domain Lapangan dan Kesempatan Kerja.
5. Pembenahan faktor-faktor kunci merupakan hal strategis yang perlu dilakukan karena memiliki daya ungkit yang besar untuk mendorong kinerja lebih dari satu domain pembangunan pemuda.
6. Setiap daerah di Indonesia, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, memiliki dinamika persoalan kepemudaan yang beragam. Penting bagi setiap Provinsi untuk memiliki kajian masing-masing terutama pada domain atau indikator yang mengalami penurunan, atau masih di bawah capaian Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Pemuda Indonesia 2022*. Jakarta. Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
- Bappenas. 2018. Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017. Jakarta.
- Bappenas. 2020. Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2019. Jakarta.
- Bappenas. 2022. Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2021. Jakarta.
- Bappenas. 2019. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
- Kemempora. 2019. *Laporan Kinerja Kemempora Tahun 2018*. Jakarta.
- Kemempora. 2022. Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan. Jakarta
- Ridho Al Izzati; dkk. 2022. Indeks Pembangunan Pemuda 2022, Jakarta, SMERU Research Institute.
- Sulistyaningrum WS. 2018. *Workshop Evaluasi Terpadu Perencanaan Pembangunan Pemuda, Fokus: Kewirausahaan Pemuda*. Jakarta

United Nations. 2010. World Programme of Action for Youth, <https://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wpay2010.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang *Kepemudaan*
- Perpres No. 43 Tahun 2022 tentang *Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan*
- Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang *Organisasi Kementerian Negara*
- PP No.39 Tahun 2006 tentang *Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*